

**PERSEPSI EFEKTIVITAS PENANGANAN KONFLIK POLITIK
(KASUS KONFLIK PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) DAN PARTAI
KEBANGKITAN BANGSA (PKB) DI DESA DONGOS KECAMATAN KEDUNG ,
KABUPATEN JEPARA)**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-2

**Program PascaSarjana Universitas Diponegoro
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi
Konsentrasi : Magister Administrasi Publik**



Diajukan Oleh :
SISNANTO RUSLI
NIM : D4E 001054

Kepada :

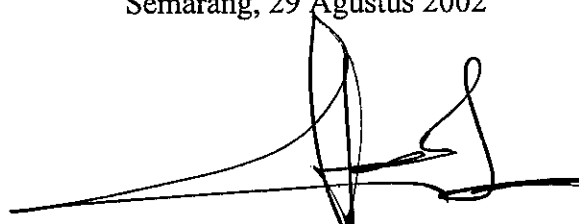
**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**

2002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 29 Agustus 2002

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal line on the left that curves upwards and loops back to the right, ending in a small flourish.

SISNANTO RUSLI

**PERSEPSI EFEKTIVITAS PENANGANAN KONFLIK POLITIK
(KASUS KONFLIK PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DAN PARTAI
KEBANGKITAN BANGSA DI DESA DONGOS KECAMATAN KEDUNG
KABUPATEN JEPARA)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

SISNANTO RUSLI

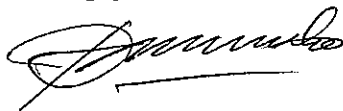
NIM : D4E001054

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal : 29 Agustus 2002

Susunan Tim Penguji

Ketua Penguji / Pembimbing I



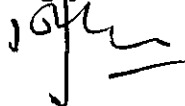
Drs. Purwoko, SU

Anggota Tim Penguji lain :



1. Drs. Ali Mufiz, MPA

Sekretaris Penguji / Pembimbing II



Dra. Dyah Hariani, MM



2. Dra. Dewi Rostyaningsih, MSi

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar Magister Sain.

Tanggal : 29 Agustus 2002

Ketua Program Studi MAP

Universitas Diponegoro Semarang



Drs. Y. WARELLA, MPA, PhD

ABSTRAKSI

Reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa dan rakyat telah banyak melibatkan banyak kalangan dan berimbas disegala bidang kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hal ini mungkin karena terkungkungnya kebebasan rakyat selama 32 (tiga puluh dua) tahun di rezim Orde Baru, sehingga aspirasi mereka sekarang disalurkan secara meledak-ledak tanpa batas lewat partai politik yang diikutinya. Sebagaimana ketika terjadi Konflik Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa di Desa Dongos, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara sewaktu Deklarasi PKB Ranting Dongos. Dimana konflik tersebut memerlukan penanganan secara khusus agar berhasil untuk mencapai tujuan atau dapat berjalan dengan efektif. Tentunya perlu melibatkan beberapa pihak untuk menanganinya yaitu Pemerintah Daerah, Partai yang berkonflik (elit partai dan massa pendukungnya), Lembaga-lembaga Peradilan serta Aparat Keamanan. Konflik ini bisa dikatakan konflik ideologis yang memperebutan massa pendukung.

Persepsi masyarakat terhadap Efektivitas Penanganan Konflik Politik Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa (Kasus Konflik Politik PPP dan PKB di Desa Dongos, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara) dikatakan tidak efektif dari segi penanganan hukum, karena tidak bisa memvonis dengan pasti pihak-pihak yang melakukan kerusuhan politik dan pembunuhan, tetapi dari segi keamanan bisa dikatakan efektif karena tidak terulang lagi peristiwa tersebut. Dimana diperoleh hasil penelitian bahwa Persepsi Masyarakat terhadap Efektivitas Penanganan Konflik Politik (Variabel Terikat) ada hubungan positif dengan Pendidikan, Komunikasi dan Partisipasi Politik (Variabel Bebas). Dengan tiga

variabel bebas dan satu variabel terikat yang dianalisa secara kuantitatif dan kualitatif dengan memberikan keterangan- keterangan pada analisa kuantitatif maka diharapkan persepsi masyarakat mengenai efektif tidaknya penanganan konflik politik tersebut dapat digali secara tuntas dan jelas tanpa ada usaha untuk menutupi.

Akhirnya penelitian dapat diharapkan menambah wacana baru bagi penanganan konflik politik , agar berjalan efektif. Untuk itu perlu dikembangkan penelitian- penelitian sejenis dengan menggunakan variabel- variabel lain , antara lain pembangunan politik pedesaan, pembangunan ekonomi pedesaan serta variabel- variabel lain yang dapat menggali secara tuntas hal-hal yang berkaitan dengan penanganan konflik politik agar berjalan efektif.

ABSTRACT

Reformation that is pioneered by students and citizen have more involved society life, nationality. This case, because freedom of people are enslaved during 32 years in new era rezim, so their inspiration now is distributed explosively without limitation through political party that is followed. As the conflict happened Partai Persatuan Pembangunan (PPP) and Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) in Dongos Village, subdistrict of Kedung, Jepara regency, when the declaration of PKB Dongos. Where the conflict needs solution specially so that it can be success to reach the goal or it can run effectively of course, it is necessary to involve the people to handle it as follow; regional government, party that has conflict (elite party and supported massa), justice institution also scurity instrument. The conflict can be said ideological conflict that teke over supported massa.

Society perseption to the effective ly of handling the conflict of party Partai Persatuan Pembangunan (PPP) and Partai Kebangkitan Bangsa (case of PPP political conflict and PKB in Dongos Village, subdistrict of Kedung, Jepara regency) is said not effective from

handling the law because it can not judge artainly people who do political riot and murder but from the scurity said can be said effective because it does't happen anymore. Where it's got the result of observation that society perception to effectivity of handling political conflict (tied variable) there is positive relation with education , communication and political participant (free variable) with 3 free vriables and that is analized quantitatively and gualitatively giving explanation to quantitatively analizing so that is hoped society perception about effective or not the handling of political conflict can be found totally and clear without effort to cover it.

At last, the research can be haped to increase new insight for handling political conflict so that it can run effectively. That's why it is necessary to develop the similar with using othe variables , for example: Developing of rural political , Developing of rural economical and other variable that can be found totally. The things are related with the handling of political conflict so that it can run effectively.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, akhirnya kami dapat menyelesaikan tugas penulisan tesis ini sebagai salah satu persyaratan guna mencapai derajat sarjana S2. Dimana tesis yang kami ambil dengan judul Persepsi Efektivitas Penanganan Konflik Politik (Kasus Konflik Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa) dimana penanganan konflik itu melibatkan Pemerintah Daerah, Elit-elit partai, Aparat Keamanan dan Lembaga Peradilan dalam hubungannya dengan variabel Pendidikan, Komunikasi dan Partisipasi Politik.

Tentunya dalam penelitian ini kami telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak termasuk di dalamnya pemakaian pendapat dari para penulis buku yang kebetulan karya mereka kami jadikan sebagai sumber acuan tesis ini. Akhirnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada :

1. Prof.Drs.J.Warella, MPA, Phd selaku Ketua Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik yang telah memberi ijin serta bantuan untuk mengadakan penelitian tesis ini
2. Bapak Drs Purwoko, MS, dan Ibu Dyah Hariani, MM selaku Dosen Pembimbing yang telah mencurahkan segala pengetahuan, waktu, tenaga serta perhatian untuk penulisan tesis ini .
3. Bapak Drs Ali Mufiz, MPA dan Ibu Dra Dewi Rostyaningsih, M Si, selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan-masukan demi sempurnanya penulisan tesis ini

4. Institusi / Aparat , Elit Partai, serta masyarakat Desa Dongos yang telah memberikan keterangan-keterangan dan data demi penyelesaian penulisan tesis ini
5. Ibu-Bapak , Ayah – Ibu , Anak – Isteriku (Syafrie Alif Baihaqi – Syahrial Arsyi Baihaqi, Febrina Z) dan Saudara- saudaraku (Umi sekeluarga, Rum sekeluarga dan Enny) yang selalu memberikan dorongan , motivasi dan inspirasi demi lancarnya penulisan tesis ini
6. Sahabat-sahabatku (Arie Susanto dan Wiek Anjah)serta semua pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan banyak bantuan demi selesainya penulisan tesis ini

Akhirnya kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya tesis ini. Dan semogapenulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan .

Semarang ,

2002

Penulis

MOTTO :

..... Katakanlah : Adakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui ? Sesungguhnya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. (Az Zumar : 9).

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi , juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain , kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka .

Semarang ,

2002

SISNANTO RUSLI

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	20
D. Kegunaan Penelitian.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	22
B. Hubungan Konsep Antar Variabel.....	66
C. Pembahasan Penelitian yang Relevan	70
D. Hipotesis.....	72
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Rancangan Penelitian.....	75
B. Tipe Penelitian.....	75
C. Ruang Lingkup/Fokus Penelitian.....	76

D. Lokasi Penelitian.....	77
E. Variabel Penelitian.....	77
F. Definisi Konseptual.....	78
G. Definisi Operasional.....	79
H. Jenis dan Sumber Data.....	81
I. Instrumen Penelitian.....	83
J. Populasi dan Sampel.....	84
K. Teknik Pengumpulan Data.....	85
L. Teknik Analisa Data	86
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	94
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A. Karakteristik Responden.....	99
B. Analisis Hasil Penelitian.....	119
C. Diskusi.....	148
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	150
B. Saran.....	152
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor :	Halaman
1. Distribusi Penduduk Desa Dongos Menurut Umur dan Jenis Kelamin	6
2. Sarana Transportasi dan Komunikasi	8
3. Pendidikan	9
4. Partisipasi Politik	14
5. Penanganan Konflik	14
6. Tata Guna Tanah Desa Dongos	95
7. Distribusi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	96
8. Pendidikan	96
9. Jumlah Sekolah	97
10. Mata Pencaharian	97
11. Sarana Transportasi dan Komunikasi	98
12. Responden Menurut Umur	99
13. Responden Menurut Jenis Kelamin	100
14. Responden Menurut Pendidikan	100
15. Distribusi Frekuensi Pendidikan	101
16. Distribusi Frekuensi Komunikasi	102
17. Distribusi Frekuensi Partisipasi Politik	102
18. Distribusi Frekuensi Persepsi Efektifitas Penanganan Konflik Politik	103
19. Pendidikan	104
20. Tingkat Pendidikan	105
21. Komunikasi	107

22. Tingkat Penggunaan Media Komunikasi	109
23. Partisipasi Politik	111
24. Tingkat Kesadaran Dalam Partisipasi Politik	114
25. Persepsi Efektivitas Penanganan Konflik Politik	115
26. Persepsi Masyarakat Terhadap Keterlibatan Aparat Dalam Efektivitas Penanganan Konflik Politik	118
27. Hubungan Antara Pendidikan (X1) dengan Persepsi Efektivitas Penanganan Konflik Politik	125
28. Hubungan Antara Komunikasi (X2) dengan Persepsi Efektivitas Penanganan Konflik Politik	127
29. Hubungan Antara Partisipasi Politik (X3) dengan Persepsi Efektivitas Penanganan Konflik Politik	129
30. Hasil Perhitungan Korelasi Rank Kendall (Tau C)	131
31. Hasil Perhitungan Koefisien Konkordansi Kendall (W)	133
32. Hasil Perhitungan Analisis Koefisien Korelasi Rank Partial Kendall	142
33. Hasil Perhitungan Analisis Koefisien Korelasi Rank Partial Kendall	143
34. Hasil Perhitungan Analisis Koefisien Korelasi Rank Partial Kendall	143
35. Hasil Perhitungan Analisis Koefisien Korelasi Rank Partial Kendall	144
36. Hasil Perhitungan Analisis Koefisien Korelasi Rank Partial Kendall	145
37. Hasil Perhitungan Analisis Koefisien Korelasi Rank Partial Kendall	145
38. Hasil Perhitungan Analisis Koefisien Korelasi Rank Partial Kendall	146
39. Hasil Perhitungan Analisis Koefisien Korelasi Rank Partial Kendall	146
40. Hasil Perhitungan Analisis Koefisien Korelasi Rank Partial Kendall	147

DAFTAR SKEMA

- 1. Hipotesa Minor**
- 2. Hipotesa Mayor**
- 3. Kerangka Pikir yang Mendasari Hasil Penelitian**
- 4. Jadwal Kegiatan**
- 5. Metrik Kuesioner**

DAFTAR LAMPIRAN

1. Data Hasil Penelitian dari SPSS
2. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara akan serasi apabila setiap warga negara mampu menjaga dan memelihara keseimbangan antara perolehan hak, termasuk yang bersifat asasi dan pemenuhan kewajibannya. Salah satu segi hak warga negara di bidang politik seperti hak menyatakan pendapat, hak memilih dan dipilih, hak berserikat dan hak menjadi anggota organisasi politik berdasarkan keyakinan politiknya. Setiap orang mendambakan tersedianya jalur dan wahana untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Singkatnya kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab, tetapi yang sering terjadi manusia lebih cenderung mendahulukan hak ketimbang kewajibannya. Sebenarnya kehidupan politik yang demokratis berarti adanya efektifitas fungsi dari lembaga-lembaga konstitusional secara bertanggungjawab serta lembaga-lembaga lainnya, adanya sistem multi partai diperankan oleh organisasi politik (partai-partai politik) secara bebas dan bertanggungjawab serta adanya aparat eksekutif sebagai pelaksana utama kebijakan politik nasional yang demokratis tidak memihak dan transparan.

Undang-undang Nomor 2 tahun 1999 tentang Partai Politik telah menetapkan bahwa partai politik merupakan sarana yang sangat penting arti, fungsi dan perannya sebagai perwujudan kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan

rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia . Kiprah reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa dan rakyat telah melibatkan banyak kalangan dan telah meluas ke berbagai bidang antara lain politik , ekonomi dan sebagainya . Dibidang politik gagasan demokrasi politik muncul ditandai dengan lahirnya banyak partai , perubahan sistem pemilu dan kebebasan pers . Hal ini disebabkan terkungkungnya kebebasan rakyat selama rezim orde baru , sehingga aspirasi mereka sekarang disalurkan secara meledak-ledak tanpa batas, lewat partai politik yang di ikutinya .

Secara kuantitatif perkembangan partai politik di Indonesia menunjukkan jumlah maksimal sedang secara kualitatif hanya beberapa partai politik saja yang dalam kondisi mantap . Karena ada Partai Dagelan yang ketuanya buta huruf . Dimasa orde baru jumlah partai hanya tiga yaitu Partai Persatuan Pembangunan , Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia . (Thamrin Sonatha, 1999 : 2)

Partai Persatuan Pembangunan yang massa pendukungnya adalah mayoritas masyarakat Islam baik pada tingkat elit politik atau *grass roots* , ketika reformasi digulirkan telah saling berebut pendukung dengan partai-partai lain yang massa pendukungnya adalah mayoritas masyarakat Islam , seperti Partai Kebangkitan Bangsa atau partai-partai bernafaskan islam yang lain . Persaingan mencari pendukung bisa menimbulkan konflik antara partai politik baik berupa konflik argumen antara elit politiknya atau massa pendukungnya bahkan konflik fisik yang mengancam keselamatan jiwa dan raga . Konflik-konflik tersebut tentunya memerlukan penanganan khusus baik dari pemerintah , partai-partai politik yang konflik , elit partai-partai politik dan pendukungnya . Lembaga-lembaga peradilan

untuk menangani kekerasan-kekerasan yang timbul akibat partisipasi politik yang menyimpang antara lain pembunuhan , demonstrasi , pembakaran atau tindakan-tindakan anarkis lainnya . Hal ini agar dapat menimbulkan persepsi yang positif dari masyarakat tentang efektifitas penanganan konflik politik antar partai sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) . Pemilu 1999 memang rawan terhadap kekerasan politik , mengingat kerusuhan yang terjadi diberbagai daerah yang diakibatkan oleh berbagai hal , antara lain kondisi politik dan ekonomi sekarang lebih rawan dibanding Pemilu 1997 serta pendukung partai politik masih terikat pada simbol- simbol politik aliran yang sifatnya *verbalisme*. Emosi masyarakat cepat sekali tersinggung , *sensitif* sekali. Untuk perlu diantisipasi secara dini dari kalangan pengurus dan pemimpin partai politik serta masyarakat- masyarakat untuk mengamankan jalannya kampanye agar Pemilu bisa berjalan secara jujur, adil, langsung, umum , bebas , rahasia dan demokratis. Sebagaimana diisyaratkan Undang- undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik dan Undang- undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilu . (Herman Ibrahim, et. al. 1999 : 271) .

Dengan memperhatikan dua Undang-undang politik tersebut , maka penulis ingin mengetahui bagaimana implikasinya terhadap persepsi efektifitas penanganan konflik politik antara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Desa Dongos, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara . Bentrokan antara massa pendukung PPP dan PKB di Dongos, Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara pada tanggal 30 April 1999 pada saat Deklarasi PKB tingkat ranting Dongos dalam rangka Pemilu tanggal 7 Juni 1999 , telah menelan korban 4 orang meninggal,

11 orang luka-luka, 15 kendaraan roda empat dan 6 roda dua terbakar. Disamping itu 3 rumah terbakar dan 2 rumah rusak . (Sumber Gelora Bumi Kartini edisi Mei 1999) . Kasus inipun menjadi pokok bahasan utama ketika kunjungan kerja Gubernur Jawa Tengah beserta Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) di Wilayah Pembantu Gubernur Pati, sehingga perlu penanganan yang serius untuk mengatasinya, tentunya banyak aspek didalamnya antara lain pendidikan, komunikasi, dan partisipasi politik serta aspek-aspek lainnya.

Desa Dongos secara administrasi terletak di Kecamatan Kedung , Kabupaten Jepara , Propinsi Jawa Tengah , di sebelah selatan Kota Jepara dengan jarak kurang lebih 13 km . Desa Dongos mempunyai luas wilayah 227,980 ha . Desa Dongos menurut keadaan alamnya merupakan wilayah daratan yang subur dimana rona buminya tajam , yaitu naik turun . Memperhatikan keadaan tersebut maka cukup potensial untuk perkebunan dan penanaman tanaman hortikultura . Jumlah penduduk Dongos saat ini 5225 jiwa , dengan sex ratio laki-laki 2.565 jiwa dan perempuan 2.664, menurut matapecaharian 70 % nya merupakan pertukangan (meubel) . Kemudian tingkat pendidikan masyarakat menurut data 26 % lulus SD , 67 % lulus sekolah menengah , dan 7 % nya lulus perguruan tinggi .

Sarana komunikasi , transportasi dan informasi di Desa Dongos yaitu radio , televisi , telepon , mobil dan sepeda montor . Dimana sarana tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal . Sedang agama yang dipeluk oleh masyarakat Dongos yaitu agama Islam oleh 5.221 jiwa, sedang 4 jiwa memeluk agama Katholik , yang *notabene* sebagai masyarakat pendatang . Adapun jumlah

pemilih dalam pemilu sebanyak 2.148 jiwa , yang akan disalurkan suaranya kepada partai-partai sebagai kontestan pemilu seperti Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa ,Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau partai lainnya .

Berdasarkan penelitian awal maka dapat disampaikan , bahwa dengan memperhatikan distribusi antara tingkat pendidikan , komunikasi dan partisipasi politik masyarakat , maka akan menimbulkan kesenjangan pemahaman dalam keanggotaan terhadap suatu partai politik tertentu , akibatnya jika terjadi konflik diantara partai politik akan mempersulit kebijakan penanganannya ,lebih-lebih jika konflik tersebut sampai kepada tingkat ancaman jiwa , maka efektifitas penanganannya akan sulit dan dilematis . Sosialisasi partisipasi politik yang disampaikan oleh organisasi politik terus diperlukan, akan tetapi karena adanya perbedaan tingkat pendidikan , komunikasi dan partisipasi politik , maka kesalahpahaman antara partai politik termasuk didalamnya elit politik partai yang bersangkutan berserta massa pendukungnya dapat terjadi , bahkan mengorbankan harta , benda , jiwa dan raga .

Berdasarkan keadaan diatas maka dapat di sampaikan data sebagai berikut :

TABEL I

DISTRIBUSI PENDUDUK DESA DONGOS MENURUT UMUR DAN JENIS KELAMIN

NO	KELOMPOK	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	%
		JML	%	JML	%		
1	0 - 4	302	12.26	304	11.01	606	11,60
2	5 - 9	252	10.23	256	9.27	508	9,70
3	10 - 14	256	10.39	262	9.49	518	9,90
4	15 - 19	240	9.74	343	12.42	583	11,16
5	20 - 24	241	9.78	346	12.53	587	11,23
6	25 - 29	188	7.63	193	6.99	381	7,30
7	30 - 39	278	11.29	186	6.73	464	8,88
8	40 - 49	308	12.5	276	9.99	584	11,17
9	50 - 59	299	12.14	280	10.13	579	11,08
10	60 Th Ke Atas	104	4.22	313	11.33	417	7,98
	JUMLAH	2.463	100	2.762	100	5225	100

Sumber : Monografi desa Dongos , April 2001

Dari tabel diatas dapat dilihat adanya 3 golongan penduduk yaitu :

1. Golongan anak-anak (0 – 19 Th) sebanyak 2. 220 jiwa (43,36 %).

Golongan ini belum produktif merupakan calon-calon tenaga potensional untuk masa depan. untuk mempersiapkan dan menghadapi masa depan yang penuh tantangan maka pengarahan akan pendidikan dan ketrampilan perlu diperhatikan .

2. Golongan Dewasa (19 Th ke atas) sebanyak 4.813 jiwa (51,34 %)

Golongan yang produktif dan merupakan usia dimana dua golongan lain menguntungkan pada golongan lain . Lapangan kerja yang terbatas untuk golongan ini sangat mempengaruhi tingkat pendapatan perkapita penduduk .

3. Golongan Tua (Lebih dari 60 Th) sebanyak 417 jiwa (7,98 %)

Golongan ini yang tidak produktif .

Sedangkan angka kelahiran di Desa Dongos pada bulan Maret 1998 sampai dengan Maret 1999 terdapat kelahiran 229 bayi . Karena dari data kelahiran belum terbagi dalam jenis kelamin maka kami menggunakan *sex ratio* 105 untuk bayi laki-laki dan 100 untuk bayi perempuan . Perbandingan kelahiran bayi laki-laki dan bayi perempuan di desa Dongos akan kita dapatkan :

$$\text{Bayi laki-laki} : 105/205 \times 229 = 117$$

Untuk perhitungan bayi laki-laki 5 tahun mendatang

$$\text{Bayi laki-laki} : (105/205 \times 229) \times 2 = 234$$

$$\text{Bayi perempuan} : (100/205 \times 229) \times 2 = 224$$

Adapun tingkat ketergantungan dibedakan menjadi tiga jenis antara lain :

1. Tingkat ketergantungan muda

$$Po-14/P15 \times 100 \% = 1632/ 2488 \times 100 \% = 65,60 \%$$

2. Tingkat ketergantungan Tua

$$P65/P15-64 \times 100 \% = 307/2488 \times 100 \% = 12,34 \%$$

3. Tingkat ketergantungan secara keseluruhan

$$Po-14 + P65 / P15-64 \times 100 \% = 1632+ 307/2488 \times 100 \% = 77,93 \%$$

Jadi tingkat ketergantungan ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan perkapita dimana semakin besar angka ketergantungan maka akan menjadi beban usia produktif .

Agar terbina kehidupan bermasyarakat yang baik dan teratur maka diperlukan adanya komunikasi yang baik . Seperti terlihat tabel prasarana transportasi dan komunikasi berikut ini :

TABEL II
SARANA TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI

NO	TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI	JUMLAH	PROSENTASE
1	Radio	2020	33,08 %
2	Televisi	500	8,19 %
3	Sepeda Motor	712	11,66 %
4	Mobil Pribadi	27	0,44 %
5	Pesawat Telpon	25	0,41 %
6	Sepeda	2.816	46,12 %
7	Lain- lain	6	0.10 %
	JUMLAH	6.100	100 %

Sumber : Monografi desa Dongos April 2001

Dari tabel 2 diperlihatkan bahwa radio dan sepeda, sepeda motor mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat desa Dongos disamping itu untuk menunjang roda perekonomian, jumlah industri , kerajinan ukir-ukiran itu dapat menyerap tenaga kerja bagi pengangguran desa Dongos dan desa sekitarnya . Hal ini berarti dapat mensukseskan program pemerintah dalam mengisi kemerdekaan dengan pembangunan terutama dalam upaya pemerataan kesempatan kerja . Dari pengamatan yang dilakukan ternyata kehidupan sosial masyarakat desa Dongos bila ditinjau dari sistem pendidikannya menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi meskipun masih adanya pengaruh yang kuat dari sistem tradisional yang mempengaruhi sistem pendidikan keluarga dan masyarakat . Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya

pemuda putus sekolah yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan lingkungan , dimana lingkungan pedesaan kebanyakan masih terpengaruh oleh adanya sistem tradisional yang “ kolot “ dan sulit uuntuk menerima hal-hal yang baru .

TABEL III
PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE
1.	Tamat PT/ Akademi	21	0, 44
2	SLTA	760	16, 08
3	SLTP	912	19, 30
4	Tamat SD	1.383	29, 27
5	Belum Tamat SD	1000	21, 16
6	Tidak Tamat SD	558	11, 81
7	Tidak Sekolah	63	1, 33
8	Lain- lain	27	0, 57
	JUMLAH	4.724	100 %

Sumber : Monografi desa Dongos , April 2001

Bila dilihat dari kelulusan perguruan tinggi dan akademi yang masih sedikit ,hal ini menunjukkan betapa masih rendahnya tingkat pendidikan desa Dongos , untuk itu diperlukan pengarahagan agar mereka mau berpacu menuntut pendidikan yang lebih tinggi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat . Tapi pada sisi lain rasanya sulit bila tidak ditunjang dengan status ekonomi yang mapan , sebab jika ingin melanjutkan ke perguruan tinggi harus pergi keluar daerah , tentunya memerlukan dana dan daya yang cukup banyak.

Banyaknya lulusanTsanawiyah dan Aliyah yang ada didesa Dongos , sebetulnya perlu dikembangkan untuk memacu kreatifitas dan mereka untuk mengikuti kursus-kursus di daerah terdekat agar mempunyai keahlian dan nantinya

bisa dikembangkan di desanya , jumlah lulusan SLTA 260 dan SLTP 412 .
Menunjukkan betapa besarnya minat dari masyarakat desa Dongos untuk meningkatkan pendidikan yang belum seimbang , dimana kebanyakan warganya tamat SD sebanyak 1.383 (39,36 %) sedangkan kehidupan sekarang dituntut akan ketrampilan , kemampuan dan pendidikan yang lebih tinggi .

Untuk mengetahui kegiatan politik masyarakat desa Dongos dalam Pemilu 1999, maka dapat dilihat dari tabel partisipasi politik sebagai berikut :

TABEL IV
PARTISIPASI POLITIK

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH		
		DPR	DPRD I	DPRD II
A	B	C	D	E
1	Partai Indonesia Baru	-	-	1
2	Partai Kristen Nasional Indonesia	2	1	-
3	Partai Nasional Indonesia	3	-	-
4	Partai Aliansi Demokrat Indonesia	-	-	-
5	Partai Kebangkitan Muslim Indo.	-	-	-
6	Partai Umat Islam	1	-	1
7	Partai Kebangkitan Umat	2	-	2
8	Partai Masyumi Baru	6	4	4
9	Partai Persatuan Pembangunan	1800	1803	1869
10	Partai Sarikat Islam Indonesia	-	-	-
11	PDIP	130	127	127
12	Partai Abul Yatama	-	-	-
13	PKM	-	-	-
14	PDKB	2	1	3
15	PAN	1	3	2
16	PRD	1	-	-
17	PSII	3	-	-
18	PKD	-	-	-
19	PPR	-	-	-
20	PRI	-	-	-
21	PPIIM	-	-	-

22	PBB	3	2	2
23	PSP	1	1	-
24	PK	1	1	1
25	PNU	-	-	-
26	PNI FRONT MARHAEN	-	-	-
27	PI PKI	-	-	-
28	PR	-	-	-
29	PID	-	-	-
30	PNI Massa Marhaen	-	-	-
31	Partai Murba	-	-	-
32	PDI	1	-	-
33	Partai Golkar	12	17	17
34	Partai Persatuan	-	-	-
35	PKB	265	219	235
36	PUDI	-	-	-
37	PBN	-	-	1
38	Partai MKGR	-	-	-
39	PDR	-	1	-
40	PCD	1	-	-
41	PKP	-	1	-
42	Partai SPSI	-	-	-
43	PNBI	-	1	-
44	PBTII	1	-	2
45	PSUNI	-	-	-
46	PND	-	-	-
47	PUMI	-	-	-
48	PII	-	1	-
	JUMLAH	2.236	2.183	2.267

Data Hasil Pemilu Desa Dongos, Kecamatan Kedung, 7 Juni 1999

Dari tabel IV tersebut, dapat dilihat bahwa Partai Persatuan Pembangunan memperoleh suara 1800 untuk DPR, 1803 untuk DPRD I dan DPRD II memperoleh suara 1869, sedang Partai Kebangkitan Bangsa untuk DPR memperoleh suara 265, DPRD I sebanyak 229 suara dan DPRD II sebanyak 235 suara. Dalam jumlah akhir diperoleh jumlah angka 2.236 untuk DPR, 2.183 suara untuk DPRD I, 2.267 untuk

DPRD II . Dalam jumlah hak pilih 2. 143 tetapi jumlah perolehan suara melebihi jumlah hak pilih karena banyak karyawan meubel dari luar daerah dan desa yang mengguankan hak pilihnya di Desa Dongos dengan menggunakan Kartu C. Dari tabel tersebut pun dapat dilihat bahwa ada beberapa partai yang tak diminati oleh masyarakat setempat . Hal ini menunjukkan bahwa disatu sisi banyak jumlah partai disatu sisi sebagai peserta Pemilu sedang disisi lain disebabkan terlalu pendeknya waktu sosialisasi partai . (Thamrin Sonatha , 1999 : 33).

Dari keadaan diatas pun dapat dianalisa bahwa kebanyakan penduduk Desa Dongos, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara berpendidikan sekolah menengah pertama/Tsananwiyah , sekolah menengah umum/Aliyah . Sedang sarana komunikasi yang digunakan cukup memadai , sehingga dapat digunakan sebagai sarana dan prasarana terjadinya komunikasi politik . Karena tingkat pemahaman tentang partisipasi politik yang masih rendah yaitu hanya sebagai peserta untuk menghadiri kampanye(sekedar ikut-ikutan) maka komunikasi politik identik dengan pengajian mungkin ini karena kampanye-kampanye yang disampaikan oleh elit politik partainya bahwa mendukung partainya sama dengan membela agama .Uniknya yaitu mengapa elit partai yang sekaligus sebagai kyai, menggunakan sarana agama untuk mewujudkan tujuan-tujuan politiknya .

Memperhatikan beberapa permasalahan yang penulis sampaikan berdasarakan penelitian pendahuluan , maka dapat diambil beberapa hal yang mempengaruhi Persepsi Efektifitas Penanganan Konflik antara Partai Persatuan Pembangunan dan

Partai Kebangkitan Bangsa di Desa Dongos, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara yaitu ;

1. Pendidikan masyarakat yang relatif rendah membuat pemahamannya tentang suatu informasi kurang responsif .
2. Industri meubel yang maju membawa pengaruh kepada masyarakat akan tidak pentingnya pendidikan , karena tanpa pendidikan tinggi status sosial ekonominya tinggi.
3. Sarana komunikasi yang tersedia cukup memadai , hanya saja informasi pemahaman politik yang diterima masyarakat dan elit politik masih rendah .
4. Banyaknya elit politik yang berstatus kyai , sehingga partisipasi politik masyarakat sering diarahkan dalam mimbar pengajian agama .

Persepsi Efektifitas Penanganan Konflik Politik antara PPP dan PKB di Desa Dongos Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara telah banyak mengalami hambatan karena dipengaruhi antara lain variabel pendidikan, komunikasi dan partisipasi politik , disamping itu ada faktor-faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi , sehingga memerlukan penanganan secara khusus yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Jepara , kedua partai politik yang bertikai (elite partai dan masa pendukung) , aparat kamanan dan aparat penegak hukum .

TABEL V
PENANGANAN KONFLIK

NO	PIHAK YANG TERLIBAT	PENANGANAN
1	Pemerintah Kabupaten Jepara	Perundingan
2	Elite Partai	Perundingan
3	Aparat Keamanan	Kekuatan Militer
4	Aparat Penegak Hukum	Pengadilan

Sumber Gelora Bumi Kartini , Mei 1999

Dari tabel di atas tampak aparat yang terkait dengan efektifitas penanganan konflik telah melakukan kegiatan perundingan, pemakaian kekuatan militer dan pengadilan. Akan tetapi perundingan yang dilakukan oleh partai- partai yang bertikai masih rendah, sedang institusi terkait lainnya hanya sebagai fasilitator serta kurangnya keterbukaan dari partai-partai yang bertikai dalam menyelesaikan konflik .

Berdasarkan penelitian pendahuluan , bahwa efektifitas penanganan konflik politik tersebut mengalami hambatan, karena hal- hal sebagai berikut :

1. Rendahnya pendidikan masyarakat dan elit politik dari masing-masing partai , sehingga pemahaman mereka terhadap politik juga rendah .
2. Banyaknya informasi politik yang disampaikan oleh elit politik dengan mengatasnamakan agama.

3. Banyaknya sarana komunikasi kurang dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan politiknya .
4. Partisipasi politik masyarakat lebih banyak pada tingkat bawah bukan pada partisipasi tingkat tinggi .
5. Lebih senang persaingan politik dalam bentuk kekerasan , sehingga partisipasi politiknya seringkali menyimpang .

Dari beberapa hal itulah sangat berpengaruh terhadap Persepsi Efektifitas Penanganan Konflik antara Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa .

B . IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH

Dengan memperhatikan keadaan dari latar belakang diatas , maka penulis mengklafikasikan dan mengidentifikasi masalah kemudian merumuskan masalahnya sebagai berikut :

IDENTIFIKASI MASALAH

1. Perspsi Efektifitas Penanganan Konflik Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa .

Pemerintah Daerah Jepara bersama aparat terkait lainnya yaitu Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) , elit-elit Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa berusaha menyelesaikan konflik antara dua Partai Islam tersebut

dengan harapan dapat mewujudkan stabilitas politik yang mantap dan *kondusif* di Kabupaten Jepara , akan tetapi diperoleh keadaan yang tidak sesuai dengan tujuan tersebut . Hal ini dapat dilihat dari beberapa pengamatan yaitu :

- a. Rendahnya pertemuan dari dua elit partai tersebut dan massa pendukungnya untuk menyelesaikan konflik politik .
- b. Sedikitnya masyarakat yang ikut membantu kelancaran penanganan konflik .
- c. Ide-ide penanganan konflik masih banyak bersifat sporadis .
- d. Penanganan konflik yang terjadi masih didominasi oleh kekuasaan politik dari kedua elit politik
- e. Kurangnya keterbukaan dari elit-elit partai dan massa pendukungnya .
- f. Pemerintah daerah dan aparat terkait hanya sebagai fasilitator dan mediator .

Dengan demikian Efektifitas Penanganan Konflik Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa di Desa Dongos kurang memuaskan dan kurang mendapatkan dukungan , khususnya dari massa kedua partai tersebut . Hal ini disebabkan kurang disadarinya bahwa instabilitas politik akan berpengaruh terhadap aspek lainnya .

2 . Pendidikan

Memperhatikan dari data pendidikan di Desa Dongos , Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara , diperoleh bahwa jumlah sekolah yang paling banyak tingkat dasar

sedang pendidikan masyarakat 67 % tamat sekolah menengah . Hal ini dapat dilihat dari :

- Banyaknya anak lulusan Tsananwiyah /SMP dan Aliyah / SMA dan tidak melanjutkan ke bangku perguruan tinggi , sehingga akan berhubungan dengan pengetahuan politiknya yang masih rendah.
- Banyaknya anak lulusan SMP/SMA atau yang sederajat bekerja di industri meubel .
- Kurang seimbangya jumlah fasilitas sekolah dan jumlah usia anak sekolah .
- Banyaknya masyarakat yang berstatus buruh meubel dan sedikitnya “juragan” meubel .

Melihat keadaan pendidikan diatas maka pendidikan menjadi salah satu faktor yang berhubungan dengan Persepsi Efektifitas Penanganan Konflik Politik PPP dan PKB di Desa Dongos , Kecamatan Kedung , Kabupaten Jepara .

2. Komunikasi

Upaya untuk mencapai hasil yang optimal dalam Efektifitas Penanganan Konflik Politik PPP dan PKB di Desa Dongos tidak hanya tergantung pada tingkat pendidikan tetapi ada faktor lain yang tidak bisa dipisahkan yaitu komunikasi antara massa masing-masing partai atau elit partai , massa elit partai dengan pemerintah daerah dan aparat terkait lainnya, didalam pertemuan-pertemuan penanganan konflik

tersebut . Sehingga diperlukan informasi yang jelas dan mudah dipahami yang dapat mempermudah untuk dilaksanakannya penanganan konflik tersebut . Namun kenyataan yang ada sebagai berikut :

- ❖ Masyarakat kurang tahu masalah politik dan partai politik .
- ❖ Rendahnya minat pemirsa televisi untuk mengikuti siaran pengetahuan politik .
- ❖ Kurang *interes* -nya masyarakat terhadap informasi konflik politik yang sehat .
- ❖ Kurangnya rasa solidaritas dalam hidup beragama, berbangsa, bernegara dan berpolitik.

Sehingga dengan rendahnya komunikasi tersebut akhirnya memberikan pengetahuan masyarakat yang sempit tentang politik dan parpol yang pada akhirnya masyarakat kurang mengerti akan pentingnya Efektifitas Penanganan Konflik Politik demi terciptanya stabilitas dipelbagai bidang yang pada akhirnya akan membawa pendewasaan politik yang mantap.

4. Partisipasi Politik

Salah satu alat untuk mengetahui seberapa besar masyarakat ikut terlibat dalam membantu terciptanya Efektifitas Penanganan Konflik Politik antara PPP dan PKB sebagai salah satu wujud partisipasi politik , hal ini dapat dilihat dari beberapa hal antara lain :

- ◀ Keterlibatan masyarakat hanya sebagai peserta kampanye sehingga partisipasi mereka dalam menciptakan efektifitas penanganan konflik sangat rendah .
- ◀ Rendahnya sumbangan material untuk menyelesaikan konflik dari kedua Partai Politik .
- ◀ Kurang adanya rakyat dari desa Dongos sebagai tokoh elit politik yang profesional, yang mengabdikan demi kepentingan nasional .
- ◀ Masyarakat hanya dijadikan sebagai obyek politik bukan subyek politik .
- ◀ Kurang bisa memberikan masukan tentang kebijakan politik partainya dan kehidupan politik nasional untuk menuju tertib politik .

Dari kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat masih rendah kualitasnya . Sehingga mengakibatkan penanganan konflik menjadi kurang memuaskan .

C. PERUMUSAN MASALAH

Memperhatikan rendahnya penanganan konflik politik PPP dan PKB di Desa Dongos, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara . Sebagaimana disampaikan dalam identifikasi masalah maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut “ **Apakah Ada Hubungan Pendidikan, Komunikasi dan Partisipasi Politik dengan Persepsi Efektifitas Penanganan Konflik Politik Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa di Desa Dongos, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara** “ .

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian menurut beberapa ahli metodologi bervariasi, Sutrisno Hadi (1980:2) mengemukakan bahwa pada dasarnya tujuan penelitian itu untuk pertama, tujuan ilmiah, dimana untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dengan teori-teori baru, dan kedua tujuan praktikal, yaitu untuk memecahkan masalah-masalah praktis yang mendesak. Sedang menurut Sofyan Effendi (1981:12) tujuan pokok penelitian sosial adalah menerangkan fenomena sosial dimana peneliti seringkali menghubungkan satu fenomena tertentu dengan fenomena lainnya. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya hubungan antara Pendidikan dengan Persepsi Efektifitas Penanganan Konflik Politik Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa.
2. Untuk mengetahui besarnya hubungan antara Komunikasi dengan Persepsi Efektifitas Penanganan Konflik Politik Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa.
3. Untuk mengetahui besarnya hubungan antara Partisipasi Politik dengan Persepsi Efektifitas Penanganan Konflik Politik Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa.
4. Untuk mengetahui besarnya hubungan antara Pendidikan, Komunikasi dan Partisipasi politik dengan Persepsi Efektivitas Penanganan Konflik Politik Partai Persatuan Pembangunan Dan Partai Kebangkitan Bangsa.

D.KEGUNAAN PENELITIAN

Dari latar belakang , identifikasi , perumusan masalah dan tujuan penelitian dapat dirumuskan kegunaan penelitian sebagai berikut :

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi ilmu sosial , khususnya kebijakan publik (*public policy*) dan informasi bagi penelitian serupa , serta menambah pemahaman tentang masalah-masalah yang menyangkut persepsi efektifitas penanganan konflik politik antara partai politik dan variabel-variabel yang mempengaruhinya dalam hal ini pendidikan , komunikasi dan partisipasi politik masyarakat .

b. Kegunaan praktis

- Sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam merumuskan dan merencanakan dan melaksanakan kebijakan politik pemerintah Kabupaten Jepara beserta aparat terkait serta partai-partai politik dalam melaksanakan tugasnya sesuai amanat yang diembannya dan pihak-pihak lain yang membutuhkan .
- Dapat digunakan untuk melaksanakan penelitian lanjutan yang masih relevan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Tinjauan Paradigma Ilmu Administrasi Negara

Paradigma penelitian dapat diartikan sebagai pandangan atau model, atau pokok pikiran yang menjabarkan berbagai variabel yang akan diteliti kemudian membuat hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lain, sehingga akan mudah dirumuskan masalah penelitiannya, pemilihan teori yang relevan, rumusan hipotesis yang diajukan, metode atau strategi dan instrumen penelitian, teknik analisa serta kesimpulan yang diharapkan (Sugiono, 1992:23).

Dengan adanya perkembangan ilmu-ilmu sosial yang lebih memperhatikan konteks sosial, masalah, prospek dan kebijaksanaan, maka masalah politik juga terjadi pada ilmu administrasi negara kemudian Miftah Thoha (1988:23) mengutip Nicholas Henry yang membagi paradigma sekaligus dengan tahapan tahunnya menjadi :

- a. Paradigma Dikotomi Politik - Administrasi (1900-1926)
- b. Paradigma Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937)
- c. Paradigma Administrasi Negara Sebagai Ilmu Politik (1950-1970)
- d. Paradigma Administrasi Negara Sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)
- e. Paradigma Administrasi Negara Sebagai Administrasi Negara (1970)

Dalam perkembangan selanjutnya adalah : Administrasi Negara dalam rangka Reinventing Government serta Good Governance .

Tiap tahap dari paradigma tersebut mempunyai ciri-ciri tertentu sesuai dengan fokus dan lokusnya. Fokus menunjukkan sasaran spesialisasi dari bidang studi , sedangkan lokus menunjukkan dimana bidang ini secara institusional berada , serta menunjukkan tempat dari bidang studi tersebut .

Dalam penelitian ini paradigma yang diacu adalah paradigma administrasi negara kelima . Dalam paradigma kelima ini Miftah Thoha (1988:39) berpendapat :

Sebagaimana yang terlihat dalam trend yang diikuti oleh paradigma ini , maka fokus administrasi negara adalah teori organisasi , praktika dalam analisis public policy dan tehnik administrasi dan administrasi dan manajemen yang sudah maju .Adapun lokus normatif dari administrasi negara digambarkan oleh paradigma itu ialah pada birokrasi pemerintah dan pada persoalan-persoalan masyarakat (public affairs) .

Dalam memecahkan suatu permasalahan akan melibatkan pemerintah dan masyarakat , karena pembangunan pada umumnya khususnya pembangunan politik ditujukan untuk kepentingan rakyat .Sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kebijakan publik (Undang -undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik) serta organisasi publik (partai politik) karena administrasi negara disini dapat dipakai sebagai agen perubah (*agent of change*) .

Oleh karena itu dalam pembangunan dibidang politik, masyarakat harus berpartisipasi secara aktif demi terlaksananya tertib politik dan dihindarkan adanya konflik kekerasan yang mengarah kepada partisipasi politik yang menyimpang . Pemerintah dan organisasi politik sebagai fasilitator , motivator dan dinamisator tidak

akan berhasil menangani konflik politik di Desa Dongos, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara dengan baik tanpa adanya dukungan yang optimal dari masyarakat

2. Landasan Teori

Sebelum dikemukakan beberapa teori yang berhubungan dengan penelitian ini terlebih dahulu penulis mengajukan pendapat yang berhubungan dengan teori .

Teori adalah serangkaian konsep , definisi dan proposisi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistimatis akan suatu fenomena . Gambaran yang sistimatis ini dijabarkan dengan mengembangkan variabel yang satu dengan variabel yang lain dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena (Fred N Kerlinger dalam Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi , 1989 : 25) . Dari pengertian tersebut berikut di kemukakan beberapa teori yang ada relevansinya dengan permasalahan yang telah disebutkan di atas .

2.1 Persepsi

Untuk memahami sikap terhadap obyek tertentu dari individu dapat tercermin melalui pandangan , pendapat atau persepsi terhadap suatu kejadian atau masalah yang terjadi di sekitarnya baik secara langsung atau tidak langsung bisa mempengaruhinya . Sikap ini dapat berupa sikap pandangan atau sikap perasaan tetapi sikap mana disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap obyek tadi . Menurut WA Gerungan (1972: 151) , “disampaikan persepsi adalah suatu proses mental yang dilakukan secara menyeluruh baik stimulus,

motivasi, sikap pada individu secara sadar dan aktif untuk menangkap suatu obyek tertentu. “ Sedangkan oleh Ton Kertopati (1980 : 42) diartikan , persepsi adalah suatu proses dengan mana seorang mengenal lingkungan sekitarnya yang terdekat, sedangkan proses persepsi adalah sebagai berikut :

- a. Adanya situasi eksternal
- b. Energi yang ada pada si penerima
- c. Transmisi dari impuls persyaratan
- d. Proses yang kompleks didalam otak yang menimbulkan persepsi dan tindakan .

Berkaitan dengan itu Jack Plano (1986 : 88) memberikan gambaran bagaimana seseorang dapat mempersepsikan suatu obyek tertentu , yaitu : “ persepsi terjadi sebagai hasil interaksi antar seorang dengan obyek tertentu yang kemudian dapat menimbulkan penafsiran indrawi. Persepsi bukanlah sesuatu yang sama sekali tersurat karena sambutan dan penilaian berbagai isyarat indra dapat terjadi di bawah ambang sadar. “Berdasarkan konsep- konsep di atas, maka persepsi adalah suatu proses mental yang dilakukan secara menyeluruh baik stimulus,sikap pada individu secara sadar dan aktif sebagai hasil interaksi seseorang untuk menangkap obyek itu.

2.2. Efektifitas

Menurut Ibnu Syamsi (1983 : 58) , disampaikan , “ bahwa efektifitas (hasil guna) ditentukan pada hasilnya dan tanpa atau kurang mempedulikan pengorbanan yang perlu diberikan untuk memperoleh hasil tersebut.” Sedangkan Richard Steers (1983 : 26) , efektifitas adalah dinilai menurut ukuran seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai dan optimal daripada

menggunakan tujuan akhir atau tujuan yang diinginkan sebagai dasar ukuran. “ Dari kedua pendapat tersebut tampak, bahwa efektifitas dapat dilihat dari sejauhmana suatu kelompok dapat mencapai tujuan yang layak . Sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) , “efektifitas adalah pencapaian hasil sepenuhnya seperti yang benar- benar diinginkan , setidaknya tidaknya berusaha mencapai hasil yang semaksimal mungkin, biasanya efektifitas dikaitkan dengan faktor waktu. “ Oleh Gibson (1988 : 48) ,” efektifitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama , tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektifitas. “ Selanjutnya Gibson, et. al (1988 : 52) memberikan pandangan tentang efektifitas , “ adalah segala tindakan , yaitu tingkat efektifitas individu , tingkat efektifitas kelompok kerja dan efektifitas organisasi. “

Sondang P. Siagian , disampaikan (1982 : 151) sebagai berikut , “bahwa efektifitas kerja berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang ditentukan artinya apakah suatu pelaksanaan tugas dinilai baik atau tidak , sangat tergantung pada bilamana tugas itu diselesaikan dan tidak terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakan tugas dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu . “

Dari pendapat tersebut , dapat disimpulkan bahwa suatu organisasi dalam memberikan pengertian tentang efektifitas memandang dari penyelesaian pekerjaan yang tepat waktu tanpa melihat bagaimana cara mengerjakan atau melaksanakan tugas tersebut dan tanpa memperhitungkan biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut .

Bila dikaitkan dengan Undang- undang nomor 2 tahun 1999 tentang Partai Politik , pasal 3 disebutkan , “ Pembentukan Partai Politik tidak boleh membahayakan persatuan dan kesatuan , “ sedang fungsi Partai Politik dalam pasal 7 ayat (1) di sebutkan , bahwa fungsi Partai Politik adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pendidikan politik dengan menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Menyerap , menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara melalui mekanisme badan- badan permusyawaratan / perwakilan rakyat.
- c. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan- jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi.

Sedang dalam pasal 16 huruf d disebutkan , “ bahwa Partai Politik tidak boleh melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesiadalam memelihara persahabatan dengan negara lain. “ Kebijakan Pemerintah dalam bagian penjelasan dimaksudkan yaitu kebijakan pemerintah dalam menjalankan kebijakan negara. Akan tetapi Undang- undang Nomor 2 tahun 1999 tentang Partai Politik dan Undang- undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum tidak dapat menjamin tertibnya pelaksanaan Pemilu oleh Partai- partai Politik, karena potensi kekerasan dalam kampanye sangat besar sekali, sehingga ada juga masyarakat yang tidak turut serta dalam kampanye , karena

orangnya apatis, sinis, alienasi (terasing) dan anomi (terpisah) . Alasannya sebagai berikut (Herman Ibrahim, et. al , 1999 : 272):

- a. Kerana tujuan kampanye Organisasi Partai Politik hanya untuk mendapatkan suara.
- b. Karena politisi lebih mementingkan partainya sendiri ketimbang negara.
- c. Karena politisi bicara melulu tanpa tindakan yang berarti.
- d. Karena para legislatif hanya untuk memperoleh keuntungan politis dan ekonomis semata tanpa memikirkan kepentingan rakyat banyak.
- e. Para anggota legislatif sering melupakan janji- janji.
- f. Meskipun legitimasi suatu pemerintahan akan terbentuk dari hasil Pemilu , namun nasib rakyat tidak akan banyak berubah.

Dalam Undang- undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum , bagian penjelasan disebutkan , “ bahwa dalam kampanye , Organisasi Partai Politik (OPP), dilarang mempersoalkan ideologi , menghina, menghasut, agama, suku (sara) dan sebagainya. “ Selanjutnya Faisal Siagian (1999 : 275) ada beberapa hal yang harus diperhatikan akan tidak terjadi tindak kekerasan dalam kampanye Pemilu :

- a. Kesepakatan kode etik yang mewajibkan pada partai politik untuk menghormati partai lain dan pengutan kontrol pimpinan partai politik atas massa pendukungnya
- b. Pengontrolan terjadinya praktek politik kotor, seperti “ *money politics*” , premanisme politik serta kriminalitas kampanye , harus diberikan sanksi keras.
- c. Mewaspadaai adanya *provokator* politik yang dapat menyesatkan dan memanaskan suasana permusuhan antar pendukung partai politik .

- d. Mewaspadaai ketidakpusan dalam penghitungan suara.
- e. Daya saing dari Organisasi Partai Politik harus dideteksi agar tidak menimbulkan persaingan yang tidak sehat . Hal ini dapat dilihat dari program- program partai yang ditawarkan dengan menggunakan metode- metode tertentu agar bisa efektif dalam melontarkan program- programnya. Daya saing pemahaman terhadap program partai, maka *fanatisme* yang tidak *kondusif* lagi untuk menarik dukungan massa , sehingga Organisasi Partai Politik mampu menembus segmen pemilih secara rasional.

Dari alternatif – alternatif tersebut jika dilaksanakan dengan baik , maka tindak kekerasan dalam “kampanye pemilu “ oleh Organisasi Partai Politik dapat dihindarkan .

2.1. Konflik

Sebagaimana diketahui manusia tidak bisa berkembang tanpa berinteraksi dengan manusia lain karena dalam hidup berbangsa dan berpolitik agar bisa maju maka perlu ada kompetisi dengan individu atau kelompok yang lain . Dengan itu juga dalam berpolitik , kita partai politik bersaing dalam merebut dukungan masa , maka tidak dapat dielakkan akan terjadi konflik didalamnya apapun bentuknya , konflik yang paling membahayakan adalah kekerasan politik yang berupa pengrusakan atau tindakan menyimpang lainnya .

Menurut Miftha Thoha (1999 :105) bahwa “ Istilah konflik akan membawa suatu kesan dalam pikiran seseorang bahwa dalam hal tersebut terdapat suatu pertikaian , pertentangan antara beberapa orang atau kelompok orang-orang , tidak ada kerjasama , perjuangan satu pihak untuk melawan pihak lainnya , atau suatu proses yang berlawanan (opposition proses) , sebenarnya secara pribadi atau kelompok lebih-lebih dalam kehidupan politik , konflik berusaha untuk dihindari , akan tetapi hal demikian sangat sulit untuk dihilangkan bahkan konflik yang terjadi bisa mengarah kekerasan , pembunuhan serta kejahatan lainnya . Konflik bisa terjadi , karena dalam pribadi seseorang terdapat hal-hal sebagai berikut :

1. Sejumlah kebutuhan-kebutuhan dan peranan-peranan yang bersaing .
2. Beraneka macam cara yang berbeda yang mendorong peranan-peranan dan kebutuhan-kebutuhan itu dilahirkan .
3. Banyaknya bentuk halangan-halangan yang bisa terjadi diantara dorongan dan tujuan .
4. Terdapatnya baik aspek-aspek yang positif dan negatif yang menghalangi tujuan-tujuan yang di inginkan .

Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu konflik bisa terjadi manakala suatu kelompok atau seseorang dalam usahanya mencapai tujuannya terasa secara relatif terhalang oleh pencapaian tujuan kelompok atau orang lain . Akibatnya kepentingannya seseorang atau kelompok tersebut terasa terhalang oleh kepentingan orang atau kelompok lain . Joe Kelly dalam Miftha Thoha (1999 : 106):

bahwa situasi konflik yang tidak bisa dihindari adalah keadaan-keadaan seperti ini ;paling sedikit dua orang yang mempunyai pandangan-pandangan yang tidak bisa disatukan , orang-orang yang tidak bisa toleransi dari sesuatu yang bermakna ganda , seseorang mengabaikan kenikmatan dari indahnya bayang-bayang kelabu dan seseorang yang dengan cepatnya suka menarik suatu konklusi .

Leo Agustino dalam Analisis CSIS (2001 ; 254) ,” konflik sebagai manifestasi dari berbagai sebab furstasi , rasa aman , rasa takut , tidak seimbangnyanya antara harapan dan kenyataan dan sebagainya , bisa berwujud tindak kekerasan terhadap orang lain , kelompok lain atau etnis lain yang dapat terjadi di setiap negara di dunia . Jika tidak dikelola secara baik , konflik dapat menjadi bahaya laten dan memiliki siklus kekerasan yang sukar untuk diselesaikan . Akumulasi konflik sering kali dimanifestasikan dalam perilaku untuk menuntut keadilan dan kebenaran demi mencapai suatu tujuan tertentu” .

Situasi konflik yang dapat menjadi bahaya laten dan memiliki siklus kekerasan yang sukar diselesaikan, menurut Freud dalam Leo Agustino (2001 : 255) “ Setiap manusia memiliki sifat bawaan yang diametral , yaitu sifat insting kehidupan adalah hasrat untuk saling mencintai satu dengan yang lain “ Oleh karena itu , tidak heran apabila sering menyaksikan duality of character atau split personality pada diri seseorang . Menurut Maurice Durerger (1998 ; 157),” Antagonisme atau konflik adalah urusan yang paling penting dalam politik , karena antagonisme ada , maka harus ada usaha untuk menghilangkannya atau sekurang-kurangnya untuk menguranginya guna mencapai integrasi sosial “.

Dari pendapat tersebut menunjukkan bahwa fenomena politik atau kekerasan mengandung dimensi-dimensi antagonisme atau konflik dan terjadi di berbagai bentuk komunitas manusia, bangsa, masyarakat internasional, elit politik dan partai baik dari kota maupun di desa. Karena adanya komunitas manusia tersebut, dimana masing-masing saling bersaing memperebutkan peranan maka akan terjadi perjuangan untuk memperebutkan peranan yang dominan dan mengarah ke konflik.

Menurut Stephen P. Robbins (1996; 124) "Konflik adalah suatu proses yang mulai bila satu pihak merasakan bahwa satu pihak lain telah mempengaruhi secara negatif, atau akan segera mempengaruhi secara negatif, sesuatu yang diperhatikan pihak pertama" selanjutnya Stephen P. Robbins membagi definisi konflik menurut beberapa pandangan sebagai berikut:

- Pandangan tradisional : konflik adalah keyakinan bahwa semua konflik merugikan dan harus dihindari, karena seringkali berkaitan dengan kekerasan, destralisasi dan ketidakserahan.
- Pandangan hubungan manusia, konflik adalah keyakinan peristiwa yang wajar tidak hanya terelakkan dalam setiap kelompok.
- Pandangan interaksionis, konflik adalah keyakinan yang tidak hanya suatu kekuatan positif dalam suatu kelompok melainkan juga mutlak perlu untuk suatu kelompok agar dapat berkinerja efektif.

Dari pandangan-pandangan diatas konflik yang menimbulkan kekuatan tidak perlu dihindari sedang konflik yang bisa menimbulkan disintegrasi , kekerasan serta penyimpangan lainnya harus ditangani dengan baik agar tidak menjadi bahaya laten .

Sedangkan menurut Arbi Sanit (1998 ; 233) “ konflik politik adalah gejala kehidupan politik itu tidak terhindarkan sepenuhnya , betapun hebatnya sistem pengendalian kehidupan masyarakat yang diciptakan . Karena konflik itu ada dan tak terhindarkan maka dalam kehidupan politik pasti ada kasus politik yang timbul akibat pertentangan antara penduduk atau kelompok politik tertentu dalam rangka mempengaruhi ataupun mendapatkan posisi kekuasaan negara” .

2.2 Sumber-sumber konflik .

Menurut Leo Agustino Analisis CSIS (2001; 256) sumber konflik :

- a. Vertikal adalah perbedaan kepentingan kelas .
- b. Horisontal adalah bermacam sebab dapat memicu pertikian , kekerasan , kekejaman hingga bahkan pembersihan etnis , antara lain ideologi , agama , persoalan pribumi dan pendatang , ras sampai masalah etnisitas .

Sumber konflik diatas yang paling tajam adalah konflik horisontal yang berupa konflik politik antara partai politik atau kelompok penguasa yang dikuasai .Selanjutnya Arbi Samit (1998 ; 234) , bahwa sumber konflik adalah sebagai berikut

:

a. Konflik secara kultural , dimana nilai masyarakat yang mempengaruhi tingkah laku warganya orang perorang sehingga konflik merupakan perwujudan dari pertentangan nilai diantara warga masyarakat .

b. Konflik secara struktural yaitu konflik yang terjadi diantara golongan atau kelompok yang berlainan tingkat kekayaan dankekuasan yang di milikinya .

Konflik secara kultural dan struktural dalam era reformasi seringkali terjadi bahkan akibat perbedaan pemahaman tentang kebebasan maka konflik kultural dan struktural sulit dielakkan .

Dari sumber konflik di atas, yang paling relevan dengan penelitian ini, adalah konflik horisontal dimana kekerasan politik yang terjadi adalah antara orang- orang NU yang tergabung dalam kedua partai yaitu PPP dan PKB dalam memperebutkan massa pendukungnya . Selanjutnya oleh William Liddle (1992 : 92-98) disampaikan bahwa analisis sistem banyak partai berdasarkan dinamika kelompok- kelompok diskusi berada pada kisaran sebagai berikut :

1. Partai – partai yang mendominasi pada ideologi dari pada program (khususnya Islam dan Marhaenisme) merupakan ancaman terhadap modernisasi karena pemimpin partai dalam legislatif lebih memperhatikan hal- hal seperti hubungan antara hukum nasional dan hukum Islam.
2. Partai – partai yang memperuncing ketegangan ideologis dikalangan rakyat Indonesia , baik di tingkat elit maupun di tingkat massa.

3. Partai- partai menciptakan ketegangan dalam masyarakat , dimana kalangan pemimpin partai mengakumulasi dukungan massa dalam rangka persaingannya dengan elit politik pusat.
4. Para pemimpin- pemimpin partai pada dasarnya adalah orang- orang yang mencari kesempatan untuk diri sendiri serta lebih tertarik pada kesejahteraan mereka sendiri dan sekutu- sekutu mereka daripada kepentingan umum.
5. Pemimpin partai terpisah dari para pemilih yang semestinya mereka wakili.
6. Kerusakan yang ditimbulkan sistem kepartaian tidak terbatas pada organisasi partai saja tetapi juga pada lembaga – lembaga lainnya.
7. Sistem banyak partai dianggap sebagai ketidakstabilan sistem pemerintahan.

Dari analisa William Liddle di atas , ketegangan (konflik) antar partai dapat terjadi di desa Dongos , Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara karena ketegangan ideologis partai PPP dan PKB dimana PPP berasas Islam sedang PKB berasaskan Pancasila.

Sedangkan Priyo Budi Santosa yang mengutip pendapat Marck dan Snyder dalam La Ode (1996: 42) disampaikan :

“ bahwa konflik yang pada tubuh organisasi sosial politik, lebih banyak dilatarbelakangi oleh masalah kelangkaan posisi dan sumber- sumber (resources) , dimana kalau ditarik pada perspektif Weberian , posisi dan sumber- sumber itu merupakan status yang berkaitan dengan kekuasaan dan ekonomi. “

Sejalan dengan pendapat tersebut , ketika PKB dideklarasikan dengan mengatasnamakan partai orang NU, sedang massa PPP sebagaimana dalam La Ode (1996 : 43) disampaikan, bahwa orang- orang NU merasa dianaktirikan sehingga

terjadi perebutan massa . Hal ini sejalan dengan kasus konflik politik yang terjadi di Desa Dongos antara PPP dan PKB .

Sedang menurut DO. Sears (1994: 28) , disampaikan :

“ bahwa konflik akan terjadi secara kolektif dalam masyarakat karena adanya kesenjangan relatif , yaitu ketidakpuasan dalam kelompok yang tidak hanya timbul dari kesenjangan secara obyektif , tetapi juga perasaan kurang secara subyektif yang relatif besar dibandingkan dengan kelompok atau orang lain. Bila seseorang merasa adanya kekurangan dibandingkan dengan kelompok lain, maka mereka akan mengungkapkan kejengkelannya melalui organisme kelompok.”

Konsep tersebut menunjukka adanya ketidakpuasan antara kelompok satu (PPP) terhadap kelompok yang lain (PKB) yang mendeklarasikan berdirinya ranting PKB di Desa Dongos, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, padahal di Desa Dongos PPP cukup kuat sehingga dari pihak PPP merasa ketakutan kehilangan massa pendukungnya.

Faktor-faktor penyebab konflik politik (Antagonisme Politik) menurut Maurice Duverger (1998 ; 159) sebagai berikut :

a. Sebab individual meliputi :

1. Perbedaan dalam bakat-bakat individual yaitu : doktrin-doktri liberal yang mendasarkan persaingan dari faktor-faktor ekonomi dan keinginan diri sendiri serta pandangan konservatif yang mendasarkan bahwa individu yang paling berbakat lebih didorong oleh pertimbangan-pertimbangan altruistik dari pada pertimbangan ekonomi .

Tahap III. Maksud (Intensi), yaitu keputusan-keputusan untuk bertindak dalam suatu cara tertentu dalam suatu episode konflik baik berupa persaingan kolaborasi , menghindari , mengakomodasi serta kompromi .

Tahap IV. Perilaku yang mencakup pernyataan , tindakan dan reaksi yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkonflik , antara lain : upaya terang-terangan untuk menghancurkan,serangan fisik agresif , ancaman dan ultimatum , serangan verbal yang tegas , pernyataan atau tantangan serta ketidaksepakatan atau salah paham kecil .

Tahap V . Hasil-hasil yang dibedakan ada dua :

- Hasil fungsional , konflik menghasilkan suatu perbaikan kinerja kelompok .
- Hasil disfungsional , merintangki kinerja kelompok .

Tahap-tahap proses konflik tersebut yang sering menjadi isu utama secara global dan membahayakan stabilitas masyarakat adalah pada tahap perilaku , dimana tindakan kekerasan memegang peran utama dalam proses konflik , jika tidak dapat di hentikan maka akan mengganggu stabilitas kehidupan berbangsa , bernegara , beragama dan berpolitik . Menurut Miftha Thoha (1999 ; 113) Secara konsepsional , ada empat sumber konflik organisasi :

1. Suatu situasi yang tidak menunjukkan keseimbangan tujuan-tujuan yang ingin dicapai .
2. Terdapatnya sarana-sarana yang tak seimbang , atau timbulnya proses alokasi sumber-sumber yang tidak seimbang .

3. Terdapatnya suatu persoalan status yang tidak selaras .
4. Tumbuhnya persepsi yang berbeda .

2.3. Penanganan Konflik

Menurut Maurice Duverger (1988 ; 310) bahwa upaya untuk menangani konflik adalah dengan melakukam integrasi , karena integrasi adalah proses mempersatukan masyarakat , yang cenderung membuatnya menjadi suatu kota yang harmonis ,yang didasarkan pada tatanan yang oleh anggota-anggotanya dianggap sama harmonisnya . Selanjutnya disampaikan upaya untuk menangani antagonisme politik / konflik dengan cara sebagai berikut :

1. Membatasi konflik dengan membrantas terjadinya kekerasan dan memperhatikan batas-batas dalam membrantas kekerasan .
2. Pembuatan kompromi yaitu adanya negosiasi dan arbitrase , sehingga pihak-pihak yang bergolak bisa mencoba menyesuaikan perbedaan-perbedaannya oleh mereka sendiri melalui diskusi dan dialog proses demokrasi yang normal , wakil-wakil dari pihak yang saling bertentangan bertemu disekitar meja perundingan dan mengerjakan syarat-syarat penyelesaian ,sambil memperhatikan kepentingan masing-masing dan masing-masing harus membuat konsesi.
3. Mengembangkan solidaritas , dimana setiap individu membutuhkan orang lain didalam suatu jaringan hubungan yang saling masuk dengan yang lain

Penanganan konflik diatas menunjukkan kemajuan politik suatu bangsa sangat tergantung pada kualitas dari konflik dan integrasi yang berkembang didalam masing-

masing masyarakat . Sehingga kunci untuk meningkatkan kualitas itu terletak pada rasa keadilan dan solidaritas atau rasa kebersamaan , sebab masyarakat yang berhasil memupuk rasa keadilannya dan rasa kebersamaannya dengan baik akan mampu menyelesaikan berbagai macam konflik yang dihadapinya .

Louis Pondy dalam Miftah Thoha (1999:116) dalam mengatasi konflik organisasi , antara lain meliputi tiga pendekatan sebagai berikut :

1. Pendekatan tawar menawar (Bargaining Aproach)

Pendekatan untuk mengatasi konflik organisasi yang memperselisihkan mengenai tuntutan-tuntutan alokasi dana yang terbatas .

2. Pendekatan Birokratis

Pendekatan untuk mengatasi konflik yang jadi karena persoalan hierarki baik vertikal , horizontal maupun hubungan-hubungan otoritas dalam susunan hirarki organisasi .

3. Pendekatan Sistem

Pendekatan yang menekankan pada kesulitan dalam mengatasi persoalan-persoalan koordinasi .

Selanjutnya Stephen P. Robbins (1996:137), cara untuk mengatasi konflik adalah :

1. Perundingan, dimana suatu proses dua pihak atau lebih bertukar barang atau jasa dan berupaya menyepakati nilai tukar untuk barang dan jasa tersebut.

2. Strategi tawar-menawar, dimana terjadi perundingan yang berusaha untuk membagi sejumlah tetap sumber daya, suatu situasi kalah – menang.

Penanganan situasi konflik tersebut mengisyaratkan bahwa konflik merupakan alat untuk menimbulkan perubahan yang radikal, konflik mempermudah kepaduan kelompok, konflik memperbaiki keefektifan kelompok dan organisasi serta konflik akan menimbulkan tingkat ketegangan yang sedikit lebih tinggi dan lebih konstruktif. Arbi Sanit (1998 : 236), bahwa pengelolaan konflik dengan cara sebagai berikut:

1. Pengelolaan struktur konflik, yang mendasarkan pada suku, aliran, ras dan agama.
2. Pengelolaan struktur kekuasaan yang berkaitan dengan masalah politik.

Selanjutnya dikatakan oleh Arbi Sanit (1998 : 238) pengelolaan terhadap segenap kekuatan (struktur) konflik dimaksudkan berdasarkan pertimbangan tatanan dan kepentingan penguasa tersebut, kemudian dimanfaatkan strategi sebagai berikut :

1. Strategi integral yang berusaha untuk mengendalikan konflik antara unsur masyarakat. Untuk itu ditonjolkan penggunaan konsep-konsep perukunan, persaudaraan, kebangsaan (nasionalisme) persatuan dan kesatuan, pengorbanan dan sebagainya.
2. Strategi memang menyeluruh (total) untuk menghadapi konflik diantara masyarakat dengan negara. Dalam rangka itu dioperasikan organ-organ politik yang mendukung pengutamaan negara, seperti pengutamaan yang besar, pengorbanan individu dan golongan (kelompok) demi masyarakat. Secara keseluruhan, kedaulatan negara, negara kemakmuran, negara sebagai perlindungan masyarakat dan bangsa, dan sebagainya.

3. Strategi yang mengkombinasikan ketergantungan dengan perlawanan untuk mengelola konflik politik diantara negara Indonesia dengan negara kuat dunia .
4. Strategi yang saling menguntungkan untuk menghadapi perselisian dengan semua negara , dimana strategi ini seringkali memanfaatkan jargon politik persahabatan , kerjasama , hubungan baik , saling menguntungkan dan sebagainya .

Dari strategi yang disampaikan oleh Arbi Sanit, yang paling efektif dan efisien diterapkan adalah strategi integral yang berusaha untuk mengendalikan konflik antar unsur masyarakat. Untuk itu ditonjolkan penggunaan konsep- konsep perukunan , persaudaraan , kebangsaan (nasionalisme), persatuan dan kesatuan, pengurbanan dan sebagainya. Karena strategi ini sangat menonjolkan negosiasi yang berdasarkan perundingan damai dan kekeluargaan , sehingga tidak menonjolkan kekuatan secara fisik dan menghindari banyak korban lebih lanjut. Hal ini menunjukkan, bahwa pengelolaan konflik dapat dilakukan dengan mengidentifikasi sumber konflik (adanya perbedaan pengetahuan/ pemahaman , perbedaan nilai/ alokasi dan kepentingan, perbedaan latar belakang personal/ sejarah kelompok sosial). Karena akan sangat berpengaruh terhadap intensitas konflik dan manifestasi konflik.

Adapun alternatif penyelesaian konflik dalam pelayanan masyarakat ada beberapa cara:

- a. Politis, dengan memperhatikan kelompok lain yang tidak terakomodasi kepentingannya.

b. Administratif, dengan menetapkan strategi untuk penyelesaian konflik yang terjadi .

c. Hukum, membuat arbitrase

d. Alternatif lain, mediasi, kompensasi, rekognisi, konsultasi publik dan rekonsiliasi.

Alternatif- alternatif tersebut akan dibuat dasar pengambilan keputusan dalam penyelesaian konflik baik solusi konflik secara struktural maupun horisantal. T. Hani

Handoko (1995: 345) , penyebab- penyebab konflik dalam organisasi sebagai berikut:

a. Komunikasi., yaitusalah pengertian yang berkenaan dengan kalimat , bahasa yang sulit dimengerti atau informasi yang mendua dan tidak lengkap serta gaya individu manajer yang tidak konsisten.

b. Struktur, yaitu pertarungan kekuasaan antar departemen dengan kepentingan-kepentingan atau sistem penilaian yang bertentangan, persaingan untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas, atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok , kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka.

c. Pribadi, yaitu ketidak sesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi karyawan dengan perilaku yang diperankan pada jabatan mereka, dan perbedaan dalam nilai- nilai atau persepsi.

Selanjutnya oleh T. Hani Handoko , jenis- jenis konflik ada lima dalam kehidupan organisasi:

a. Konflik dalam diri individu, yang terjadi bila seorang individu menghadapi ketidakpastian .

b. Konflik antar individu dalam organisasi yang sama.

- c. Konflik antar individu dan kelompok yang berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka.
- d. Konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, karena terjadi pertentangan kepentingan antar kelompok.
- e. Konflik antar organisasi yang timbul sebagai akibat bentuk persaingan ekonomi dalam sistem perekonomian suatu negara.

Adapun metode pengelolaan konflik, ada tiga bentuk manajemen konflik :

- a. Stimulasi konflik dalam satuan- satuan organisasi, dimana pelaksanaan kegiatan lambat karena tingkat konflik terlalu rendah.
- b. Pengurangan atau penekanan konflik bila terlalu tinggi atau menurunkan produktifitas.
- c. Penyelesaian konflik yaitu dominasi atau penekanan (kekerasan, penenangan, penghindaran dan aturan mayoritas) , kompromi (pemisahan, arbitrase, kembali ke peraturan- peraturan yang berlaku , penyusunan), pemecahan , masalah integratif (konsensus, konfrontasi, penggunaan tujuan- tujuan yang lebih tinggi).

Sehingga Persepsi Efektivitas Penganganan Konflik adalah pandangan tentang keberhasilan pengaturan ketidaksesuaian antara dua atau lebih karena keharusan membagi sumber daya yang terbatas dalam suatu kegiatan karena kenyataan adanya perbedaan status , tujuan, dan nilai .

3.1 . Pendidikan

Sebagaimana diketahui, manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang cerdas dan dikaruniai akal untuk berpikir dan berperilaku yang benar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, beragama dan berpolitik. Akal manusia ini dapat ditumbuhkembangkan melalui pendidikan sebagai salah satu sarana pembelajaran untuk berpikir lebih baik dan bermanfaat. Dalam rangka pembelajaran tersebut diperlukan suatu tingkat pendidikan yang memadai agar dapat meningkatkan kesadaran dan pola pikir masyarakat dalam memecahkan persoalan hidup berbangsa, bernegara khususnya berpolitik. Oleh karena itu yang harus diterima oleh peserta didik dapat ditunjang dengan berbagai jenis pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan seseorang guna menilai situasi – kondisi dimana ia berada.

Sebagaimana pendidikan menurut Soerjono Sukanto (1987: 252), “Pendidikan adalah nilai tertentu bagi manusia serta hal- hal baru dan juga bagaimana berpikir secara ilmiah”.

Sedangkan menurut Undang- undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 1 ,” Pendidikan adalah usaha untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan pengarahan dan atau latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang (UU No 2 Tahun 1989 : 3)”.

Pendapat G.Kartasaputra (1991: 2).” pendidikan adalah suatu usaha atau kegiatan agar dapat merubah (pengetahuan, sikap dan ketrampilan) manusia yang sedang dididik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pendidiknya menurut pola atau rencana yang telah ditentukan “. “Pendidikan adalah tuntutan didalam hidup tumbuhnya anak- anak , adapun maksudnya ,pendidikan akan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak- anak itu ,agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya “(Ki Hajar Dewantoro dalam Wens Tanlain ,1989: 64) . Selanjutnya Francis J . Brown disampaikan ,”bahwa pendidikan adalah pengawasan yang konsisten dari proses perubahan tingkah laku sehingga menghasilkan perilaku seseorang secara pribadi dan perilaku individu dalam masyarakat” (Dalam Wens Tanlain,1988:65).

Kaufmann dalam Harbangun Siagian (1989: 37), menyampaikan “pendidikan adalah sebagai proses yang memberikan kepada peserta didik ketrampilan , pengetahuan, sikap yang menunjukkan mereka hidup dan bekerja dalam negaranya manakala mereka sudah tamat dari lembaga pendidikan.”

Dari konsep- konsep di atas bahwa pendidikan mempunyai arti yang penting untuk merubah perilaku atau tindakan seseorang agar mau ikut membantu penanganan konflik politik suatu partai termasuk didalamnya konflik politik PPP dan PKB.

3. 2. Jenis Pendidikan

Upaya untuk menciptakan insan yang terdidik yang mempunyai polah tingkah laku yang sesuai dengan konsep- konsep pendidikan di atas maka pendidikan dapat dikelompokkan dalam jenis- jenisnya.

Menurut UNESCO , bentuk dan jenis pendidikan mencakup tiga pengertian :

- a. Pendidikan formal , yaitu sistem pendidikan yang dilembagakan, bertahap, kronologis, bertingkat yang dimulai dari Sekolah Dasar sampai tingkat Perguruan Tinggi.
- b. Pendidikan Non Formal, yaitu menunjuk pada kegiatan berorganisasi dan sistematika dalam rangka mencari dan menghimpun pengetahuan diluar pendidikan formal.
- c. Pendidikan In Formal, yaitu sistem pendidikan yang menunjuk pada proses pendidikan seumur hidup yang dilakukan seseorang dalam rangka mencari dan menghimpun pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman sehari- hari dan dari lingkungan (Manzoor Ahmed, 1984: 98).

Wenz Tanlain(1989:43), pendidikan digolongkan menurut pola pengelolaannya sebagai berikut :

- a. Pendidikan Informal ialah pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari- hari dengan sadar atau tidak sadar , sejak seseorang lahir sampai mati , didalam keluarga , dalam pekerjaan atau pergaulan sehari- hari.

- b. Pendidikan Formal (pendidikan sekolah) ialah pendidikan yang diperoleh seseorang di sekolah secara teratur, sistematis, bertingkat dan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat.
- c. Pendidikan Non Formal (luar sekolah) ialah pendidikan yang diperoleh seseorang secara teratur, terarah, disengaja , tetapi tidak terlalu mengikuti peraturan yang ketat .

Sedangkan menurut MJ. Langenveld dalam Sutari Imam Barnabib(1993:7) disampaikan bahwa pendidikan dibedakan :

- a. Pendidikan sebelum lahir yaitu pemeliharaan kesehatan ibu, ketika lahir anak tersebut dapat sehat selalu.
- b. Pendidikan psikis, yaitu ketika ibu mengandung jangan sampai mempunyai rasa iri, dengki dan jangan banyak pikiran.

Helmut Nolker dan Ebnerhard S , pendidikan dibedakan sebagai berikut :

- a. Pendidikan formal sebagai segala- galanya yang diberikan oleh sistem sekolah umum dari tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah tingkat tinggi.
- b. Pendidikan Non Formal adalah semua tindakan pendidikan yang tidak dilaksanakan di lembaga sekolah umum.
- c. Pendidikan In Formal, yaitu pendidikan yang berlangsung di setiap bidang kehidupan sehari- hari(1980: 4)

Berkaitan dengan penelitian ini , penulis mengacu pada keseluruhan bentuk pendidikan formal, non formal dan in formal, karena penanganan konflik politik PPP dan PKB lebih banya berhubungan dengan arus pengetahuan yang diterima oleh

seseorang atau masyarakat yang sumbernya bukan hanya dari pendidikan formal saja , tetapi juga melalui pendidikan yang lain (informal dan non formal) yang berkaitan dengan penanganan konflik politik PPP dan PKB. Karena dengan tiga jenis pendidikan tersebut akan mempengaruhi pola sikap dan perilaku individu atau masyarakat sehingga tidak mempunyai rasa iri dan dengki yang dapat menjadi sumber konflik pada umumnya , khususnya konflik PPP dan PKB.

3.3. Fungsi Pendidikan

Mengenai pentingnya peranan pendidikan , sebagaimana dikemukakan Josef Riwukaho(1991: 71) , yaitu pendidikan itu sangat penting sebab:

- a. Dasar memberikan pengetahuan yang luas dan mendalam tentang bidang yang dipilih atau yang dipelajari seseorang.
- b. Melatih manusia untuk berpikir secara rasional dan menggunakan kecerdasan ke arah yang tepat , melatih manusia menggunakan akalanya dalam kehidupan sehari-hari baik dalam berpikir, menyatakan pendapat maupun bertindak.
- c. Memberikan kemampuan dan ketrampilan kepada manusia untuk merumuskan pikiran, pendapat yang hendak disampaikan kepada orang lain secara logis dan sistematis sehingga mudah dimengerti.

Sedangkan Rickey (1980: 4) ,” pendidikan berkenaan dengan fungsi yang luas dari pemeliharaan dan perbaikan kehidupan suatu masyarakat terutama membawa warga masyarakat yang baru (generasi muda) bagi penunaian kewajiban dan tanggungjawabnya didalam masyarakat.”

Prof. Sutari Imam Barnadib (1993: 9), bahwa fungsi pendidikan adalah:

- a. Sebagai mekanisme institusional yang fundamental untuk mengembangkan ketrampilan dan pengetahuan manusia . Karena pendidikan tidak hanya berusaha membekali pengetahuan dan ketrampilan yang memungkinkan orang bekerja sebagai kekuatan yang akan mengubah ekonomi masyarakat, melainkan juga memberikan nilai- nilai, cita- cita, sikap serta aspirasi yang langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kepentingan pembangunan suatu bangsa.
- b. Pendidikan diarahkan untuk mengubah dan mengembangkan pengetahuan , bukan untuk mengawetkannya , untuk menyebar luaskan kebudayaan kepada lingkungan sosial yang paling luas lagi malahan kepada masyarakat lain .

Pendidikan memang dibutuhkan untuk menumbuhkan sikap intelektual dalam berpikir, menilai dan mempertimbangkan segala sesuatu secara rasional . Dengan adanya pendidikan itu akan diperoleh berbagai pengetahuan , ketrampilan dan kecakapan serta dengan harapan dapat bertanggung jawab dan berguna tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi keluarga , masyarakat dan negara pada umumnya Hal ini karena pendidikan antara lain dapat mengubah sikap mental yang konservatif , mempercepat dan mempermudah arus informasi dan inovasi serta mempengaruhi kreativitas manusia. Karena pendidikan secara langsung atau tidak langsung akan meningkatkan kualitas (intelektual dan moral) manusia .

Dan Nimmo (1989:124),” bahwa komunikasi politik dan belajar politik (pendidikan politik) dapat melalui keluarga dan kawan-kawan dekat atau teman sebaya . Sedangkan sosialisasi pendidikan politik dapat diberikan ketila sekolah

dasar , sekolah menengah , perguruan tinggi dan media massa” . Jika dikaitkan dengan tertib politik menurut Samuel P.Huntington (1983:68) , “bahwa suatu negara dalam tingkat menengah dengan tingkat baca tulis 25 s/d 60 % ternyata tidak stabil dibanding 50 % daripadanya yang hanya memiliki literacy rate lebih dari 90 % “.

4.1. Komunikasi

Menurut Mayo dalam Wayne (1993:60) disampaikan , bahwa” komunikasi adalah kemampuan seorang individu untuk menjalankan perasaan dan gagasannya kepada orang lain , kemampuan kelompok untuk berkomunikasi secara efektif dan intim dengan kelompok lainnya” .

Sedang Prof.H.J Van Der Schroeff dan Prof.Dr.Willem Makaliwe ,”komunikasi adalah setiap proses yang melibatkan hubungan-hubungan kemanusiaan baik dengan tukar menukar pandangan perasaan dan keinginan “ . Maswadi Rauf , ed (1993:19) ,”komunikasi adalah hubungan dan interaksi yang terjadi antara dua orang / pihak atau lebih . Interaksi ini terjadi karena seseorang menyampaikan pesan-pesan dalam bentuk lambang-lambang tertentu yang diterima oleh pihak lain yang menjadi sasarannya sehingga sedikit banyak mempengaruhi sikap dan tingkah laku pihak dimaksud”. Selanjutnya Hernando Gonzales dalam Amri Jahi , ed (1993:3)berpendapat, “komunikasi adalah suatu proses yang dalam proses itu beberaa partisipan bertukar tanda-tanda informasi dalam suatu waktu,tanda informasi ini dapat saja bersifat verbal , non verbal dan para linguistik”

Komunikasi oleh Onong Uchjana Efendi , “didefinisikan sebagai proses dimana seseorang mengoperasikan perangsang-perangsang untuk mengubah sikap dan tingkah laku orang lain atau masyarakat” .Pada definisi yang lain Anwar Arifin (1998:4) ,”ilmu komunikasi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari secara sistematis segala segi pernyataan antara manusia “. Menurut T.Hani Handoko (1995:272) ,”komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang keorang lain. Perpindahan tersebut melibatkan lebih dari sekedar kata-kata yang digunakan dalam percakapan tetapi juga ekspresi wajah , intonasi , titik putus vokal dan sebagainya “.

Selanjutnya disampaikan pula komunikasi adalah suatu proses dengan mana orang-orang bermaksud memberikan pengertian-pengertian melalui pengiriman berita secara simbolis dapat menghubungkan para anggota berbagai satuan organisasi yang berbeda dan bidang yang berbeda pula (rantai pertukaran informasi)” .

Dari konsep-konsep diatas , maka komunikasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia atau kelompok manusia yang berada didunia manapun dan kapanpun , antara pihak komunikator dan komunikan sehingga pihak komunikan terjadi arus informasi yang akan berpengaruh terhadap sikap dan tingkah laku pihak komunikan sebagaimana dimaksud oleh pihak komunikator .

Jika dikaitkan dengan komunikasi politik yang merupakan salah satu fungsi dari partai politik , oleh Mirriam Budiarjo (1978:163):

komunikasi politik adalah penyaluran aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpang siuran pendapat dalam masyarakat berkurang . Hal ini menimbulkan adanya proses

penggabungan kepentingan (interest agregation) dan perumusan kepentingan (interest articulation) dalam bentuk usulan kebijaksanaan sebagai bahan masukan untuk pembuatan kebijakan publik (public policy) . Kemudian public policy itu diperbincangkan dan disebarluaskan kepada masyarakat .

Arbi Sanit (1998:74).” komunikasi politik adalah pertukaran informasi yang berlangsung didalam segala bentuk interaksi politik , maka fungsinya tentunya adalah mendukung proses politik dalam merumuskan atau mengolah hasilnya “ Komunikasi politik oleh H.Rudini dalam Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun , ed (1993:3) “adalah penyaluran aspirasi dan kepentingan politik rakyat yang menjadi input sistem politik dan pada waktu yang sama ia juga menyalurkan kebijakan yang diambil atau output sistem politik itu “. Menurut Alvian dalam Herman Ibrahim dan Faisal Siagian (1999:25) “komunikasi politik adalah suatu proses dengan mana pesan-pesan politik berupa protes, tuntutan dan dukungan (aspirasi dan kepentingan) diarahkan kepada sistem politik . Sehingga akan mempersambungkan semua bagian dari sistem politik (masa lalu dan masa kini) , dengan demikian aspirasi dan kepentingan dikonversikan menjadi berbagai kebijaksanaan . Jika komunikasi berjalan lancar wajar dan sehat , maka sistem politik itu akan mencapai tingkat kualitas responsif yang tinggi terhadap perkembangan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta tuntutan perubahan jaman.”

4.2. Fungsi Komunikasi

Komunikasi yang dijalankan berbagai individu atau sekelompok orang dalam suatu organisasi mencerminkan latar belakang pendidikan dan partisipasi politik atau

yang lainnya . Menurut Stephen P. Robbins (1996:5) fungsi komunikasi adalah sebagai berikut :

- a. Kendali , yaitu bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dalam beberapa cara .
- b. Motivasi , yaitu membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada karyawan apa yang harus dilakukan , bagaimana mereka bekerja dengan baik dan apa yang dapat dikerjakan untuk membuat kinerja jika itu dibawah standar .
- c. Pengungkapan emosional , yaitu mekanisme fondamental dengan mana anggota-anggota menunjukkan kekecewaan dan rasa puas .
- d. Informasi , yaitu memberikan informasi yang diperlukan individu dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan meneruskan data dan mengenali serta menilai data-data alternatif .

Raymond V . Lesikar dalam T. Hani Handoko (1995:227) bahwa efektifitas komunikasi organisasi dipengaruhi :

- a. Saluran komunikasi formal
- b. Struktur wewenang organisasi mempunyai pengaruh yang sama terhadap efektifitas organisasi .
- c. Spesialis jabatan yang mempermudah komunikasi dalam kelompok-kelompok yang berbeda .
- d. Pemilikan informasi bahwa individu-individu mempunyai informasi khusus dan pengetahuan tentang pekerjaan mereka .

Dalam American Management Association (AMA) sepuluh pedoman komunikasi yang baik :

1. Cari kejelasan gagasan terlebih dahulu
2. Teliti tujuan komunikasi
3. Pertimbangkan keadaan fisik manusia secara keseluruhan
4. Konsultasikan dengan pihak lain bila perlu dalam perencanaan komunikasi
5. Perhatikan tekanan nada dan ekspresi lainnya sesuai isi dasar berita selama komunikasi
6. Ambil kesempatan , bila timbul untuk mendapatkan segala sesuatu yang membantu atau umpan balik
7. Ikuti lebih lanjut komunikasi yang dilakukan
8. Perhatikan konsistensi komunikasi
9. Tindakan atau perbuatan harus mendorong komunikasi
10. Jadilah pendengar yang baik , berkomunikasi bukan hanya untuk dimengerti tetapi untuk mengerti

Dengan menjalankan konsep tersebut , maka akan meningkatkan efektifitas komunikasi .Karena komunikator akan dapat menyampaikan komunikasi secara tepat kepada komunikan . Jika dikaitkan dengan komunikasi politik , Aiko Kurosawa dalam buku Nico L.Kana dkk ,ed (2001:7) , bahwa perubahan politik didlm masyarakat desa , ada empat macam saluran arus informasi yang penting :

- a. Informasi dari pemerintah melalui sistem birokrasi pemerintah tingkat nasional sampai dengan tingkat bawah

- b. Jaringan informasi sosial yang aktif didlm masyarakat desa .
- c. Media massa
- d. Pendidikan yaitu untuk mempermudah dalam mendapatkan informasi .

H. Rudini dalam Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun , ed (1993:7)ada empat hal yang harus diperhatikan diera tinggal landas dalam rangka mengembangkan komunikasi politik:

- a. Harus integral dengan proses pendidikan politik dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila
- b. Harus dikaitkan dengan pemupukan partisipasi politik dan kontrol sosial masyarakat
- c. Harus dapat menyehatkan segenap kelembagaan politik , supra stuktur maupun infra struktur dalam sistem politik Indonesia agar lebih berfungsi sesuai ketentuan undang-undang
- d. Harus mampu menjawab tantangan atas meningkatnya proses globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Menurut Mochtar Pabottingi dalam Maswadi Rauf , ed (1993:65) ada tiga pendekatan yang harus sekaligus dilakukan jika ingin menciptakan komunikasi politik yang dewasa ;

- a. Harus berpikir secara multi paradigma dalam segala aspek kehidupan
- b. Harus menyadari bahwa ada ruang-ruang permasalahan politik dimana perbedaan pandangan akan selalu ada

c. harus saling memandang tanpa finalitas penilaian , karena akan merupakan arogansi mengingkari keterbatasan manusia .

Dari beberapa konsep diatas bahwa fungsi komunikasi politik akan efektif sampai kepada tujuan , jika dari komunikator (elite politik dari suatu partai politik) saat berkampanye kepada komunikan (massa pendukungnya) selalu memperhatikan prinsip-prinsip komunikasi yang baik, sehingga seminimal mungkin pada waktu kampanye untuk memperebutkan dukungan massa dapat dihindarkan terjadinya konflik (kekerasan) .

5.1. Partisipasi Politik

Secara etimologis partisipasi berarti ikut ambil bagian atau ikut serta . Menurut Keith Davis “partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan emosi orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagai tanggung jawab terhadap pencapaian tujuan itu” (Davis , 1990:17) . Selanjutnya Janabrata Bhrratta Charya mendefinisikan.” partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama . Keterlibatan kelompok atau masyarakat sebagai salah satu kesatuan dapat disebut partisipasi kolektif , sedangkan keterlibatan individual dalam kegiatan kelompok disebut partisipasi individual” (dalam Talizuduhu Ndraha , 1990:21) .Oleh Bintoro TjokroAmijoyo (1974;255) disampaikan , “bahwa partisipasi adalah terlibat dan tergeraknya seluruh masyarakat dalam proses pembangunan berencana sesuai dengan

arah dan strategi yang telah ditetapkan dalam suatu bentuk partisipasi dalam sistem politik “. Sementara Dwight V. King (Dalam Raharjo ,1982 : 78) mendefinisikan,bahwa ”Partisipasi adalah keikutsertaan suatu kelompok masyarakat dalam program pemerintah” .

Dari konsep-konsep diatas terkandung pengertian bahwa partisipasi tidak hanya keterlibatan dalam, menyumbangkan kemampuan , baik secara fisik ataupun tenaga , serta harta dengan rasa penuh tanggung jawab saja melainkan juga diawali dengan keterlibatan sikap mental , perasaan serta pikiran setiap orang atau kelompok .

Gold Smith dan Bhestay dalam Sutrisno (1987:28) “bahwa partisipasi masyarakat dapat muncul dengan syarat-syarat tertentu :

- a. Partisipasi dilaksanakan oleh orang yang sudah dikenal atau sudah ada diantara masyarakat yang bersangkutan .
- b. Partisipasi memberi manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan .
- c. Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi dapat t memenuhi kebutuhan
- d. Dalam proses partisipasi terjamin adanya kontrol dari masyarakat “.

Partisipasi politik sebagaimana disampaikan oleh Mirriam Budiarjo (1998:1) ,bahwa“Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik , yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*)” .

Menurut Harbert Mc. Closky dalam Mirriam Budiarjo (1998:2), “partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalua mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung dan tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum” . Norman H. Nie dan Sidney Verba (1998:2) ,” partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil mereka “. Sementara itu Samuel P. Huntington dan Joan M Nilson (1998 :8) , “partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah . Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif , terorganisir atau seponan , mantap atau seporadis , secara damai atau kekerasan , legal atau ilegal , efektif atau tidak efektif” .

Dari konsep-konsep diatas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh partisipan politik adalah bertujuan mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah (*public policy*) , yaitu usaha untuk mempengaruhi alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat . Jika dinegara Indonesia , kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat . Maka ketika terjadi proses pembuatan kebijakan , partisipasi politik dari masyarakat “*grass roots*” tidak dapat terlibat secara langsung . Jadi partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang sah oleh rakyat .

5.2. Jenis Partisipasi Politik

Keterlibatan anggota masyarakat dalam politik (partisipasi politik) ,oleh David F. Roth dan Frank L. Wilson dalam Mirram Budiarjo (1998:7) disampaikan,” bahwa partisipasi politik dibedakan :

- a). Aktivis , jika menyimpang maka akan jadi pembunuh politik , pembajak dan teroris. Tetapi jika tidak menyimpang maka dilakukan oleh pejabat umum , pejabat partai sepenuh waktu , pimpinan kelompok kepentingan .
- b). Partisipan , yaitu petugas kampanye , aktif dalam partai atau kelompok kepentingan serta aktif dalam proyek-proyek sosial .
- c). Pengamat , yaitu aktif menghadiri rapat umum , anggota kelompok kepentingan , usaha meyakinkan orang , memberikan suara dalam pemilu , mendiskusikan masalah-masalah politik serta memperhatikan perkembangan politik .
- d). Orang yang apolitis .”

Samuel P.Huntington dalam Mirriam Budiarjo(1998:33) disampaikan,” bahwa peranan partisipasi politik dalam suatu masyarakat merupakan suatu fungsi dari keseluruhan strategi pembangunan , jika memang telah ada yang ditentukan oleh pimpinan dari masyarakat itu . Selanjutnya disampaikan bahwa partisipasi politik dapat digambarkan dengan model pembangunan yang liberal dengan asumsi bahwa sebab musababnya ketimpangan sosial ekonomi , kekerasan politik dan kurangnya partisipasi politik yang demokratis terletak dalam keterbelakangan sosial ekonomis dari suatu masyarakat .”

Adapun tahap partisipasi politik disebabkan :

- a). Perluasan partisipasi politik bagi golongan menengah di daerah kota-kota
- b). Perluasan partisipasi yang mencakup golongan rendah di daerah kota dan di daerah pedesaan .

Menurut Richard Tanter dan Kenneth Young (1993:14) disampaikan, “bahwa analisa struktural atas kelas menengah Indonesia setidaknya-ditidaknya diarahkan ke tempat arah sekaligus dari fokus urbannya :

- a. Ke atas, ke arah perekonomian global , melalui perubahan-perubahan di tingkat negara militer-rentenir.
- b. Ke bawah , melalui pemerintahan provinsial dan jaringan pasar ke kota-kota kabupaten dan daerah pedesaan
- c. Ke samping , kedlm keragaman mode produksi yang berbeda-beda secara regional , yang terartikulasi secara tidak merata dalam dinamika sentral akumulasi kapital yang di paksakan secara global .
- d. Ke dalam, dunia- dalam pembentukan identitas laki-laki dan wanita di lingkungan rumah tangga kelas menengah dengan situasi dan orientasinya yang berbeda-beda , identitas-identitas yang sangat vital bagi reproduksi struktur-struktur konsumsi dan produksi .”

Oleh Abdurrahman Wahid dalam Ariel Haryanto,ed (1993;20) disampaikan ,“bahwa kelas menengah Islam dapat diidentifikasi , yang berada dipedesaan , pada petani hanya dan pedagang sedang di perkotaan pada pengusaha batik , rokok

kretek , kerajian kulit , perak dan emas . Watak pengusaha dari kelas menengah Islam ini sangat jelas bertentangan dengan kelas pengusaha tradisional asli hampir disegala hal .” Para kelas menengah Islam ini dimasa lalu telah gagal membentuk negara Islam , untuk itu perlu ditetapkan dua strategi utama untuk mencapai tujuan tersebut :

- a. Mengidealisir Islam sebagai satu-satunya sistem sosial yang mampu memelihara demokrasi seperti , kesetiaan pada hukum dan keadilan ekonomi didalam kerangka nasional uuntuk terciptanya masyarakat demokratis .
- b. Suatu faktor komplementer diantara spektrum luas faktor-faktor lain dalam kehidupan bangsa .

Sementara Aswab Mahasin dalam Ariel Heryanto (1993;152) , disampaikan ,”adanya transformasi dari salah satu sektor kelas menengah khusus yang penting yaitu kelas menengah santri” .

Dari konsep-konsep diatas terdapat transformasi partisipasi politik dari kelas atau ke kelas menengah , jika kelas menengah berhasil dalam partisipasi politiknya maka akan menjadi elit partai politik , dan menjadi aktifis dalam suatu partai politik sehingga akan dapat memengaruhi perumusan kebijakan publik baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya . Akan tetapi partisipasi politik dalam efforia politik dewasa ini berwujud efforia kekerasan dan telah melampaui batas-batas realitas , dimana kejahatan dan kriminalitas telah demikian canggih dan mencapai tingkat yang sempurna . Artinya kejahatan dengan menggunakan kekerasan telah menjdai satu wacana yang direncanakan , diorganisir , dikontrol secara awal kekerasan hadir secara produksi yang memicu tindak kekerasan , kemudian implikasi

kata-kata libas atau libas memformat menjadi kekerasan baru yang kemudian dilembagakan dalam kehadiran aparat keamanan dan kepolisian.

Di era modernisasi ini , yang mempengaruhi proses bersegi jamak dan melibatkan semua pikiran dan aktifitas manusia. Dimana aspek modernisasi itu meliputi beberapa aspek. Oleh Daniel Lenner dalam Samuel P Huntington (1983:52) , disebutkan “ aspek organisasi, industrialisasi, sekulerisasi, demokratisasi, pendidikan dan peran serta media massa tidak berlangsung secara terpisah dan serampangan dan aspek- aspek tersebut berlangsung dalam keterkaitan secara utuh tidak secara terpisah- pisah.” Sementara itu Dan Nimmo , menyebutkan “ ada tiga hal partisipasi politik :

- a. Gaya partisipasi ,yang mengacu kepada baik apa dilakukan maupun bagaimana ia melakukannya.
- b. Motif partisipasi politik, yaitu berbagai faktor yang meningkatkan atau menekan partisipasi politik.
- c. Konsekwensi partisipasi politik , yaitu pembahasan partisipasi politik yang dipikirkan dan interpretatif dibandingkan dengan jenis yang kurang dipikirkan dan lebih tanpa di sadari menimbulkan pertanyaan tentang apa konsekwensi, partisipasi bagi peran seseorang dalam politik pada umumnya” .

Selanjutnya disampaikan ada dua tipe partisipasi politik :

- a. Partisipasi dalam pemilu, yaitu tipe partisipasi rakyat yang dipublikasikan dan diteliti paling luas dan terdapat kontinum kemungkinan tindakan pemilihan dari

yang paling mudah dilaksanakan sampai yang paling sukar dalam penggunaan waktu, uang dan energi.

- b. Partisipasi bukan dalam pemilu , yaitu meliputi segala kegiatan politik yang melibatkan peran serta orang pada massa dan diantara tahun- tahun pemilihan, yang sedikit sangkut pautnya dengan kampanye politik, seperti penggunaan opini politik, tetap mengikuti peristiwa politik, aktif dalam organisasi kepentingan umum dan organisasi politik serta menghubungi pejabat- pejabat pemerintah .

Konsep- konsep di atas menunjukkan bahwa partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa aspek ,dimana aspek tersebut akan mempengaruhi tipe partisipasi politik mereka, seperti dalam kampanye yang melibatkan penggunaan waktu, uang dan energi . Kampanye politik yang dilakukan oleh 48 partai politik sebagai kontestan pemilu 1999 sebagai wujud partisipasi politik dan salah satu titik rawan dari dalam rangkaian proses pemilu sangat dinanti dan diminati masyarakat, karena kemungkinan besar akan diwarnai gejolak politik dan ketegangan antar organisasi parpol satu dengan yang lain .

Menurut Arnold Steinberg dalam Herman Ibrahim dan Faisal Siagian (1999: 8) “kampanye politik adalah suatu usaha yang terkelola , terorganisir untuk mengikhtiyarkan orang dicalonkan, memilih, di pilih atau di pilih kembali dalm suatu jabatan resmi. “ Sementara itu Karl W. Deutsh dalam buku yang sama ,”menyebutkan bahwa kampanye politik merupakan suatu bagian yang inharen dalam pemilu .”

Oleh RA Santoso Sastroputra dalam Herman Ibrahim(1999: 12), disampaikan “bahwa kampanye dalam ilmu komunikasi dimasukkan dalam propaganda politik, karena keduanya dicirikan :

- a. Persuatif, yaitu penggunaan cara- cara non kekerasan dalam mencapai tujuan yakni perubahan sikap, pendapat dan tingkah laku mereka yang menjadi sasaran proses komunikasi tersebut.
- b. Agitasi adalah lawan- lawan dari kampanye yang didalamnya terkandung violence, sensasi dan cara- cara koersif.”

Tertib suatu negara dapat diidentifikasi dari pelebagaan politik dalam hubungannya dg partisipasi politik :

- a. Sistem politik dengan institusionalisasi politik yang rendah dan partisipasi politik yang tinggi adalah sistem dimana kekuatan sosial menggunakan cara mereka sendiri dalam beraksi secara langsung di tengah- tengah arena politik dan disebut negara pretorian.
- b. Sistem politik dengan ratio pelebagaan politik dan partisipasi yang cukup tinggi disebut masyarakat berbudaya atau negara kerakyatan (*Civic Polities*).

Konsep diatas menunjukkan bahwa kampanye politik akan menimbulkan konsekwensi logis, yaitu adanya perubahan sikap dan perilaku yang wajar serta sikap perilaku yang kasar dan penuh kekerasan. Jika dikaitkan dengan konflik politik antara PPP dan PKB di desa Dongos , kecamatan Kedung , kabupaten Jepara maka tampak bahwa kampanye Deklarasi PKB ranting Dongos dapat menimbulkan tindak kekerasan politik.

B. Hubungan Konsep Antar Variabel

1. Pendidikan Dengan Persepsi Efektifitas Penanganan Konflik Politik (X 1 dengan Y)

Pendidikan sebagai salah satu variabel yang berhubungan dengan penanganan konflik politik PPP dan PKB , maka pendidikan sebagai upaya utk menumbuhkan sikap intelektual dalam berpikir , menilai dan mempertimbangkan segala sesuatu secara rasional. Dengan adanya pendidikan akan dapat mempengaruhi dan merubah pola pikir manusia. Melalui jalur pendidikan ini seseorang akan mudah mendapatkan informasi , pengetahuan dan inovasi baru yang bermanfaat bagi dirinya . Pendidikan menjadikan individu dapat menyelesaikan permasalahannya, sebagaimana disampaikan Lynd (1948 : 236- 237) , yaitu :

“ Proses bimbingan sosial masyarakat adalah suatu proses pembelajaran dan pendidikan , karena terjadinya suatu kecenderungan dalam diri manusia utk mengembangkan kebudayaan melalui pendidikan . Karena pendidikan ini menjadikan individu dapat berpengetahuan lebih baik , sehingga seseorang akan mampu menyelesaikan permasalahannya secara bertahap. “

Dari hubungan konsep tampak, bahwa dengan pendidikan akan mempengaruhi tingkat pemahaman dan pengetahuan mereka dalam penanganan konflik politik PPP dan PKB , baik yang berwujud perjanjian , penyelesaian secara damai maupun secara

hukum. Karena dengan adanya pendidikan seseorang akan mendapatkan informasi, pengetahuan dan hal-hal lain yang mengajarkan berfikir secara rasional.

Dalam kaitannya dengan penanganan konflik politik PPP dan PKB, ketika konflik tersebut ditangani utk dicari jalan penyelesaiannya maka pihak-pihak yang terlibat memerlukan seperangkat pengetahuan yang berkaitan dengan hal itu. Tingkat pendidikan seseorang sangat berhubungan atas lancar tidaknya penanganan konflik tersebut. Begitu juga sedikit banyaknya pengetahuan politik maupun pengetahuan lainnya akan dapat memperlancar jalannya penanganan konflik politik PPP dan PKB di Desa Dongos, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara.

2. Hubungan Komunikasi Dengan Persepsi Efektifitas Penanganan Konflik Politik PPP Dan PKB

Untuk mengetahui hubungan antara variabel komunikasi dengan variabel konflik politik PPP dan PKB, perlu dikemukakan pendapat Kortene dan Syahrir (1988: 254-255), bahwa dalam suatu kegiatan pembangunan, belajar bersama paling efektif bila dilaksanakan melalui dialog yang melibatkan hubungan yang saling mempercayai antara dua pihak atau lebih. Karena dialog merupakan proses komunikasi yang berkembang dalam kelompok kecil antara tujuh sampai dengan sembilan orang melalui bentuk kelompok kecil sebagai bentuk dimensi sosial dimana setiap anggota memperoleh andil untuk ikut aktif mengambil keputusan. Melalui kelompok ini akan dapat diminimalkan segala perbedaan. Pada saat dimana pengetahuan kedua belah pihak yang satu dengan yang lain akan kembali, perintah

kerjapun akan berubah sehingga kesetiakawanan dan solidaritas sosial akan tumbuh untuk mengadakan kerjasama yang bersifat akomodatif terhadap pihak lain.

Dari maksud di atas dapat dijelaskan bahwa masyarakat akan ikut melancarkan keberhasilan penanganan konflik secara bertanggungjawab, karena adanya kesadaran untuk berdialog dan berkomunikasi untuk menyamakan persepsi dan berkomunikasi untuk menyamakan persepsi dan meminimalkan perbedaan dalam penanganan konflik PPP dan PKB tersebut. Kesadaran dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat untuk ikut terlibat dalam penanganan konflik politik itu dapat dilihat dengan jelas antara partisipasi masyarakat dalam membantu menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik dan kekeluargaan, baik melalui gagasan atau aktifitas yang pada akhirnya masyarakat secara sadar terlibat secara nyata dalam partisipasi politiknya.

3. Hubungan Partisipasi Politik Dengan Persepsi Efektifitas Penanganan Konflik Politik PPP dan PKB

Masyarakat akan secara sadar terlibat dalam penanganan konflik politik PPP dan PKB jika haknya dalam berpartisipasi politik diperhatikan. Agar masyarakat mau ikut berpartisipasi dalam penanganan konflik tersebut, maka harus diketahui pula cara- cara berpartisipasi masyarakat dalam berpolitik antara lain : aktifis, partisipan, pengamat serta apolitis (David F . Rath dan Frank L Wilson dalam Miriam Budiarjo,1998 : 7). Selanjutnya Mirriam Budiarjo (1998: 1) , partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam

kehidupan berpolitik , yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.

Konsep di atas menunjukkan hubungan partisipasi politik masyarakat antara lain dalam mempengaruhi kebijakan publik dalam penanganan konflik politik PPP dan PKB . Selanjutnya partisipasi politik itu harus dapat dikendalikan dengan baik sehingga dapat meminimalkan terjadinya konflik antar partai, golongan dan sebagainya. Hal ini dapat dilakukan melalui pembinaan secara ketat kepada masyarakat agar keterlibatannya dalam berpolitik secara sadar dan rasional bukan irrasional dan menimbulkan tindakan kekerasan.

4. Hubungan Variabel Pendidikan, Komunikasi, Dan Partisipasi Politik Dengan Persepsi Efektifitas Penanganan Konflik Politik PPP Dan PKB .

Seperangkat pengetahuan , informasi dan kecakapan yang diperoleh seseorang melalui pendidikan formal yang lebih tinggi akan dapat merubah pemikiran seseorang menjadi lebih rasional dalam bersikap dan mempertimbangkan kualitas partisipasi politiknya agar dapat melancarkan pelaksanaan penanganan konflik politik PPP dan PKB tersebut . Untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi tentunya tidak hanya bergantung pada kemampuan intelektual saja akan tetapi

juga bergantung pada aspek komunikasi atau arus informasi pengetahuan. Dan biasanya orang yang memiliki informasi dan pengetahuan yang tinggi akan berhubungan serta dalam wujud dan kualitas partisipasinya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan informasi yang diperoleh dalam berkomunikasi lebih banyak dan lebih luas, serta pengetahuan dan pengetahuan yang banyak itu sangat berguna utk menentukan kualitas partisipasi politiknya sehingga penanganan konflik politik PPP dan PKB dapat berjalan tanpa hambatan.

C. Pembahasan Penelitian Yang Relevan.

Dalam meneliti Persepsi Efektifitas Penanganan Konflik Politik PPP dan PKB di Desa Dongos, Kecamatan Kedung , Kabupaten Jepara, penulis melihat sebagaimana penelitian sejenis:

- a. Jim Schiller (peneliti dari Australia, tahun 1999) dalam Nico L. Kana,ed, *Dinamika Politik Lokal Di Indonesia, The 1999 Election And Civil Society In Jepara.*

Bahwa kerusuhan yang terjadi di desa Dongos menjelang Pemilu 1999 menimbulkan banyak korban terbunuh, luka- luka berat, pembakaran rumah dan terjadinya peretentangan antar masyarakat. Jadi reformasi yang terjadi di Jepara banyak menimbulkan hal- hal yang negatif , sehingga banyak sekali anggapan bahwa Jepara identik dengan kerusuhan dan kekacauan. Meskipun Pemilu di Jepara , PPP

menang mutlak (perkiraan sebelumnya PPP Dan PKB bersaing ketat , tetapi PKB bahkan kalah dalam mendapatkan suara dengan PDI Perjuangan).

Kemenangan PPP dalam Pemilu 1999 dari pihak PKB dituduh karena adanya kekerasan yang cukup berperan disamping memang lebih siap utk mengikuti pemilu. Pada sisi lain PKB harus membuat organisasi baru dan pemimpin PKB menagtakan bahwa masyarakat Jepara curiga terhadap organisasi baru tersebut . Sebagai organisasi baru , maka butuh waktu yang agak lama utk membuat mereka percaya . Kalau PPP tahu bahwa kemenangannya karena pola masyarakat Jepara yang keras, kami menyesuaikan diri dengan pola itu.

Respon aktifis – aktifis lebih kecewa , mereka bilang bahwa PPP menang dengan cara *dulu* , PPP menang dengan *kekerasan* . Respon mereka negatif dan mereka lebih khawatir pada masa depan. Sebagai reformis mereka lebih tidak sabar dsaripada orang- orang lain. Menurut Jim Schiller , peranan masyarakat dalam mendirikan organisasi baru seperti “ parliament watch “ justru akan berusaha mendorong kompetisi supaya memakai cara- cara yang lebih fleksibel. Dan sesuai kerusuhan Dongos memang berpengaruh terhadap kegiatan PKB dan kegiatannya agak menurun. Karena massa kedua partai adalah sama- sama orang – oarang Islam dan anggota Nahdlotul Ulama, maka sedikitit banyak berpenagruh terhadap persainagn massa pendukungnya antara kedua partai politik tersebut.

b. Konflik politik antara PPP dan PKB di kabupaten Pekalongan yang dilakukan penelitian oleh Yos Rosyidi tahun 1999 tentang Fenomena Konflik PPP dan PKB di Pekalongan .

Konflik politik antara pendukung kedua OPP yang berbasis Islam, karena adanya provokasi dari masing- masing pendukung partai dalam pengajian dan kampanye partai- partai tersebut . Situasi ini menimbulkan emosi dan tindakan destruktif dari masing- masing partai. Sehingga setiap ada Deklarasi PKB pasti kacau, karena orang- orang PKB menggunakan fasilitas NU . sehingga memicu kejengkelan orang- oang PPP terhadap PKB terutama di Desa Buaran, Pekalongan.

Adanya sikap fanatisme yang berlebihan dari masing- masing partai yang mengarah ketindakan anarkis dan destruktif itu menimbulkan suasana mencekam , sehingga rumah – rumah dihancurkan dan pertengkaran fisik yang sengit tak dapat ditanggulangi serta menimbulkan konflik yang lebih tajam. Ekse dari konflik tersebut menimbulkan konflik PPP dan NU disatu pihak dan PPP – PKB dilain pihak.

C. Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran, pada saat fenomena dikenal dan sebagai dasar kerja serta panduan dalam verifikasi . Sehingga hipotesis adalah dugaan sementara dari hubungan variabel yang kompleks . Maka hipotesa penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hipotesis Verbal

Hipotesa Minor :

- “Ada hubungan positif antara pendidikan dengan persepsi efektifitas penanganan konflik politik Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa , semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi persepsi efektifitas

penanganan konflik politik , tetapi semakin rendah pendidikan semakin rendah persepsi efektifitas penanganan konflik politik PPP dan PKB. ”

- “Ada hubungan positif antara komunikasi dengan persepsi efektifitas penanganan konflik politik Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa , semakin tinggi tingkat komunikasi maka tinggi persepsi efektifitas penanganan konflik politik , tetapi semakin rendah komunikasi semakin rendah persepsi efektifitas penanganan konflik politik PPP dan PKB. ”
- “Ada hubungan positif antara partisipasi politik dengan persepsi efektifitas penanganan konflik politik Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa , semakin tinggi tingkat partisipasi politik maka semakin tinggi persepsi efektifitas penanganan konflik politik , tetapi semakin rendah partisipasi politik semakin rendah persepsi efektifitas penanganan konflik politik PPP dan PKB. ”

Hipotesa Mayor :

“Ada hubungan positif antara pendidikan, komunikasi dan partisipasi politik dengan persepsi efektifitas penanganan konflik politik Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa , semakin tinggi tingkat pendidikan, komunikasi, dan partisipasi politik maka semakin tinggi persepsi efektifitas penanganan konflik politik tetapi semakin rendah tingkat pendidikan, komunikasi , dan partisipasi politik maka semakin rendah persepsi efektifitas penanganan konflik politik Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa.(PPP dan PKB)”

Rumus dari hipotesis diatas adalah:

$$PK = f(P + K + PP)$$

Keterangan :

PK = Persepsi Efektifitas Penanganan Konflik Politik, f = Fungsi

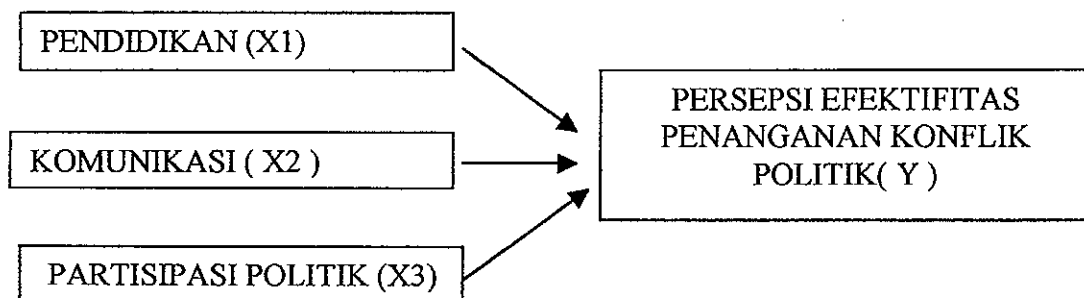
P = Pendidikan

K = Komunikasi

PP = Partisipasi Politik

2. Hipotesa dalam dalam model geometrik sebagai berikut :

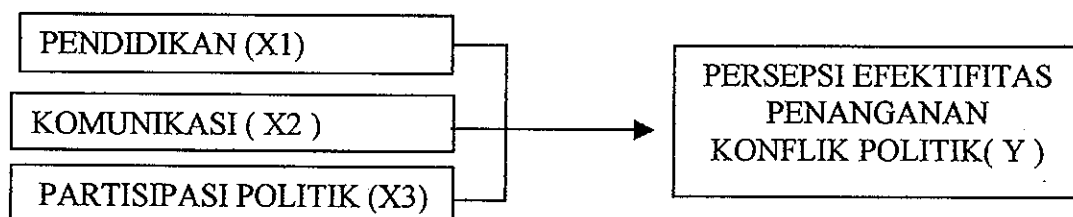
a. Hipotesa Minor



Keterangan :

Variabel Bebas (X1, X2, X3) berhubungan dengan variabel terikat (Y).

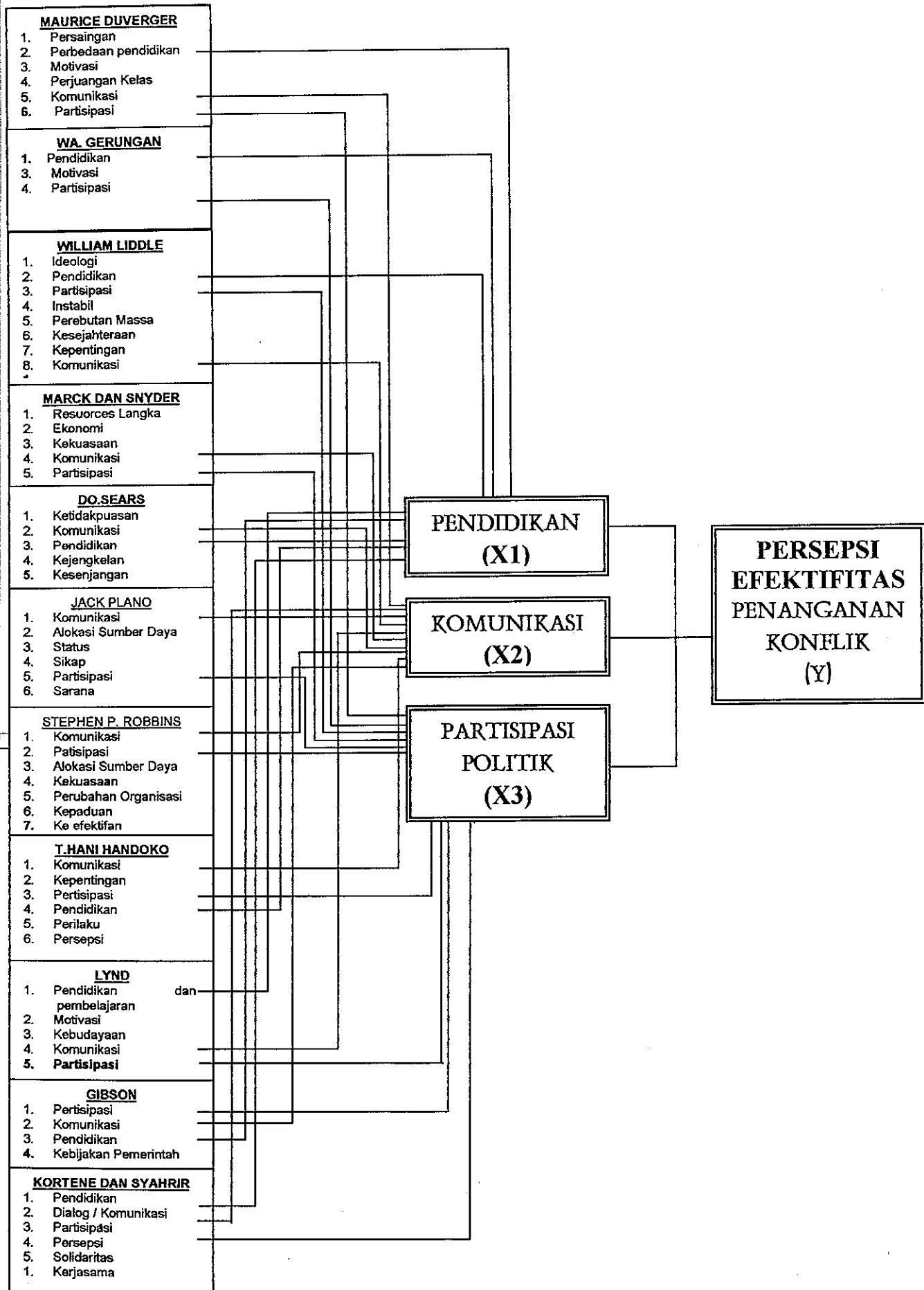
b.Hipotesa Mayor :



Keterangan :

Variabel Bebas (X1, X2, X3) berhubungan langsung variabel terikat (Y)

KERANGKA PIKIR YANG MENDASARI PENELITIAN PERSEPSI EFEKTIFITAS PENANGANAN KONFLIK POLITIK



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian/ Perspektif Penelitian

Metode penelitian merupakan tata cara atau jalan untuk memahami obyek yang menjadi sasaran penelitian ilmu yang bersangkutan, sedang arti penelitian secara umum adalah suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan cara- cara yang bersifat keilmuan . Menurut definisi dari LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dalam Kuncoroningrat(1997: 6), “ penelitian ialah segala usaha atau aktifitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk menyimpulkan, menjelaskan, menganalisa dan menafsirkan fakta- fakta alam, masyarakat , kelakuan dari rohani manusia guna memahami prinsi- prinsip penelitian, pengetahuan dan metode – metode baru dalam usaha menanggapi hal- hal tersebut”. Dengan demikian maka setiap karya ilmiah harus berdasarkan pada penggunaan metode penelitian tertentu sehingga sesuai dengan tujuan penelitian .

B. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif analitis dan eksplanotoris untuk analisa kuantitatif, sedangkan dalam analisa kualitatif digunakan untuk tipe penelitian eksploratoris . Deskriptif adalah suatu penelitian yang menitikberatkan pada penggambaran akan sifat individu, keadaan atau gejala serta frekwensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam

masyarakat. Sedangkan menurut Isywara (1990: 46) , “ pelaksanaan pengertian yang partinen, yakni sebagaimana kenyataan itu yang sesungguhnya ada, segala usaha dimulai dengan lukisan, karena metode pelaksanaan merupakan pencatatan dari masalah- masalah yang diselidiki.

Kaitannya dengan Melly G. Tan (1977: 47) , “penelitian yang bersifat deskriptif, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu , keadaan atau kelompok tertebtu atau untuk menerangkan dan menentukan frekwensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat. Dalam hal ini mungkin belum tergantung sedikit banyaknya pengetahuan masalah yangbersangkutan . “

Tipe penelitian eksplonatoris berarti menerangkan hubungan antar variabel dalam suatu penelitian . Sedangkan tipe penelitian eksploratoris yang dianalisa secara kualitatif bertujuan menggali informasi, data serta keterangan berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Dengan memperhatikan fokus dan lokus penelitian. Dalam penelitian ini yang kami teliti adalah bagaimana hubungan pendidikan , komunikasi dan partisipasi politik dengan persepsi efektifitas penanganan konflik politik Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa di Desa Dongos , Kecamatan Kedung , Kabupaten Jepara.

C. Ruang Lingkup/ Fokus Penelitian

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada konteks hubungan pendidikan , komunikasi dan partisipasi politik terhadap persepsi efektifitas penanganan konflik

politik PPP dan PKB , bagaimana efektifitas proses penanganannya dan outputnya yang akan dijelaskan dalam analisa kuantitatif . Sedang selain aspek tersebut jika ditemukan faktor lain dilapangan penelitian akan dijabarkan dalam analisa kualitatif .

D. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini agar diperoleh data penelitian yang akurat maka dilakukan penelitian di Desa Dongos, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara .

E. Variabel Penelitian

1. Klasifikasi Variabel

a. Variabel bebas adalah

- Variabel pendidikan
- Variabel Komunikasi
- Variabel Partisipasi Politik

b. Variabel Terikat

Yaitu variabel yang terjadi dalam permasalahan yang diteliti yang merupakan terjadi disebabkan oleh variabel yang lain .

Dalam hal ini yaitu persepsi efektifitas penanganan konflik politik PPP dan PKB di Desa Dongos .

F. Definisi Konseptual

Yaitu definisi dari apa yang di amati , konsep menentukan antara variabel-variabel yang kita ingin tentukan adanya hubungan empirik dan pernyataan tersebut akan di dapatkan definisi untuk menggambarkan fenomena-fenomena melalui variabel tersebut . Adapun definisi konseptual yang akan digunakan adalah :

a Persepsi Efektifitas Penanganan Konflik

Penanganan Konflik adalah pandangan , pendapat , sikap individu atau masyarakat tentang keberhasilan dalam pengaturan ketidaksesuaian atau pertikaian antara dua orang atau lebih atau sekelompok orang dalam suatu proses yang saling berlawanan dalam membagi sumber daya yang terbatas , kegiatan-kegiatan kerja , perbedaan status , tujuan , nilai , dalam menyikapi permasalahan dan perlu dikelola dengan baik agar tidak akan menjadi bahaya laten dan memiliki siklus kekerasan yang tinggi .

b. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu usaha sadar dalam proses membina , mengembangkan kepribadian , sikap , mental dan kemampuan dalam menyikapi permasalahan , melatih dan menggambarkan kearah nilai sikap yang diinginkan (sikap kesetiaan dan ketaatan) melalui pendidikan formal , non formal dan informal dalam hidup berbangsa , bernegara , berpolitik dan beragama.

c. Komunikasi

Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian , penyampaian informasi , gagasan dari seseorang ke orang lain atau kelompok lain yang berlangsung dalam kegiatan berbangsa , bernegara , berpolitik dan beragama untuk mempengaruhi dan merubah sikap , pendapat dan perilaku individu atau kelompok atau masyarakat agar terjadi perubahan individu , perubahan masyarakat serta perubahan sosial .

d. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan sukarela pribadi , dalam proses mempengaruhi pemilihan penguasa , mempengaruhi proses pembuatan keputusan baik secara langsung atau tidak langsung , secara individual atau kolektif , spontan atau tidak spontan , legal atau tidak legal , mantap atau sporadis , secara damai atau kekerasan dalam kehidupan berbangsa, berpolitik dan beragama .

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dari variabel penelitian ini adalah ;

1. Variabel persepsi efektifitas penanganan konflik diukur dari indikator
 - a. Pandangan masyarakat terhadap pertemuan dalam perundingan
 - b. Pandangan masyarakat terhadap kesepakatan dan konsensus
 - c. Pandangan masyarakat terhadap penggunaan tujuan-tujuan yang lebih tinggi
 - d. Pandangan masyarakat terhadap persidangan hukum

- e. Pandangan masyarakat terhadap penumbuhan solidaritas agama
- f. Pandangan masyarakat terhadap pemakaian kekuatan militer
- g. Pandangan masyarakat terhadap status sosial

2. Variabel pendidikan dapat diukur dari indikator-indikator :

- a. Jenis pendidikan (formal, non formal dan in formal) .
- b. Tingkat pendidikan (SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi)
- c. Tingkat keaktifan dalam organisasi pelajar, mahasiswa dan pemuda.
- d. Tingkat keaktifan dalam Lembaga Swadaya Masyarakat

3. Variabel komunikasi dapat diukur dari indikator-indikator :

- a. Jenis komunikasi (media massa) yang sering dipakai
- b. Keaktifan dalam pengajian, kampanye, dan diskusi ilmiah
- c. Adanya perubahan pendapat setelah mengikuti proses komunikasi
- d. Adanya perubahan sikap setelah mengikuti proses komunikasi
- e. Adanya perubahan perilaku setelah mengikuti proses komunikasi

4. Variabel partisipasi politik dapat diukur :

- a. Tingkat keterlibatan dalam partisipasi (langsung atau perwakilan , kelihatan atau tidak, individual atau kolektif, sistematis atau acak , terbuka atau tersembunyi, berkomitmen atau tidak berkomitmen, menimbulkan derita atau kesenangan).
- b. Tingkat pemahaman terhadap partisipasi (sengaja atau tidak , rasional atau emosional , diarahkan dari dalam atau dari luar, berpikir atau tanpa berpikir)

- c. Tingkat kemanfaatan dalam partisipasi (fungsional atau tidak fungsional , bersambung atau terputus , mendukung atau menuntut)
- d. Kualitas dalam partisipasi (aktivis , partisipan , pengamat , apolitis)
 - Aktivis : pejabat , menyuimpang : pembunuh
 - Partisipan : petugas kampanye , aktif dalam partai
 - Pengamat : menghadiri rapat umum , anggota kelompok kepentingan , usaha meyakinkan orang , memberikan suara dalam pemilu , mendiskusikan masalah politik , perhatian pada perkembangan politik .

H. Jenis Dan Sumber Data

Data adalah informasi atau keterangan mengenai variabel-variabel yang diteliti dan telah dikumpulkan oleh peneliti dari obyek penelitian , sehingga setiap penelitian memerlukan data . Pada penelitian ini sumber data yang digunakan ada dua yaitu data primer dan data sekunder .

1 . Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari obyeknya , yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh orang-orang yang menjadi sasaran pertanyaan tersebut atau disebut responden (Bimo Walgito , 1975 : 4) , sedangkan kuesioner menurut Suharsissni Ari Kunto (1990:107) , “ adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden , dalam arti laporan tentang peribadinya atau hal-hal yang diketahui .”

2. Data Skunder

Adalah dengan menggunakan studi literatur kepustakaan , membaca majalah tentang keagamaan dan ulama , jurnal ilmu politik, koran yang membahas sosial politik ,artikel tentang komunikasi ,dan jurnal masalah pendidikan .

Adapun dalam penelitian ini cara lain yang kami gunakan untuk memperoleh informasi yang selengkap-lengkapny adalah dengan :

1. Wawancara adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian mereka . Menurut Kartini Kartono (1990: 51) , “ interview atau wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu sebagai proses tanya jawab lesan dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik “

Dalam wawancara ini yang dipakai wawancara secara bebas dengan bentuk pertanyaan tertutup dan terbuka .

2. Observasi adalah survei terhadap lingkungan yang diteliti . Menurut Harsya Bahtiar dikatakan “pengamatan sebagai cara penelitian yang menuntut dipenuhinya syarat-syarat tertentu yang merupakan jaminan bahwa hasil pengamatan memang sesuai dengan kenyataan yang menjadi sasaran perhatian .
3. Pengamatan yang dilakukan adalah pengamatan terhadap fenomena konflik politik dan penanganan konflik politik PPP dan PKB di desa Dongos Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara .

4. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menulis atau menyalin data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian .

I. Instrumen Penelitian .

Instrumen atau alat bantu yang digunakan dalam pengumpulan data berupa kuesioner dan recording yang ditujukan pada masalah yang dipecahkan . Kuesioner tersebut berupa pertanyaan terbuka dan tertutup.

Dalam pemberian skor atau nilai terhadap jawaban responden , peneliti menskor dari sejumlah jawaban yang berhubungan dengan variabel yang akan diteliti dengan menggunakan skala Likert , lalu responden akan memilih jawaban yang tersedia dan skalanya dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Jawaban yang sangat mendukung dengan skor 4
- b. Jawaban yang mendukung dengan skor 3
- c. Jawaban yang cukup mendukung dengan skor 2
- d. Jawaban yang tidak mendukung dengan skor 1

Kemudian nilai jawaban responden diprosentasikan sebagai berikut :

$$\frac{S}{P \times 4 \times g} \times 100 \%$$

Keterangan :

S = jumlah skor yang dicapai

P = jumlah pernyataan

4 = Skor maksimum

g = jumlah responden

J. Populasi Dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat yang mempunyai hak pilih di desa Dongos, kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Dimana populasi tersebut meliputi sejumlah penduduk, makhluk atau benda yang diselidiki dan setidaknya mempunyai sifat sama. Winarno Surachmad (1975 : 84), “populasi adalah sekelompok subyek baik manusia, nilai-nilai, benda atau peristiwa”. Jumlah penduduk Desa Dongos adalah 5.225 jiwa sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah 2.148 jiwa (penduduk yang mempunyai hak pilih).

Sampel adalah sejumlah penduduk yang diteliti, (Sutrisno Hadi, 1984 : 220). Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi (1989: 33) “bahwa teknik pengambilan sampel secara acak sederhana adalah sebuah sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian atau satuan elementer dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel”. Ada dua cara dalam pengambilan acak sederhana yaitu :

- a. Mengundi unsur penelitian atau satuan elementer dalam populasi.
- b. Mengundi tabel angka acak (random)

Untuk menentukan besarnya sampel agar diperoleh data yang representatif, Ida Bagus Mantra dalam Kerlinger (1987: 12),” bahwa besarnya sampel yang harus diambil untuk mendapatkan data yang representatif, beberapa peneliti mengatakan bahwa besarnya sampel tidak boleh kurang dari 10 % tapi ada juga ahli lain yang menyatakan sampel minimal 5 % dari jumlah satuan elementer dari populasi. Dari pendapat yang bervariasi tersebut maka penulis mengambil sampel 3 %, karena

jumlah hak pilih sebesar 2.148 maka sampel yang kami ambil 3 % dari 2. 148 . Jadi sampel yang diambil sebanyak 70 responden dengan teknik random sampling , dan diharapkan tidak akan mengurangi tingkat representatif sampel dan hasil penelitian .

K. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana digunakan adalah dari data primer dan skunder dan selanjutnya data primer digunakan daftar pertanyaan yang kami lakukan sebagai berikut :

- a. Memberi daftar pertanyaan pada responden.
- b. Responden menjawab, secara tertulis dengan mengisi jawaban- jawaban yang telah tersedia .
- c. Meminta kembali daftar pertanyaan yang sudah dijawab responden

Selanjutnya agar data berbicara , sebab betapapun besarnya jumlah dan tingginya nilai data yang terkumpul sebagai hasil fase pelaksanaan pengumpulan data , apabila tidak disusun dalam suatu organisasi dan diolah menurut sistematik yang baik , maka data itu tidak dapat berbicara. Kemudian data tersebut diolah sebagai berikut :

- a. Editing , yaitu kegiatan memeriksa daftar pertanyaan (kuesioner) kalau terdapat kesalahan pengisian , kekurangan dan ketidaksesuaian data dengan jawaban. Jika ada kekurangan maka akan dapat ditanyakan kembali kepada responden.
- b. Koding, yaitu mengklasifikasikan jawaban- jawaban yang dianggap penting serta memberi kode- kode yang berupa angka- angka dari jawaban tersebut .
- c. Tabulasi, yaitu kegiatan menyajikan data bentuk tabel , kemudian diolah sehingga dapat diambil kesimpulan dan gambaran yang nyata dari data.

L. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis Triangulasi, secara kuantitatif yang digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang penulis ajukan, dengan menggunakan rumus- rumus statistik . Dalam mengolah data sesuai rumus statistik itu , penulis akan menggunakan program SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows . Disamping itu analisa secara kualitatif dengan menggali secara rinci tentang faktor – faktor lain selain dalam variabel- variabel kuantitatif pun dilakukan.

Rumus- rumus yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan analisa data yang bersifat ordinal . Menurut Masri Singarimbun (1989 : 70), “ bahwa ukuran ordinal mengurutkan responden dari tingkatan paling rendah ke paling tinggi, menurut suatu atribut tertentu tanpa ada petunjuk yang jelas tentang berapa jumlah absolut atribut yang dimiliki masing- masing responden dan berapa intervalnya .

❖ Dalam analisa kuantitatif digunakan rumus- rumus statistik

Adapun rumus- rumus statistik yang digunakan adalah :

a. Tabulasi Silang

Adalah metode analisa yang paling sederhana tetapi daya menerangkan yang cukup kuat untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Dalam analisa ini dengan menggunakan distribusi prosentase pada tabel untuk mengumpulkan hubungan antara variabel pendidikan (X_1), dengan variabel persepsi efektifitas penanganan konflik politik PPP dan PKB (Y) , antara variabel komunikasi (X_2), dengan variabel

persepsi efektifitas penanganan konflik politik (Y), dan antara variabel partisipasi politik (X 3) dengan variabel persepsi efektifitas penanganan konflik politik (Y) secara sendiri- sendiri. Dalam hal ini efek variabel X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y , dilihat dengan membandingkan distribusi prosentase pada kategori- kategori variabel X1, X2 dan X3 (Masru Singarimbun, 1989 : 273).

b. Koefisien Korelasi Rank Kendall Tau C

Digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel ordinal dengan jumlah sampel yang besar ($n > 30$).

Rumus :

$$t c = \frac{S}{\frac{1}{2} n^2 (m-1) m}$$

Keterangan :

tc = Koefisien Korelasi Kendall tau c

n = Besarnya sampel

m = frekwensi terkecil dari baris / kolom

S = C- D

C = Berapa kali elemen pertama dalam pasangan itu lebih dari elemen kedua.

D = Jumlah berapa kali elemen pertama mendahului elemen dari setiap pasangan(Gulo, 1983 : 190)

Untuk menguji signifikan tidaknya korelasi yang dihasilkan digunakan t test rumusnya adalah :

$$t = \frac{t \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-t^2}}$$

Dimana , t = hasil koefisien korelasi Kendall , n = besarnya sampel.

Setelah harga t diketahui, maka harga t tersebut lalu dibandingkan dengan harga t tabel .Jika t hitung lebih besar daripada t tabel berarti signifikan. Jika t hitung lebih kecil daripada t tabel berarti tidak signifikan .

c. Koefisien Konkordansi Kendall (W)

Yatu untuk mengetahui atau menggunakan kadar assosiasi antara sejumlah k himpunan dari N obyek.

Rumus yang digunakan adalah :

$$W = \frac{S}{\frac{1}{2} k^2 (N^3 - N) - K \sum \frac{r}{T}}$$

Keterangan :

W = Koefisien Konkordansi Kendall

S = Jumlah kwadrat deviasi dari mean Rj (jumlah ranking keseluruhan)

K = Banyaknya variabel yang diobservasikan (banyaknya ranking penjenjangan)

N = Jumlah sampel

T = jumlah rata- rata untuk semua ranking T , ini merupakan faktor korelasi yang harus dihitung , karena ada observasi berangka sama.

$$T = \frac{(t^3 - t)}{12}$$

Dimana , t = banyaknya observasi dalam suatu kelompok yang memperoleh angka sama untuk suatu ranking tertentu .

12 = angka tetap (konstanta) untuk menguji signifikan tidaknya digunakan koefisien kontinuitas atau chi square , dengan rumus =

$$X^2 = K (N-1) W \text{ atau } X^2 = \frac{S}{1/12 KN (N + 1)}$$

dengan derajat kebebasan (db) = N= 1 (Siegel .1992: 292)

Hasil uji signifikansi ini lalu dibandingkan dengan tabel X 2. Bila hasilnya lebih besar dari harga tabel berarti signifikan , dan jika hasilnya lebih kecil dari harga tabel berarti tidak signifikan .

d. Koefisien Korelasi Rank Partial Kendall (t xy- z)

Yaitu untuk melihat adanya korelasi antara dua variabel yang selalu terdapat kemungkinan bahwa korelasi ini adalah akibat dari assoosiasi antara masing- masing kedua variabel itu, dengan suatu variabel ketiga sebagai variabel kontrol .

Rumus :

$$t_{XY . Z} = \frac{t_{XY} - t_{ZY} . t_{ZX}}{\sqrt{(1-t_{XY}^2)(1-t_{ZX}^2)}}$$

Keterangan :

t_{XY . Z} = Koefisien korelasi ranking partial kendall

t_{XY} , t_{ZY} , t_{ZX} = harga observasi

X, Y, Z = Masing sebagai X 1. X 2 dan Y

❁ Cara Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis yang diajukan , adalah sebagai berikut :

Digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang positif antara variabel bebas dengan variabel terikat , dalam hal ini adalah :

1. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel pendidikan dengan variabel persepsi efektifitas penanganan konflik politik.
2. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel komunikasi dengan variabel persepsi efektifitas penanganan konflik politik.
3. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel partisipasi politik dengan variabel persepsi efektifitas penanganan konflik politik.

❁ Kriteria Penerimaan Hipotesis .

Dalam suatu penelitian , ada dua kemungkinan yaitu menerima atau menolak hipotesis disini ada dua hipotesis nihil (0) yang disimbolkan dengan (H_0) dan hipotesis kerja disimbolkan dengan (H_1). Jika penelitian menerima (H_0) , maka penelitian ini tidak berhasil membuktikan hipotesis yang diajukan (menolak H_1) . Sebaliknya jika hipotesis yang diajukan diterima , maka penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis (menolak H_0) .

Formulasi untuk masing-masing penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :

a. Koefisien korelasi rank Kendall (tau c)

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka hipotesis kerja (H_1) diterima

2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka hipotesis kerja (H_1) ditolak .

Sehubungan dengan hal itu maka yang dilakukan adalah :

- Mencari korelasi Kendall tau c antara variabel pendidikan dengan variabel penanganan konflik politik . Hasilnya kemudian dimasukkan kedalam rumus t untuk mencari rumus signifikansi . Sebaliknya jika $t_{test} < (lebih\ kecil)$ dari t_{tabel} berarti tidak ada korelasi antara variabel pendidikan dengan variabel persepsi efektifitas penanganan konflik politik .
- Mencari korelasi Kendall tau c antara variabel komunikasi dengan variabel persepsi efektifitas penanganan konflik politik . Hasilnya kemudian dimasukkan kedalam rumus t untuk mencari signifikansi . Sebaliknya jika $t_{test} < (lebih\ kecil)$ dari t_{tabel} , berarti tidak ada korelasi antara variabel komunikasi dengan variabel persepsi efektifitas penanganan konflik politik .
- Mencari korelasi Kendall tau c antara variabel partisipasi politik dengan variabel persepsi efektifitas penanganan konflik politik . Hasilnya kemudian dimasukkan kedalam rumus t untuk mencari signifikansi . Sebaliknya jika $t_{test} < (lebih\ kecil)$ dari t_{tabel} , berarti tidak ada korelasi antara variabel partisipasi politik dengan variabel persepsi efektifitas penanganan konflik politik .

b. Koefisien konkordansi Kendall (W)

Untuk menerima atau menolak hipotesis yang dikemukakan, yang harus dilakukan adalah dengan menguji apakah korelasi yang dihasilkan antara dua variabel atau lebih itu signifikan atau tidak. Jika signifikan berarti hipotesa diterima tetapi bila tidak signifikan berarti hipotesa ditolak. Untuk uji signifikansi Koefisien konkordansi Kendall (W) ini tergantung pada besarnya N (sampel).

Disini ada dua macam tabel yang digunakan :

- a. Jika $N < 7$, maka hasilnya dapat langsung dibandingkan dengan tabel pada tingkat signifikansi 0,05. Tabel ini adalah untuk tabel R.
- b. Jika $N > 7$, maka digunakan rumus $X^2 = k(N - 1) W$.

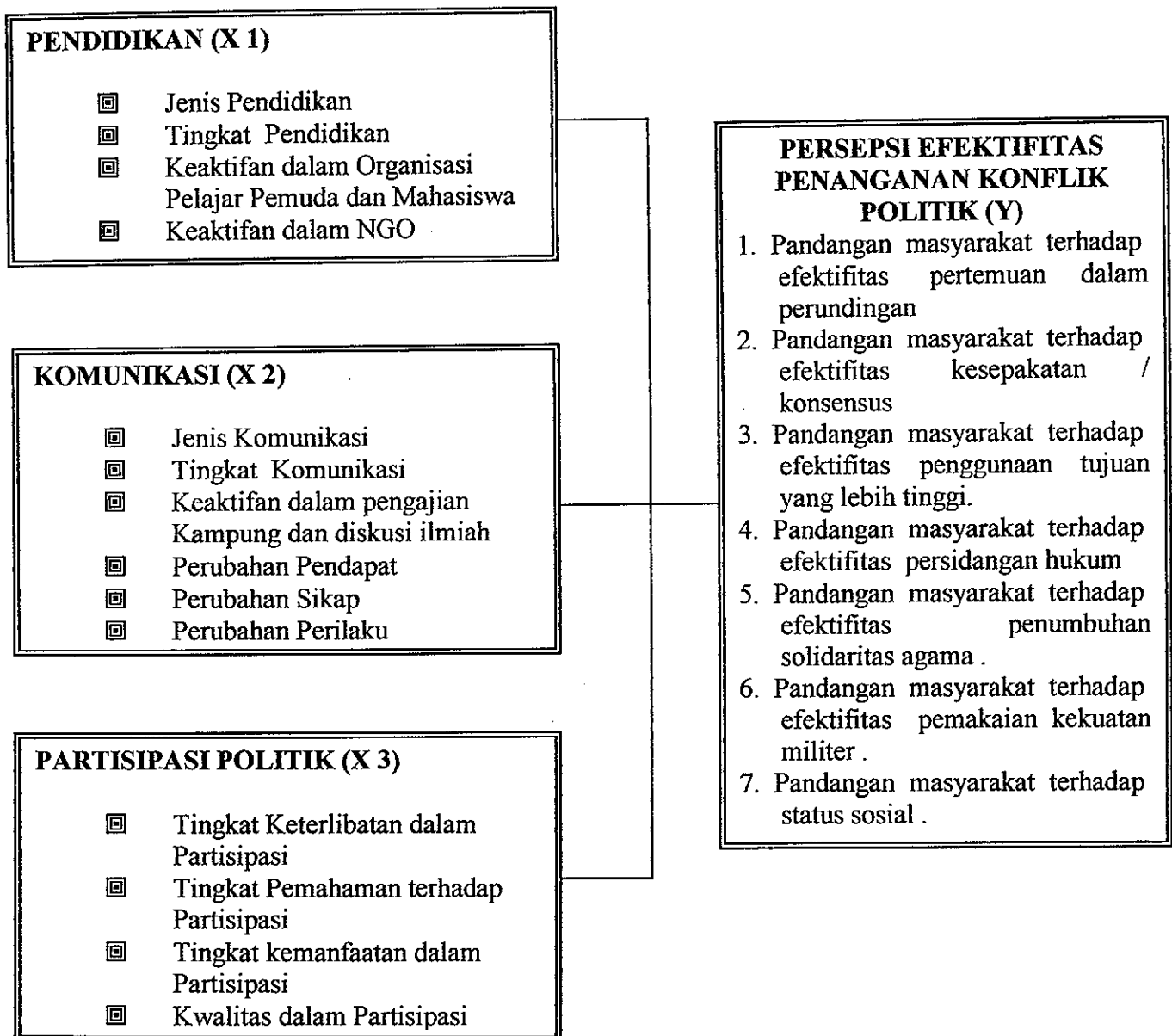
Hasil perhitungan ini baru dapat dilihat dalam tabel, apabila hasilnya lebih besar berarti signifikan. Tabel untuk ini adalah tabel X^2 .

Dalam penelitian ini, sehubungan dengan hal-hal tersebut adalah :

- a. Mencari koefisien konkordansi Kendall antara variabel pendidikan, komunikasi dan partisipasi politik dengan variabel persepsi efektifitas penanganan konflik politik.
- b. Karena dalam penelitian ini sudah pasti adalah lebih besar dari pada 7, maka langkah selanjutnya adalah mencari harga signifikansinya dengan rumus $X^2 = k(N - 1) W$.
- c. Hasil perhitungan tersebut (b) kemudian dibandingkan dengan nilai yang terdapat pada tabel X^2 dengan $db = N-1$. Apabila hasilnya lebih besar dari harga tabel berarti signifikan.

❖ Analisa kualitatif, yaitu dengan kuesioner, wawancara ,observasi , dokumentasi serta studi kepustakaan. Dimana analisis ini digunakan untuk mendukung keterangan- keterangan yang ada dalam analisa kualitatif.

BAGAN HUBUNGAN INDIKATOR VARIABEL PENELITIAN .



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Jepara salah satu Kabupaten di wilayah Propinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 14 (empat belas) Kecamatan . Salah satu kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kedung dimana Desa Dongos terletak diwilayah kecamatan tersebut .Adapun batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : Desa Sukodono Kecamatan Kedung

Batas sebelah Timur : Desa Ngeling Kecamatan Kedung

Batas sebelah Barat : Desa Kerso dan Bugel Kecamatan Kedung

Batas sebelah Selatan : Desa Sowan Lor Kecamatan Kedung

Sedangkan ketinggian Desa Dongos dari permukaan air laut ± 22 m yang merupakan dataran tinggi .

2. Keadaan Topografi

Desa Dongos mempunyai wilayah seluas 227,980 ha , dengan wilayah daratan yang subur dan potensial untuk perkebunan dan penanaman hortikultura. Untuk memperjelas tentang keadaan topografi tersebut , maka dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 6

Tata Guna Tanah Desa Dongos Tahun 2001/2002

No	JENIS	LUAS (Ha)
1	Tanah Kas Dongos	59 , 081
2	Tanah Perkebunan	128 , 245
3	Perumahan dan Pemukiman	30 , 710
4	Tanah Pekuburan	01 , 644
5	Tanah Keagamaan dan Perkantoran	02 , 500
6	Jalan Desa	05 , 550
7	Sungai	00 , 250
8	Lain-lain	-
	JUMLAH	227 , 980

Sumber : Monografi Desa Dongos 2001

Dari tabel di atas terlihat bahwa tanah yang ada di Desa Dongos lebih banyak di pergunakan untuk perkebunan .

3. Keadaan Demografi

Keadaan penduduk merupakan masalah yang cukup menarik untuk ditelaah , apalagi menyangkut dinamika masyarakatnya baik dari perkembangan jumlahnya maupun aktifitas yang dilakukan , antara lain pendidikannya , komunikasi serta partisipasi politiknya sehingga hal ini akan sangat berhubungan dengan pendapatnya tentang efektif tidaknya penanganan konflik politik yang ada di Desa Dongos .

Jumlah keseluruhan penduduk Desa Dongos 5.225 jiwa , sedangkan data lebih terperinci dapat dilihat dalam tabel di bawah ini

Tabel 7

Distribusi Penduduk Menurut Umum dan Jenis Kelamin

NO	KELOMPOK	LAKI - LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	%
		JUMLAH	%	JUMLAH	%		
1	0 - 4	302	12,26	304	11,01	606	11,60
2	5 - 9	252	10,23	256	9,27	508	9,70
3	10 - 14	256	10,39	262	9,49	518	9,90
4	15 - 19	240	9,74	343	12,42	583	11,16
5	20 - 24	241	9,78	346	12,53	587	11,23
6	25 - 29	188	7,63	193	6,99	381	9,30
7	30 - 39	278	11,29	186	6,73	464	8,88
8	40 - 49	308	12,5	276	9,99	584	11,17
9	50 - 59	299	12,14	280	10,13	579	11,08
10	60 Th keatas	104	4,22	313	11,13	417	7,98
	JUMLAH	2.463	100	2.762	100	5225	100

Sumber : Monografi Desa Dongos , April 2001

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah antara laki-laki dan perempuan mempunyai selisih 299 dan lebih besar penduduk yang berjenis kelamin perempuan .

Tabel 8

Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	Tamat PT/ Akademi	21	0,60
2	SLTA	760	21,63
3	SLTP	912	25,95
4	Tamat SD	1.383	39,36
5	Belum Tamat SD	1000	28,46
6	Tidak Tamat SD	558	15,88
7	Tidak Sekolah	63	1,79
8	L a i n - L a i n	27	0,77
	JUMLAH	3,514	100

Sumber : Monografi Desa Dongos April 2001

Sebagian besar penduduk Desa Dongos tingkat pendidikannya adalah tamat Sekolah Dasar (SD) yaitu sebesar 39,36 % . Sebenarnya sarana pendidikan dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 9

Jumlah Sekolah

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH	%
1	TK	2	18,18
2	SD / MI	2 / 1	27,18
3	Tsanawiyah	1	9,09
4	Aliyah	-	
5	Lain – lain	5	45,45
	Jumlah	11	100 %

Sumber: Monografi Desa Dongos April 2001

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana lain-lain menempati posisi tertinggi yaitu 45,45 % . Sedang sarana lain-lain adalah pesantren , jadi mayoritas melanjutkan ke pesantren .

Tabel 10

Mata Pencaharian

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH	%
1	Petani	529	18,78
2	Pengusaha	160	5,68
3	Buruh Industri	1.288	45,72
4	Buruh Bangunan	92	3,27
5	Pedagang	68	2,4
6	Pegawai Negeri Sipil / ABRI	25	0,89
7	Pensiun	12	0,43
8	Lain- lain	643	22,83
	JUMLAH	2.817	100

Sumber : Monografi Desa Dongos April 2001

Tabel 10 memperlihatkan bahwa 45,72 % , masyarakat Desa Dongos mempunyai mata pencaharian sebagai buruh Industri , dalam hal ini Industri meubel . Sehingga akan jelas berhubungan dengan tingkat pendidikan mereka dan

pengetahuan yang mereka miliki . Hal ini secara langsung atau tidak langsung berkaitan erat tentang tingkat komunikasi dan pengetahuan politiknya .

Tabel 11

Sarana Transportasi dan Komunikasi

NO	Transportasi dan Komunikasi	Jumlah	%
1	Radio	2.020	33,08
2	Televisi	500	8,19
3	Sepeda Motor	712	11,66
4	Mobil Pribadi	27	0,44
5	Pesawat Telpn	25	0,41
6	Sepeda	2.816	46,12
7	Lain – lain	6	0,10
	Jumlah	6.100	100

Sumber : Monografi Desa Dongos , April 2001

Tabel sarana transportasi dan komunikasi menunjukan bahwa 33,08 % penduduk lebih banyak menggunakan radio sebagai sarana komunikasi sedangkan sepeda 46,12 % digunakan sebagai sarana transportasi dan komunikasi , jika yang dibandingkan dengan yang memakai mobil 0,44 % dan pesawat telepon 0,41 %. Dalam peristiwa Dongos , masyarakat kurang dapat memanfaatkan sarana transportasi dan komunikasi tersebut.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL

A. Karakteristik Responden

1. Deskripsi Sampel

Penelitian yang dilakukan di Desa Dongos , Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara mengambil responden sejumlah 70 orang . Dalam penelitian dilampangan di peroleh data-data mengenai klasifikasi responden berdasarkan usia responden , tingkat pendidikan dan mata pencaharian . Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 12

Responden menurut Umur

NO	UMUR	JUMLAH	%
1	23 – 33	22	31,43
2	34 – 44	23	32,86
3	45 – 55	18	25,71
4	55 keatas	7	10,00
	JUMLAH	70	100

Sumber : Data primer diolah

Dari tabel diatas responden yang banyak adalah usia angkatan muda sebesar 64,29 % yaitu antara usia 23 – 44 tahun . Karena secara normatif dalam usia tersebut mereka rata-rata masih aktif dalam berorganisasi dan berpolitik .

Tabel 13

Responden menurut Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Banyak	%
1	Laki-laki	51	72,86
2	Perempuan	19	27,43
	JUMLAH	70	100

Sumber : Data Primer diolah

Tabel 13 terlihat bahwa kebanyakan responden laki-laki sebab berdasarkan survey lampangan bahwa laki-laki tertarik dalam kegiatan politik dan organisasi dibanding wanita . Sebab secara normatif mereka lebih disibukkan urusan rumah tangga , meskipun ada upaya penyetaraan dalam “ gender “ . Sebab mereka masih berpedoman “ bahwa untuk terlibat dalam kegiatan politik tersebut harus mendapat ijin dari suami terlebih dahulu sebagai kepala rumah tangga .

Tabel 14

Responden Menurut Pendidikan

NO	Pendidikan	Banyak	%
1	SD / SR	12	17,14
2	SMP / Tsanawiyah	20	28,57
3	SMA / Aliyah	31	44,29
4	Perguruan Tinggi / Akademi	7	10,00
	J U M L A H	70	100

Sumber : Data Primer diolah

Dari Tabel 14 tampak bahwa responden berpendidikan SMA / Aliyah 44,29 % . Sebenarnya mereka ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi tetapi karena untuk melanjutkan memerlukan biaya lebih banyak juga mereka berpendapat banyak juga para lulusan perguruan tinggi yang susah cari kerja . Sebab pengalaman mereka setelah lulus perguruan tinggi dapat jadi pegawai negeri / priyayi .

2. Analisis Distribusi Frekuensi

Penelitian ini mengambil variabel Pendidikan , Komunikasi dan Partisipasi Politik dengan Persepsi Efektifitas Penanganan Konflik Politik . Penyebaran dan pengembangan kuesioner digunakan dengan maksud agar dapat diketahui

distribusi frekuensi masing-masing variabel yang selanjutnya digunakan untuk mengorganisir hubungan antara variabel dalam teknik tabulasi silang .

Kemudian pada penelitian ini akan dijabarkan data dari masing-masing variabel . Dalam mengkategorikan nilai-nilai observasi menggunakan jenjang sangat tinggi, tinggi, rendah dan sangat rendah . Sesuai dengan tabel frekuensi hasil print out progam SPSS for windows yang terdapat dalam lampiran . Adapun tabel frekuensi selengkapnya adalah sebagai berikut :

Tabel 15

Distribusi Frekuensi Pendidikan (X 1)

No	Kategori	Frekuensi	%
1	Sangat Rendah	9	12,89
2	Rendah	17	24,29
3	Sedang	36	51,43
4	Tinggi	10	14,29
JUMLAH		70	100,00

Sumber : Data primer di olah

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa terdapat responden yang memiliki pendidikan yang sangat rendah 12,86%, responden memiliki pendidikan rendah 24,29%, responden memiliki pendidikan sedang 51,43% dan responden memiliki pendidikan tinggi 14,29%.

Tabel 16

Distribusi Frekuensi Komunikasi (X 2)

No	Kategori	Frekuensi	%
1	Sangat Rendah	18	25,71
2	Rendah	28	40,00
3	Sedang	18	25,71
4	Tinggi	6	8,57
JUMLAH		70	100,00

Sumber : Data primer di olah

Dari tabel tersebut, terdapat responden komunikasinya sangat rendah 25,71%, responden komunikasinya rendah 40%, responden komunikasinya sedang 25,71% dan responden komunikasinya tinggi 8,57%.

Tabel 17

Distribusi Frekuensi Partisipasi Politik (X 3)

No	Kategori	Frekuensi	%
1	Sangat Rendah	19	27,14
2	Rendah	3	18,57
3	Sedang	31	44,29
4	Tinggi	7	10,00
JUMLAH		70	100,00

Sumber : Data primer di olah

Dari tabel tersebut terlihat bahwa responden memiliki partisipasi politik sangat rendah 27,14%, responden memiliki partisipasi politik rendah 18,57%, responden memiliki partisipasi politik sedang 44,29% dan responden memiliki partisipasi tinggi 10%.

Tabel 18

Distribusi Frekuensi Persepsi Efektifitas Penanganan Konflik Politik (Y)

No	Kategori	Frekuensi	%
1	Sangat Rendah	31	44,29
2	Rendah	-	-
3	Sedang	31	44,29
4	Tinggi	8	12,43
JUMLAH		70	100,00

Sumber : Data primer di olah

Dari tabel tersebut terdapat responden memiliki persepsi efektifitas penanganan konflik politik sangat rendah 44,29%, responden memiliki persepsi efektifitas penanganan konflik politik sedang 44,29%, responden memiliki persepsi efektifitas penanganan konflik politik tinggi 12,43% dan pada kategori rendah tidak ada responden yang menjawab.

3. Deskripsi Variabel Penelitian

Sebelum diuraikan mengenai hasil penelitian dari masing-masing variabel maka akan ditampilkan gambaran frekuensi sampel dari masing-masing variabel, indikator dan sub indikator.

3. a. Pendidikan (X 1)

Variabel Pendidikan dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 19. Pendidikan (X1)

N O	Indikator	Sub Indikator	Frekuensi Sampel				JML
			4	3	2	1	
1	a. Jenis Pendidikan	- Pernah menempuh pendidikan	19 (27,14%)	38 (54,29%)	13 (18,57%)	-	70 100%
		- Tidak pernah menempuh pendidikan	-	-	-	-	-
	b. Tingkat Pendidikan	- Tingkat Pendidikan yang telah ditempuh	7 (10%)	31 (44,29%)	20 (28,57%)	12 (17,14%)	70 100%
		- Pendidikan luar sekolah	23 (32,86%)	38 (54,29%)	9 (12,86%)	-	70 100%
	c. Tingkat keaktifan dalam organisasi pelajar, mahasiswa dan pemuda	- Keterlibatan dalam organisasi pelajar dan kepemudaan	21 (30%)	40 (57,14%)	8 (11,43%)	1 (1,43%)	70 100%
d. Tingkat keaktifan dalam LSM	- Keanggotaan dalam LSM	-	-	-	70 (100%)	70 100%	
		- Keaktifan dalam LSM	-	-	-	-	

		- Upaya menambah pengetahuan	2 (2,86%)	25 (35,71%)	36 (51,43%)	7 (10%)	70 (100%)
--	--	------------------------------	--------------	----------------	----------------	------------	--------------

Sumber : Pertanyaan No. 11 s/d 17

Dari tabel di atas, bahwa tingkat pendidikan dari responden mayoritas berpendidikan SLTA/Aliyah 44,29%, sedang 28,57% responden SLTP, 17,14% responden berpendidikan SD/SR dan 10% responden berpendidikan tinggi. Sehingga dapat dianalisis bahwa tingkat pendidikan masyarakat perlu ditingkatkan agar dapat diperoleh kualitas sumber daya manusia yang baik dan berpotensi sebagai salah satu modal pembangunan nasional. Jika dikaitkan antara tingkat pendidikan dengan tingkat keaktifan dalam LSM, tampak tidak ada satupun responden yang ikut jadi anggota LSM atau aktif didalamnya. Karena pendidikan merupakan suatu nilai tertentu bagi manusia serta hal-hal baru dan juga bagaimana berpikir secara ilmiah. Dengan pendidikan diharapkan pola pikir dan penalaran seseorang dapat lebih rasional dan bijaksana. Sedang jenis pendidikan responden, 27,14% responden berpendidikan formal, 54,29% responden pernah tapi tidak selesai, 18,17% responden tidak pernah, dan tidak ada satupun responden yang menjawab tidak pernah dan suka. Untuk pendidikan luar sekolah, 32,86% responden menjawab pernah menempuh, 54,29% responden menjawab tidak pernah, 12,86% responden menjawab tidak pernah dan tidak ada satupun responden yang menjawab tidak tahu. Responden yang aktif dalam organisasi pelajar, mahasiswa dan pemuda, 30% responden menjawab pernah, 57,14% responden pernah tapi tidak aktif. Dan tidak ada satupun responden yang menjadi anggota LSM.

Meskipun demikian dalam menambah pengetahuan , 2,86 % responden menjawab sangat aktif, 35,71% responden aktif, 51,43% responden tidak pernah dan 10% responden menjawab tidak tahu . Dalam kaitannya dengan Persepsi Efektifitas Penanganan Konflik Politik ini yang berhubungan dengan variabel pendidikan dapat dilihat dari tabel pendidikan dibawah ini :

Tabel 20

Tingkat Pendidikan

NO	Uraian	Frekuensi	% fase
1	Perguruan Tinggi	7	10
2	SMA/Aliyah	31	44,29
3	SMP/Tsanawiyah	20	28,57
4	SD/SR/MI	12	17,14
	J U M L A H	70	100

Sumber pertanyaan No 12

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden pendidikannya SMA/Aliyah responden 44,29 % dan minoritas responden berpendidikan Perguruan Tinggi sebesar 10 % . Hal ini akan berhubungan dengan persepsi mereka dalam menanggapi efektifitas penanganan konflik politik . Menurut Francis J Brown dalam Wenz Tanlain , (1988 : 65) bahwa pendidikan adalah pengawasan yang konsisten dari proses perubahan tingkah laku sehingga menghasilkan perilaku seseorang secara pribadi dan perilaku individu dalam masyarakat .

Berkaitan dengan Persepsi Efektifitas Penanganan Konflik Politik PPP dan PKB , bahwa dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi maka persepsi mereka tentang efektifitas konflik politik semakin tinggi (baik) . Dari responden yang berpendidikan tinggi 10 % , responden berpendidikan SMA/Aliyah dan

yang sederajat 44,29 % , responden berpendidikan SMP/Tsanawiyah 28.57 % dan responden berpendidikan SD/SR/MI 17,14 % menganggap bahwa efektifitas penanganan konflik politik sangat efektif , karena konflik itu tidak terulang lagi dan dapat dijadikan pendidikan politik bagi masyarakat . Meskipun penanganannya tidak dapat tuntas dalam arti para tersangka diadili dengan vonis hukuman tertentu karena mereka menganggap bahwa orang-orang yang menjadi korban terlibat dalam konflik berdarah itu karena mudah terprovokasi dan pendidikannya rendah . Data yang diperoleh dari Polsek Kedung yaitu : Korban meninggal Nur Hasyim pendidikan terakhir MI dari PPP sedang dari PKB yaitu Makruf , Muhammad Nur Khandayani dan Asrori pendidikan terakhir Tsanawiyah dan Pesantren .

3. b. Komunikasi (X 2)

Variabel Komunikasi dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 21

Komunikasi (X 2)

N O	Indikator	Sub Indikator	Frekuensi Sampel				JML
			4	3	2	1	
1	a. Jenis Komunikasi yang dipakai	- Sarana komunikasi dalam kegiatan	6 (8, 57 %)	34 (48 ,57 %)	25 (35 ,71 %)	5 (7, 14 %)	70 (100 %)
		- Pemuatan berita konflik Dongos dalam media massa	-	-	70 (10 0%)	-	70 (100 %)
	b. Keaktifan dalam pengajian, kampanye dan	- Pelaksanaan kegiatan pengajian, kampanye dan diskusi ilmiah	4 (5, 71 %)	34 (48 ,57 %)	25 (35 ,71 %)	7 (10 %)	70 (100 %)

	diskusi ilmiah	- Hubungan kegiatan pengajian, kampanye dan diskusi ilmiah dengan persepsi efektifitas penanganan konflik politik	4 (5,71%)	31 (44,29%)	33 (47,14%)	2 (2,86%)	70 (100%)
c.	Adanya perubahan pendapat setelah mengikuti proses komunikasi	- Perubahan pendapat tentang penanganan konflik politik setelah mengikuti kegiatan komunikasi	1 (1,43%)	30 (42,86%)	38 (54,29%)	1 (1,43%)	70 (100%)
d.	Adanya perubahan sikap setelah mengikuti proses komunikasi	- Perubahan sikap tentang penanganan konflik politik setelah mengikuti kegiatan komunikasi	3 (4,28%)	20 (28,57%)	46 (65,71%)	1 (1,43%)	70 (100%)
e.	Adanya perubahan perilaku setelah mengikuti proses komunikasi	- Perubahan perilaku tentang penanganan konflik politik setelah mengikuti kegiatan komunikasi	-	19 (27,14%)	49 (70%)	2 (2,86%)	70 (100%)

Sumber : Pertanyaan No. 18 s/d 24

Dari tabel diatas, bahwa 100% responden menjawab konflik dongos sering di muat dalam media massa waktu itu, yaitu menjelang pemilu 1999 dan beberapa hari setelah pelaksanaan pemilu. Responden dalam penggunaan media komunikasi, 8,57% responden menjawab sering, 48,57% responden menjawab kadang- kadang, 35,71% responden menjawab tidak pernah,

7,14% responden menjawab tidak tahu. . Pelaksanaan kegiatan pengajian , kampanye politik dan diskusi ilmiah , 5,71% responden menjawab sering, 48,57% responden menjawab kadang- kadang, 35,71% responden menjawab tidak pernah dan 10% responden menjawab tidak tahu. Sedang kegiatan tersebut sebagaimana dalam pertanyaan sebelumnya ,5,71% responden menjawab sangat setuju, 44,29% responden menjawab setuju, 47,14% responden menjawab kurang setuju dan 2,86% responden menjawab tidak setuju . Adapun kegiatan komunikasi dapat mempengaruhi pendapat responden, 11,43% responden menjawab sangat merasakan , 42,86% menjawab merasakan, 54,29% responden menjawab kurang merasakan, 1 ,43% responden menjawab tidak merasakan. Adanya perubahan pendapat tentang efektifitas penanganan konflik politik . Kegiatan komunikasi dapat mempengaruhi perubahan sikap responden, 4,28% responden menjawab sangat merasakan , 28,57% menjawab merasakan, 65,71% responden menjawab kurang merasakan, 1,43% responden menjawab tidak merasakan .Sementara perubahan perilaku dapat mempengaruhi perilaku tentang efektifitas penanganan konflik politik, 27,14% responden menjawab merasakan, 70% responden menjawab kurang merasakan , 2 responden menjawab tidak merasakan dan tidak ada satupun responden yang menjawab sangat merasakan . Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa konflik Dongos memang menarik dan penting untuk dijadikan bahan berita dan pembahasan dalam forum-forum ilmiah. Sedang kegiatan-kegiatan pengajian akan memperlancar pelaksanaan persepsi efektifitas penanganan konflik politik, di mana dari 100% responden, 44,29% responden menjawab sering mengikuti kegiatan tersebut, 47,14% responden menjawab

kadang-kadang mengikuti kegiatan pengajian dan kampanye sedang 5,71% responden menjawab sangat sering dan 2,86% responden menjawab tidak pernah mengikuti kegiatan pengajian dan kampanye. Karena komunikasi merupakan proses yang melibatkan hubungan-hubungan kemanusiaan baik dengan tukar – menukar pandangan , perasaan dan keinginan .

Berkaitan dengan Komunikasi Politik dan Persepsi Efektifitas Penanganan Konflik Politik maka proses pertukaran informasi dalam bentuk interaksi politik maka diharapkan dapat mendukung proses politik dalam merumuskan atau mengelola hasilnya berupa persepsi masyarakat akan efektif tidaknya penanganan konflik oleh aparat terkait . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 22.

Tingkat Penggunaan Media Komunikasi

NO	Uraian	Jumlah	% fase
1	Sangat sering	6	8 , 57
2	Sering	34	48 , 59
3	Kadang-kadang	25	35 , 71
4	Tidak pernah	5	7 , 14
	J U M L A H	70	100

Sumber Data : Pertanyaan No 18

Dari tabel 22, menunjukkan bahwa 48 , 57% responden sering menggunakan media massa dalam mengikuti perkembangan dan kegiatan politik sedang 8,57% sangat sering , 35,71% kadang dan hanya 7,14% menjawab tidak pernah mengikuti perkembangan dan kegiatan politik , karena mereka disibukkan dalam kegiatan ekonomi dan mencapai nafkah sehari-hari . Menurut Alfian (1999 :25) , pesan-pesan politik berupa protes , tuntutan dan dukungan akan dipersambungkan dalam sistem politik massa lalu dan massa kini dan aspirasi

tersebut dapat dikonversikan menjadi kebijaksanaan . Karena mayoritas responden menjawab menggunakan media komunikasi dalam mengikuti perkembangan kegiatan politik , maka akan berkaitan dengan penyampaian aspirasi dan kepentingan mereka yang disampaikan dalam suatu pembuatan kebijakan . Menurut responden bahwa jika komunikasi sering dilakukan maka penanganan konflik politik tersebut semakin efektif ,karena kurangnya komunikasi oleh aparat terkait dengan pihak korban khususnya dan masyarakat Desa Dongos pada umumnya . Ketika dilakukan wawancara dengan keluarga korban PPP (Nur Hasyim) bahwa kasus tersebut tidak tuntas secara hukum meskipun dari pihak partai sudah berusaha melakukan pendekatan-pendekatan dengan keluarga . Akan tetapi keterbukaan dengan jelas siapa pelaku pembunuhan terhadap anggota keluarganya tersebut . Sementara dari masyarakat Desa Dongos kurang keterbukaan masyarakat untuk memberikan informasi siapa pelaku pembunuhan tersebut , karena ada perasaan takut akan keselamatan jiwa dan raga untuk itu mereka hanya mengikuti perkembangan berita konflik berdarah Dongos hanya lewat media massa . Sehingga dapat dikatakan jika tinggkat komunikasi tinggi maka persepsi mereka tentang penanganan konflik politik tersebut semakin efektif , sebaliknya jika komunikasinya rendah maka persepsi mereka tentang penanganan konflik politik tersebut dianggap tidak efektif penanganannya .

3.c. Variabel Partisipasi Politik (X 3)

Variabel Partisipasi Politik dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 23.

Partisipasi Politik (X 3)

N O	Indikator	Sub Indikator	Frekuensi Sampel				JML
			4	3	2	1	
1	a. Tingkat keterlibatan dalam partisipasi	- Kegiatan pemilu	16 (22,86%)	19 (22,14%)	34 (48,57%)	1 (1,43%)	70 (100%)
		b. Tingkat pemahaman terhadap partisipasi	- Kesadaran dalam partisipasi politik	3 (4,28%)	12 (17,14%)	45 (64,29%)	10 (14,29%)
	c. Tingkat kemanfaatan dalam partisipasi	- Penggunaan hak pilih (memilih dan dipilih)	4 (5,71%)	18 (25,71%)	44 (62,86%)	4 (5,71%)	70 (100%)
		d. Kualitas dalam partisipasi	- Keaktifan dalam kepengurusan partai.	4 (5,71%)	16 (22,86%)	42 (60,39%)	8 (11,43%)
	- Keterlibatan dalam kerusuhan politik		3 (4,28%)	15 (21,43%)	39 (55,71%)	13 (18,57%)	70 (100%)
	- Keaktifan dalam kampanye politik		-	21 (30%)	40 (57,14%)	9 (12,86%)	70 (100%)
	- Upaya mempengaruhi partisipasi politik		1 (1,43%)	10 (14,29%)	43 (61,43%)	16 (22,86%)	70 (100%)

	- Keterlibatan dalam diskusi atau seminar politik	1 (1,43%)	12 (17,14%)	41 (34,31%)	16 (22,86%)	70 (100%)
	- Keaktifan dalam penulisan artikel politik	-	11 (15,71%)	42 (60%)	17 (24,29%)	70 (100%)
	- Mengikuti perkembangan politik	3 (4,28%)	14 (20%)	43 (61,43%)	10 (14,29%)	70 (100%)

Sumber : Pertanyaan No. 25 s/d 34

Dari tabel di atas, bahwa kesadaran dalam berpartisipasi politik 64,29% responden menjawab kurang sadar dan tidak ada paksaan, 17,14% responden sadar dan tidak ada paksaan, 14,29% responden menjawab tidak sadar dan ada paksaan, 4,28% responden menjawab sangat sadar dan tidak ada paksaan. Jika dikaitkan dengan keaktifan dalam kepengurusan partai, 60% responden menjawab kurang aktif, 22,86% responden aktif, 11,43% responden tidak aktif dan 5,71% responden sangat aktif. Sementara keterlibatan dalam membicarakan masalah-masalah politik, 34,31% responden menjawab kadang-kadang, 22,86% responden tidak pernah membicarakan masalah politik, 17,14% responden sering membicarakan masalah politik dan 1,43% responden sangat sering. Keaktifan dalam kegiatan Pemilu, 5,71% responden menjawab sangat aktif, 22,86% responden aktif, 60% responden menjawab kurang aktif dan 11,43% responden menjawab tidak aktif. Kesadaran responden dalam partisipasi politik, 4,28% responden menjawab sangat sadar dan tidak ada paksaan, 17,14% responden menjawab sadar dan tidak ada paksaan, 64,29% responden menjawab kurang

sadar dan ada paksaan serta 14,29% responden menjawab tidak ada sadar dan ada paksaan.

Penggunaan hak pilih dalam pemilu 5,71% responden menjawab sangat aktif, 25,71% responden menjawab aktif, 62,86% responden menjawab tidak aktif, 5,71% responden menjawab tidak tahu. Sementara keaktifan dalam partai, 5,71% responden menjawab sangat aktif, 22,86% responden menjawab aktif, 60% responden menjawab tidak aktif, 11,43% responden menyatakan tidak aktif. Keterlibatan responden dalam kerusuhan politik, 4,28% responden menjawab pernah, 21,43% responden menjawab kadang-kadang, 55,71% responden menjawab tidak pernah, 18,57% responden menjawab tidak tahu. Kampanye politik yang diikuti, 30% responden menjawab aktif, 57,14% responden menjawab kurang aktif, 12,86% responden menjawab tidak aktif. Adapun responden yang menyatakan mengkampanye orang lain, 1,43% responden menjawab sangat aktif, 14,29% responden menjawab aktif, 61,43% responden menjawab tidak pernah, serta 14,29% responden menjawab tidak tahu. Partisipasi responden dalam seminar atau diskusi masalah politik, 1,43% responden menjawab sering, 17,14% responden menjawab kadang-kadang, 34,31% responden menjawab tidak pernah, 22,86% responden menjawab tidak tahu. Keaktifan responden dalam penulisan artikel dalam media massa, 15,71% responden menjawab kadang-kadang, 60% responden menjawab tidak pernah, 24,29% responden menjawab tidak tahu dan tidak ada satupun responden yang menjawab sering. Keaktifan responden dalam mengikuti perkembangan politik, 4,28% responden menjawab sering, 20% responden menjawab kadang-kadang,

61,43% responden menjawab tidak pernah, serta 14,29% responden menjawab tidak tahu.

Pada dasarnya partisipasi merupakan keterlibatan seluruh masyarakat dalam proses pembangunan sesuai arah dan strategi yang telah ditetapkan dalam suatu sistem politik . Sehingga partisipasi tidak hanya keterlibatan dalam menyumbangkan kemampuan , baik secara fisik atau tenaga serta harta dengan rasa penuh tanggung jawab saja melainkan juga diawali dengan keterlibatan sikap mental , perasaan serta pikiran setiap orang atau kelompok . Keterlibatan warga Indonesia dalam bidang politik antara lain ketiak menyalurkan suaranya dalam pemilu ataupun dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy) (Mirriam Budiarjo,1998 : 1) .

Berkaitan dengan partisipasi politik dalam *efforia* politik dewasa ini dengan adanya kekerasan telah melampui batas-batas realitas, dimana kejahatan dan kriminalitas telah demikian canggih dan terkadang juga membabi buta . Artinya dalam kehidupan berpolitik terdapat adanya kejahatan yang direncanakan sudah menjadi suatu wacana yang diorganisir , dikontrol secara lembaga . Misalnya : kelompok-kelompok *provokator* bayaran .

Dalam menggambarkan partisipasi politik masyarakat dalam kaitannya dengan persepsi efektifitas penanganan konflik dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 24

Tabel Tingkat Kesadaran Dalam Partisipasi Politik

NO	Uraian	Frekuensi	%
1	Sangat sadar dan tidak ada paksaan	3	9,29
2	Sadar dan tidak ada paksaan	12	17,14
3	Tak sadar	45	64,29
4	Tidak sadar dan ada paksaan	10	14,29
	J U M L A H	70	100

Sumber Data : Pertanyaan No 26

Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa responden menjawab partisipasi politiknya adalah tidak sadar dan tidak ada paksaan 64,29 %, hal ini menunjukkan adanya partisipasi politik yang dimubalisir oleh elit-elit politik . Sehingga partisipasi politiknya seringkali menyimpang serta mendukung arah penyimpangan partisipasi politik . Karena partisipasi politik masyarakat yang cenderung menyimpang atau cenderung mendukung partisipasi yang menyimpang maka dalam kaitannya dengan persepsi efektifitas penanganan konflik politik , mayoritas responden mempunyai persepsi tidak efektif penanganannya . Sehingga dapat dikatakan bahwa partisipasi politik ada hubungannya dengan persepsi efektifitas penanganan konflik politik .

3. d. Persepsi Efektivitas Penanganan Konflik Politik (Y)

Variabel Persepsi Effektivitas Penanganan Konflik Politik (Y) dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 25

Persepsi Efektivitas Penanganan Konflik Politik (Y)

N O	Indikator	Sub Indikator	Frekuensi Sampel				JML
			4	3	2	1	
1	a. Pandangan masyarakat terhadap efektifitas pertemuan dalam perundingan	- Keaktifan dalam perundingan	24 (34,29%)	24 (34,29%)	22 (31,43%)	-	70 (100%)
	b. Pandangan masyarakat terhadap efektifitas kesepakatan dan konsensus	- Keterlibatan dalam pembuatan keputusan	5 (7,14%)	38 (54,29%)	27 (38,57%)	-	70 (100%)
	c. Pandangan masyarakat terhadap efektifitas penggunaan tujuan yang lebih tinggi	- Tujuan perjanjian atau kesepakatan	15 (21,43%)	31 (44,29%)	24 (34,28%)	-	70 (100%)
	d. Pandangan masyarakat terhadap efektifitas persidangan hukum	- Dampak hukum dan efektifitas penanganannya terhadap konflik politik	10 (14,29%)	33 (47,14%)	27 (38,57%)	-	70 (100%)
	e. Pandangan masyarakat terhadap efektifitas penumbuhan solidaritas agama	- Keterlibatan dalam musyawarah	11 (15,71%)	37 (52,86%)	22 (31,43%)	-	70 (100%)
	f. Pandangan masyarakat terhadap efektifitas pemakaian kekuatan militer	- Pendapat umum penggunaan kekuatan militer dalam efektifitas penanganan konflik - Peranan militer dalam efektifitas penanganan konflik	8 (11,43%) 11 (15,71%)	36 (51,43%) 29 (41,43%)	26 (37,14%) 29 (41,43%)	- 1 (1,43%)	70 (100%) 70 (100%)

		- Perubahan situasi dalam pengerahan kekuatan militer	-	-	70	-	70 (100%)
		- Fungsi kekuatan militer	2 (2,86%)	38 (54,29%)	29 (41,43%)	1 (1,43%)	70 (100%)
g.	Pandangan terhadap status sosial	- Pendapat terhadap status sosial	-	-	70 (100%)	-	70 (100%)

Sumber : Pertanyaan No. 1 s/d 10

Dari tabel 25, terlihat semua responden sebanyak 100% orang menjawab bahwa pengerahan kekuatan militer sangat berarti untuk mengamankan keadaan. Dimana masyarakat tidak merasa kekalutan atau cemas atas kejadian tersebut. Bahkan mereka rasa aman dan tenang ketika militer datang. Jika dikaitkan pendapat mereka tentang penggunaan kekuatan militer tidak ada satu pun responden yang menjawab atas tidak setujunya dengan kekuatan militer, 11,43% responden sangat setuju, 51,43% responden setuju dan 37,14% responden kurang setuju. Sedangkan 37,14% responden yang kurang setuju ketika dilakukan wawancara ternyata mereka menganggap bahwa kehadiran militer kurang cepat sehingga peristiwa politik berdarah antara sesama umat Islam tersebut tidak dapat terelakkan. Dan yang mereka kehendaki adalah kecepatan dan kesergapan aparat tepat waktu, meskipun waktu itu ada Polisi Sektor Kedung, jumlahnya sangat minimal yaitu berkisar 7-8 orang polisi. Keaktifan dalam perundingan menurut responden, 34,29% menjawab aktif terlibat, 31,43% menjawab kurang aktif terlibat, 31,43% menjawab tidak aktif terlibat. Jawaban responden tentang

keterlibatan aparat terkait dalam pembuatan keputusan , 7,14% responden menjawab aktif, 54,29% responden menjawab kurang aktif, dan 38,57% responden menjawab tidak aktif. Persepsi responden tentang tujuan perjanjian luhur perjanjian , 21,43% responden menjawab tahu, 44,29% responden menjawab kurang tahu, 34,28% responden menjawab tidak tahu. Sedangkan konflik politik tersebut mempunyai dampak hukum, 14,29% responden menjawab tahu, 47,14% responden menjawab kurang tahu, dan 38,57% responden menjawab tidak tahu . Pendapat responden tentang keterlibatan aparat terkait dalam musyawarah , 15,71% responden menjawab aktif, 52,86% responden menjawab kurang aktif, 31,43% responden menjawab tidak aktif. Kekuatan militer yang dipakai dalam penanganan konflik tersebut , persepsi 11,43% responden menjawab aktif, 51,43% responden menjawab kurang aktif, 37,14% responden menjawab tidak aktif dan tidak ada satupun yang menjawab sangat aktif. Adapun peranan militer dalam penanganan konflik tersebut, 15,71% responden menjawab sangat berperan, 41,43% responden berperan, 41,43% responden kurang berperan dan 1,43% responden menjawab tidak berperan .

Menurut 100% responden pengerahan kekuatan militer bisa mengamankan keadaan, dan fungsi kekuatan militer 2,86 % responden menjawab membuat sangat aman, 54,29% responden menjawab aman, 41,43% responden kurang aman, dan 1,43% responden menjawab tidak aman . Sedangkan responden yang menjawab status sosial berhubungan dengan efektifitas penanganan konflik, 100% responden menjawab ya dan tidak ada satupun yang menjawab tidak . Persepsi Efektifitas Penanganan Konflik Politik merupakan

pandangan tentang keberhasilan pengaturan ketidak sesuaian antara dua atau lebih karena adanya pemvbagian sumberdaya yang terbatas dalam suatu kegiatan karena adanya perbedaan status , tujuan dan nilai sumberdaya yang terbatas dan perebedaan status ,tujuan dan nilai ini sangat terkait dengan kwalitaas persepsi efektifitas penanganan konflik politik , untuk selanjutnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 26

Persepsi Masyarakat Terhadap Keterlibatan aparat dalam Efektifitas Penanganan Konflik politik .

NO	Uraian	Frekuensi	% Fase
1	Sangat Aktif	5	7,14
2	Aktif	38	54,29
3	Kurang Aktif	27	38,57
4	Tidak Aktif	-	-
	J U M L A H	70	100

Sumber data : Pertanyaan No 2

Dari tabel di atas ,persepsi masyarakat terhadap keterlibatan aparat dalam efektifitas penanganan konflik politik ,aktif responden 54,29 % dan kurang aktif responden 38,57 % serta sangat aktif 5 responden 7,14 % . Dan tidak ada satupun responden yang menjawab tidak aktif. Akan tetapi ada beberapa hal perlu disampaikan:

- a. Saat terjadinya konflik tersebut aparat keamanan dirasakan sangat lamban penanganannya meskipun dalam beberapa waktu keadaan dapat dikendalikan Tetapi kedatangan aparat keamanan sudah sangat banyak berjatuhan korban baik harta , jiwa dan benda .

- b. Pemerintah Daerah tidak bisa tegas mengambil keputusan dalam penanganannya , posisinya hanya sebagai fasilitator menemukan kedua elit partai dalam suatu perundingan damai.
- c. Aparat pengadilan (hukum) tidak bisa membuat vonis yang pasti , sehingga penanganannya secara hukum dianggap tidak efektif .
- d. Para elit politik hanya lebih banyak mementingkan kepentingan individu dan lebih disibukkan dalam upaya mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR / legislatif) bukan mengutamakan kepentingan rakyat, yaitu rakyat hanya dijadikan obyek, bukan obyek yang harus kita korbankan kepentingan – kepentingannya demi kepentingan pribadi atau golongan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan yang lebih tinggi tentunya tidak hanya bergantung pada kemampuan intelektual saja akan tetapi juga bergantung pada aspek komunikasi atau arus informasi pengetahuan dan akan menimbulkan dengan kualitas partisipasi politik masyarakat . Jika pendidikan komunikasi dan partisipasi politik masyarakat baik (tinggi) , maka persepsi mereka tentang efektivitas penanganan konflik semakin baik(tinggi) .

B. Analisis Hasil Penelitian

Analisis data merupakan cara untuk menyajikan data yang telah diperoleh dari survey (penelitian) dengan penyebaran kusioner ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami . Data yang diperoleh tersebut untuk mengetahui hubungan antara variabel yang dioperasionalkan yaitu Pendidikan (X1) ,

Komunikasi (X2) , Partisipasi Politik (X3) , dengan persepsi Efektifitas Penanganan Konflik Politik (Y) . Sebelum menganalisis hubungan antara variabel lebih lanjut maka akan disampaikan hal – hal yang berkaitan dengan variabel sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

B. 1 . Azas dan Visi Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

PPP adalah partai politik yang lahir dari penyederhanaan partai politik (fusi parpol) pada tahun 1973 yang dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru. Karena partai ini merupakan fusi dari partai Islam (termasuk NU) maka partai ini menggunakan azas Islam dengan menggunakan tanda gambar Ka”bah . Namun setelah digulirkannya azas tunggal Pancasila pada awal tahun 1980an terjadi perbedaan pandangan didalam tubuh PPP. Perbedaan tersebut adalah mengubah azas PPP yang semula bergambar Ka”bah menjadi tanda gambar Bintang yang berada di tengah persegi empat dengan warna dasar hitam yang menyerupai tanda gambar Ka”bah.

Setelah di era reformasi PPP kembali menggunakan tanda gambar Ka”bah karena sebagian besar pendukung PPP adalah pendukung tradisional yang masih terikat dengan simbol ke-Islaman , selain itu PPP juga berlandaskan kepada azas Islam lagi . Segala gerak perjuangannya PPP senantiasa berpijak pada ajaran- ajaran Islam serta memegang teguh prinsip- prinsip *universalisme* (berlaku umum), *egaliter* (tidak diskriminatif untuk tidak membedakan masyarakat atas dasar suku , agama, ras, dan golongan) dan bersifat *dinamis* (disesuaikan dengan perkembangan jaman) . PPP dalam visi dan misinya juga berusaha untuk

mewujudkan masyarakat madani (*civil society*) yaitu masyarakat yang demokratis , yang berkeadilan dan sejahtera.

Meskipun PPP merupakan partai politik yang berdasarkan Islam, namun PPP tidak menghendaki Indonesia menjadi Negara Islam, tetapi PPP justru menghendaki dan memandang bagaimana mengaktualisasikan Islam yang *Rahmatan Lil Alamin* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. (Hasil wawancara dengan Sekretaris Ranting PPP Kecamatan Kedung saudara Drs. Sutomo, tanggal 5 Juli 2002)

B. 2. Azas Dan Visi Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

PKB yang dideklarasikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhotul Ulama (NU) KH. Abdurrahman Wahid adalah partai politik (parpol) yang berdasarkan Pancasila dengan berlambang Nusantara dengan Globe yang dikelilingi oleh sembilan bintang yang menyerupai tanda gambar oleh lambang yang digunakan NU. Namun PKB dipilih karena sejak awal para ulama NU telah mengedepankan nilai- nilai kebangsaan Indonesia dibandingkan dengan mendirikan Negara Islam atau menetapkan hukum- hukum Islam secara formal dalam Negara Indonesia. Disamping itu penggunaan nama Kebangkitan Bangsa jugamerupakan wujud Konstitusi NU untuk selalu berada ditengah- tengah umat dari berbagai komponen bangsa Indonesia. Dengan kata lain kebijakan yang diambil oleh PKB selalu didasarkan pada kepentingan bangsa.

Adapun visi dari PKB adalah sebagai berikut :

1. Prinsip dasar PKB adalah untuk mewujudkan bangsa yang dicita-citakan , yaitu masyarakat yang terjamin hak asasi manusianya yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran , kebenaran kesungguhan dan keterbukaan yang bersumber dari hati nurani .
2. Untuk merealisasikan prinsip diatas , ditempuh dengan pendekatan amar makruf nahi mungkar , yakni menyerukan kebajikan dan mencegah segala kemungkaran dan kenyataan yang mengandung kemungkaran .
3. Sebagai bagian dari bangsa yang pluralistis , PKB memandang bahwa tatanan kehidupan bangsa harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila . Penerapan nilai-nilai Pancasila harus berlandaskan pada ikatan-ikatan keagamaan (ukhwah diniyah) , ikatan kebangsaan (ukhwah wathoniyah), ikatan-ikatan kemanusiaan (ukhwah islamiyah) .
4. PKB berkehendak untuk menyerap, menampung , menyampikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat guna menegakkan hak-hak rakyat dan menjamin pelaksanaan ketatanegaraan yang jujur adil dan demokratis .
5. Bagi PKB upaya untuk mengartikulasikan garis perjuangan politiknya dalam jalur kekuasaan menjadi hal yang niscaya dan dapat dipertanggung jawabkan .
6. Kekuasaan dalam pandangan PKB sejatinya milik Tuhan Yang Maha Esa kekuasaan dalam diri manusia merupakan titipan amanah Tuhan yang diberikan kepada manusia yang harus diemban dan dipertanggung jawabkan.
7. Dalam perjuangan politiknya , PKB memegang teguh sifat terbuka (inclusive) dalam arti lintas agama , lintas suku , lintas ras , dan lintas golongan yang

dimanifestasikan dalam bentuk visi , misi , program perjuangan keanggotaan kepemimpinan .

Walaupun PKB tidak mencantumkan asas Islam , melainkan berorientasi kebangsaan tetapi PKB mencantumkan sekian banyak bagian dari ajaran Islam yang menjadi rel perjalanan PKB yang menjadi program PKB diantaranya adalah dalam perjuangannya senantiasa mengabdikan kepada Allah SWT dan selalu menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, kebersamaan dan persaudaraan sesuai ajaran Islam Alussunnah Wal Jamaah . Semuanya itu merupakan bagian-bagian juziyyah ajaran Islam . Bagi PKB kajian tentang komitmen wawasan antara kenegaraan dan Islam , sumber daya manusia serta program telah tuntas . Dalam menyikapi perbedaan agama di Indonesia , hendaknya ditumbuh kembangkan sikap saling menghargai atau toleran antar umat beragama .

Pemahaman keagamaan NU yang juga dilaksanakan sepenuhnya di PKB berdasarkan Mitsqotul Madinah , adalah mengayomi, melindungi , dan menghargai sesama manusia walaupun berbeda agama , suku, golongan, dan sebagainya . Dalam hal ini PKB berusaha meniru dan meneladani jejak Sunan Kali Jaga yang mengamalkan Islam dan mengembangkan adat istiadat budaya setempat tanpa bertentangan dengan Islam . Dalam hubungan dengan Allah SWT, manusia wajib membaca tanda-tanda alam selain kitab suci dan berorientasi kebesaran hati . Dalam dengan sesama manusia pun perlu dikembangkan nilai-nilai yang islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian , dalam paradigma negara dan bangsa , nilai-nilai Islam seperti itu tidak mengenal diskriminasi dan sekterian terhadap aliran maupun pihak

lain. (Wawancara dengan saudara KH. Agus Salim Pengurus PKB Kedung tanggal 5 Juli 2002)

Analisis yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian ini memakai uji statistik dengan menggunakan angka-angka sebagai informasi dan teknik statistik . Dimana analisis ini menggunakan Tabulasi Silang , Koefisien Korelasi Rank Kendall Tau C , Koefisien Konkordansi Kendall (w) dan Koefisien Korelasi Partial Kendall .

B. 3. Analisis Tabulasi Silang

Analisis ini digunakan untuk mengetahui kecenderungan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat yaitu variabel Pendidikan dengan Persepsi Efektifitas Penanganan Konflik Politik , variabel Komunikasi dengan Persepsi Efektifitas Penanganan Konflik Politik, variabel Partisipasi Politik dengan Persepsi Efektifitas Penanganan Konflik Politik. Analisa tabulasi silang ini akan memberikan gambaran prosentase besarnya kategori skor yang dihasilkan dari jawaban responden , sehingga akan menunjukkan secara terperinci hubungan antar variabel . Adapun hubungan antar variabel adalah sebagai berikut :

Tabel 27

Hubungan Antara Pendidikan (X1) Dengan Persepsi Efektifitas Penanganan
Konflik Politik (Y)

X 1 / Y	Rendah	Sedang	Tinggi	S. Tinggi	Jumlah
Rendah	11(61,1%)	7(43,8%)	1(5,6%)	-	19(27,14%)
Sedang	7(38,9%)	6(37,5%)	-	3(16,7 %)	16(22,86%)
Tinggi	-	1(6,3%)	15(83,33%)	4(22,2%)	20(28,57%)
S. Tinggi	-	2(12,5%)	2(11,1%)	11(61,1%)	15(21,43%)
JumlaH	18(100 %)	16(100 %)	18(100%)	18(100%)	70(100 %)

Sumber : Data Primer diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 70 responden , 20 (28,6 %) responden mempunyai pendidikan tinggi , 4 responden persepsinya tentang efektifitas penanganan konflik politik sangat tinggi, 15 responden mempunyai persepsi sedang . Dan tidak ada satupun responden yang persepsinya rendah.

Selanjutnya 19 (27,1 %) responden yang mempunyai pendidikan rendah , persepsinya tinggi, 7 responden persepsinya sedang , 11 responden persepsinya rendah dan tidak satupun responden yang persepsinya sangat tinggi. Kemudian 16 (22,86%) responden yang pendidikannya sedang, 3 responden persepsinya sangat tinggi , 6 responden persepsinya sedang , 7 responden persepsinya tentang efektifitas penanganan konflik politik rendah . Dan tidak ada satupun responden yang persepsinya tinggi.

Sedangkan 15 (21,4%) responden yang pendidikannya sangat tinggi , 11 responden persepsinya sangat tinggi, 2 responden persepsinya tinggi, 2 responden persepsinya sedang. Dan tidak ada satupun responden yang pendidikannya sangat tinggi persepsinya tentang efektifitas penanganan konflik politik tidak ada yang rendah.

Menurut Soerjono Soekanto(1987: 252) , pendidikan merupakan nilai tertentu bagi manusia serta hal- hal baru dan juga bagaimana berfikir secara ilmiah. Sedangkan oleh G. Kartasaputra (1991 : 2-3) , pendidikan merupakan suatu usaha atau kegiatan agar dapat mengubah (pengetahuan, sikap dan ketrampilan) manusia yang sedang dididik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pendidiknya menurut pola atau rencana yang telah ditentukan . Dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan suatu nilai tertentu yang dimiliki manusia yang dapat mengubah pengetahuan , sikap dan ketrampilan manusia sehingga dapat berpikir secara ilmiah . Jika dikaitkan dengan hubungan variabel pendidikan dan persepsi efektifitas penanganan konflik politik , yaitu dengan pendidikan yang sangat tinggi (lulusan perguruan tinggi dan paham pengetahuan umum dan agama) , dan dengan pola pikir yang analitis dan ilmiah dan tidak mengesampingkan pertimbangan agama , maka persepsinya tentang efektifitas penanganan konflik politik sangat tinggi, yaitu konflik tersebut oleh aparat terkait (Muyawarah Pimpinan Daerah/ Muspida) dan elit partai sudah diusahakan semaksimal mungkin antara lain melalui komunikasi dengan pihak terkait, dan konflik tersebut tidak meletus lagi dan berkelanjutan.

Tabel 28

Hubungan Antara Komunikasi (X2) Dengan Persepsi Efektifitas Penanganan
Konflik Politik (Y)

X 2 / Y	Rendah	Sedang	Tinggi	S. Tinggi	Jumlah
Rendah	12(66,7%)	7(50%)	-	-	19(27,1%)
Sedang	6(33,3%)	7(50%)	3(12,0%)	-	16(22,9%)
Tinggi	-	-	17(68,0%)	3(23,1%)	20(28,6%)
S. Tinggi	-	-	5(20,0%)	10(76,9%)	15(21,4%)
Jumlah	18(100%)	14(100%)	25(100%)	13(100%)	70(100 %)

Sumber : Data Primer diolah

Dari tabel 24 di atas , menunjukkan bahwa dari 70 responden , 15 (21,4%) responden yang komunikasinya sangat tinggi , 10 responden responden persepsinya tentang efektifitas penanganan konflik politik sangat tinggi pula , sedang 5 responden yang komunikasinya tinggi persepsinya sangat tinggi. Selanjutnya 20 responden (28,6 %) komunikasinya tinggi , 3 responden persepsinya sangat tinggi , 17 responden persepsinya tinggi. Dari responden yang komunikasinya sangat tinggi dan tinggi tidak ada satupun yang menjawab persepsinya sedang dan rendah.

Kemudian 16 (22,9 %) responden yang komunikasinya sedang, 3 responden persepsinya tinggi , 7 responden persepsinya sedang , 6 responden persepsinya rendah dan tidak ada satupun responden yang persepsinya sangat tinggi . Sedang dari 19 (27,1 %) responden yang komunikasinya rendah, 7

responden persepsinya sedang, 12 responden persepsinya tinggi dan sangat tinggi.

Menurut Mirriam Budiarjo (1998: 163) , komunikasi politik adalah penyaluran aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang , hal ini menimbulkan adanya proses penggabungan kepentingan – kepentingan (interest agregation) dan perumusan kepentingan (interest articulation) dalam bentuk usulan kebijaksanaan sebagai bahan masukan untuk pembuatan kebijakan publik (public policy) . Kemudian public policy itu diperbincangkan dan disebarluaskan kepada masyarakat.

Sementara menurut Kortene dan Syahrir (1988: 254- 255) bahwa dalam suatu kegiatan pembangunan , belajar bersama paling efektif bila dilaksanakan melalui dialog yang melibatkan hubungan yang saling mempercayai antara dua pihak atau lebih . Karena dialog merupakan proses komunikasi yang berkembang dalam kelompok kecil sebagai bentuk dimensi sosial dimana setiap anggota memperoleh andil untuk ikut aktif mengambil keputusan. Melalui keputusan kelompok ini akan dapat diminimalkan segala perbedaan. Pada saat di mana proses pengetahuan kedua belah pihak yang satu dengan yang lain akan kembali, perintah kerjapun akan berubah sehingga kesetiakawanan dan solidaritas sosial akan tumbuh untuk mengadakan kerja sama yang bersifat akomodatif terhadap pihak lain.

Dari dua pendapat tersebut tampak, bahwa penyaluran aneka pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran

pendapat dalam masyarakat berkurang, karena dengan dialog dapat diambil suatu keputusan dan diminimalkan segala perbedaan. Demikian juga ketika PPP dan PKB dipertemukan dalam meja perundingan, maka dalam penelitian ini tampak bahwa responden yang komunikasinya sangat tinggi maka sangat pula persepsinya terhadap efektifitas penanganan konflik politik, begitu juga yang komunikasinya rendah dan sedang maka persepsinya terhadap efektifitas penanganan konflik politik rendah pula.

Tabel 29

Hubungan Antara Partisipasi Politik (X3) Dengan Persepsi Efektifitas
Penanganan Konflik Politik (Y)

X3 / Y	Rendah	Sedang	Tinggi	S. Tinggi	Jumlah
Rendah	11(57,9 %)	8(61,5 %)	-	-	19(27,1%)
Sedang	8 (42.1 %)	5(38,5%)	3(20 %)	-	16(22,9 %)
Tinggi	-	-	10(66,67%)	10(43,5%)	20(28,6%)
S. Tinggi	-	-	2(13,3%)	13(56,5%)	15(21,4%)
Jumlah	19(100 %)	13(100 %)	15(100 %)	23(100 %)	70(100 %)

Sumber : Data Primer diolah

Tabel 29 menunjukkan , bahwa dari 70 responden , 15 (21,4%) responden yang partisipasi politiknya sangat tinggi , 13 responden persepsi efektifitas penanganannya sangat tinggi , 2 responden responden persepsinya tinggi, selanjutnya 20 (28,6 %) responden yang partisipasi politiknya tinggi, 10 responden persepsinya tinggi dan 10 responden persepsinya sangat tinggi . Dari responden yang partisipasi politiknya sangat tinggi dan tinggi, tidak ada satupun responden yang persepsinya sedang dan rendah.

Kemudian 16 responden (22,9 %) yang partisipasi politiknya sedang, 3 responden persepsinya tinggi , 5 responden persepsinya sedang , 8 responden persepsinya rendah . Dan tidak satupun responden yang persepsinya sangat tinggi Sedangkan 19 (27,14%) responden yang partisipasi politiknya rendah, maka 8 responden persepsinya sedang dan 11 responden persepsinya rendah. Dan tidak ada satupun responden yang persepsinya tinggi dan sangat tinggi.

Oleh Keith Davis(1990: 17) , partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi orang- orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka utk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagi tanggungjawab terhadap pencapaian tujuan itu .Selanjutnya oleh David. F . Rath dan Frank L Wilson dalam Mirriam Budiarjo(1998: 7) , agar masyarakat mau ikut berpartisipasi politik dalam suatu penanganan konflik, maka harus diketahui pula cara- cara berpartisipasi masyarakat dalam berpolitik antara lain: aktivis, partisipan, pengamat dan apolitis.

Dari dua pendapat tersebut jika di kaitkan dengan penelitian ini tampak bahwa partisipasi politik masyarakat yang tinggi dimana keterlibatan mental dan emosi cukup tinggi maka akan memberikan tanggungjawab terhadap pencapaian tujuan itu . Partisipasi politik yang rendah dan sedang maka persepsinya atau keterlibatan mental dan emosi tentang efektifitas penanganan konflik rendah pula. Sebab dari tabel di atas terlihat bahwa masyarakat yang partisipasi politiknya rendah maka persepsinya tentang efektifitas penanganan konflik politik rendah, sebaliknya jika persepsi politik tinggi(baik) maka persepsi tentang efektifitas penanganan konflik politik juga tinggi pula . Tidak ada responden yang partisipasi

politiknya tinggi persepsinya rendah , begitu juga masyarakat yang partisipasi politiknya rendah , tidak ada satupun responden pun yang menjawab partisipasinya tinggi atau sangat tinggi.

4. Analisis Koefisien Korelasi Rank Kendall (Tau C)

Analisis ini digunakan untuk mengukur dua hubungan variabel atau lebih yang berskala ordinal hasilnya digunakan untuk membuktikan hipotesa yang pertama yaitu mengenai hubungan pendidikan (X1) dengan persepsi efektifitas penanganan konflik politik (Y), untuk membuktikan hipotesa yang kedua yaitu hubungan antara komunikasi (X2) dengan persepsi efektifitas penanganan konflik politik (Y) serta untuk membuktikan hipotesa yang ketiga yaitu hubungan antara partisipasi politik (X3) dengan persepsi efektifitas penanganan konflik politik (Y) . Untuk mengetahui hasil dari perhitungan dengan analisis ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 30

Hasil Perhitungan Korelasi Rank Kendall (Tau C)

Korelasi hasil	T hitung	T tabel	Keterangan
X1 . Y	7,012	1,997	Signifikan
X2 . Y	9,923	1,997	Signifikan
X3. Y	8,888	1,997	Signifikan

Sumber : Data Primer diolah

Tabel 30 menunjukkan bahwa hasil perhitungan X1 . Y yang merupakan korelasi antara variabel bebas X1 dengan Y sebagai variabel terikat sebesar 0,648

kemudian dilakukan uji t dengan hasil sebesar 7,012 ternyata t test hasilnya lebih besar dari t tabel pada tingkat kepercayaan 95 % .

Dari angka tersebut dikatakan bahwa korelasi variabel bebas pendidikan (X1) dengan variabel terikat persepsi efektifitas penanganan konflik politik (Y) mempunyai hubungan yang signifikan dengan sifat hubungan yang positif . Hasil perhitungan itu membuktikan bahwa hipotesa pertama pendidikan mempunyai hubungan yang positif (signifikan) dengan persepsi efektifitas penangan konflik politik diterima pada taraf kepercayaan 95 %.

Sedangkan perhitungan korelasi antara X 2 dengan Y mempunyai korelasi sebesar 0,769 . Kemudian dilakukan uji t dengan hasil sebesar 9,923 ternyata t test hasilnya lebih besar daripada t tabel pada tingkat kepercayaan 95 % , sedangkan t tabel sebesar 1, 997 . Sehingga komunikasi mempunyai hubungan yang signifikan dengan persepsi efektifitas penanganan konflik politik dengan sifat hubungan yang positif . Perhitungan tersebut membuktikan bahwa hipotesa kedua yaitu komunikasi mempunyai hubungan yang positif (signifikan) dengan persepsi efektifitas penanganan konflik politik pada taraf kepercayaan 95 %.

Selanjutnya hasil yang diperoleh dari perhitungan korelasi antara X 3 dan Y mempunyai korelasi sebesar 0,733 . Setelah dilakukan uji t dengan hasil sebesar 8,888 ternyata t test hasilnya lebih besar dari pada t tabel pada tingkat kepercayaan 95 % sedangkan t tabel sebesar 1,997 . Dengan demikian partisipasi politik mempunyai hubungan yang signifikan (positif) dengan persepsi efektifitas penanganan konflik politik dengan sifat hubungan yang positif . Dari perhitungan tersebut membuktikan bahwa hipotesa ketiga yaitu partisipasi politik

mempunyai hubungan yang positif (signifikan) dengan persepsi efektifitas penanganan konflik politik pada taraf kepercayaan 95 %.

B. 5. Analisis Koefisien Konkordansi Kendall (W)

Analisis ini digunakan untuk mengukur ada tidaknya korelasi secara bersama- sama antar variabel X1, X2, X3 dan Y . Rumus yang digunakan untuk membuktikan hipotesis yaitu pendidikan , komunikasi dan partisipasi politik mempunyai hubungan yang signifikan secara bersama- sama dengan persepsi efektifitas penanganan konflik politik . Tabel dibawah ini merupakan hasil perhitungan Koefisien Konkordansi Kendall (W) .

Tabel 31.

Hasil Perhitungan Koefisien Konkordansi Kendall (W)

Korelasi	W	Chi Square	x Hitung	X Tabel	Keterangan
X1X2X3Y	0,883	185,496	243,708	49,15	Signifikan

Sumber : Data Primer diolah

Dari tabel tersebut dapat dilihat perhitungan X1, X2, X3 dan Y yang merupakan korelasi antara pendidikan , komunikasi dan partisipasi politik dengan partisipasi politik dengan persepsi efektifitas penanganan konflik politik adalah sebesar 243.708 . Ternyata hasilnya lebih besar dari pada x tabel sebesar 49,15 (0.005 : 67) pada tingkat kepercayaan 95 % . Hal ini dapat dikatakan bahwa korelasi secara bersama- sama antara pendidikan , komunikasi dan partisipasi politik dengan persepsi efektifitas penanganan konflik politik adalah signifikan.

Dengan hasil perhitungan tersebut membuktikan bahwa hipotesis yang keempat yaitu pendidikan, komunikasi dan partisipasi politik mempunyai hubungan yang signifikan dengan persepsi efektifitas penanganan konflik politik.

Sementara itu dengan kembalinya Indonesia menganut sistem multi partai memberi pengaruh disatu pihak yaitu nilai kebebasan politik kepada warga negara Indonesia sehingga dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan dilain pihak adalah menimbulkan kebingungan bagi masyarakat awam untuk memilih partai politik yang sesuai dengan hati nuraninya, untuk itu perlu diadakan sosialisasi dari visi, asas dan lambang partai-partai baru kepada masyarakat. Hal tersebut untuk mempermudah masyarakat untuk memilih parpol yang menjadi pilihannya.

Berpijak pada asumsi diatas, maka jumlah partai yang banyak itu mengandung konsekwensi utama yaitu rentannya terjadi konflik dalam persaingan merebut pendukung. Adapun penyebab konflik tersebut adalah sebagai berikut :

1. Deklarasi PKB Ranting Dongos, menimbulkan rasa kekhawatiran PPP akan berkurangnya masa pendukungnya di Dongos, padahal kekuatan PPP di Desa Dongos cukup dominan. Hal ini tanpa dari perolehan suara pemilu hampir 2/3 suara pemilih memilih PPP.
2. Anggota PPP tidak menerimakan anggota PPP masuk menjadi anggota PKB, karena adanya deklarasi tersebut diartikan sebagai "Penggembosan" anggota PPP di Desa tersebut.
3. Pengerahan masa secara besar-besaran dalam konvoi-konvoi dan arak-arakan mobil dan sepeda motor ketika masa kedua partai itu bertemu dipersimpangan

Blok M (Munyuk) Desa Sowan Lor menimbulkan emosi kedua partai tersebut mudah tersulut .

4. Hujat-menghujat oleh juru bicara PPP dan PKB ketika waktu pengajian dan kampanye terbuka sehingga menimbulkan perasaan “marah”, “dangkal” dan dendam diantara kedua belah pihak .
5. Faktor Geografis yang terletak di pantai utara Jawa dimana mempunyai karakteristik tidak mengenal basa-basi , cenderung kasar disertai dengan kehidupan yang agamis shgt masyarakat rela melakukan apa saja untuk kepentingan agama. Atau lebih jelasnya dalam konflik tersebut melibatkasn “kendaraan agama” sebagai upaya untuk mendapat dukungan publik .
6. Sebagaimana dikemukakan oleh William Lidle , (1992 : 92 -98) , bahwa partai-partai memperuncing ketegangan ideologis dikalangan rakyat Indonesia , baik ditingkat elite maupun ditingkat massa sehingga partai-partai tersebut menciptakan ketegangan dalam masyarakat dimana kalangan pemimpin partai mengakumulasi dukungan massa dalam rangka persaingannya dengan elite politik pusat. Hal ini sejalan dengan adanya faktor internal dalam tubuh organisasi tersebut Nahdlatul Ulama (NU) , diaman NU dianggap tidak berlaku adil terhadap seluruh warga Nahdliyyin. Hal ini terlihat dari sikap NU yang menganak emaskan PKB antara lain dengan jargon /slogan politik dari PKB yang mengatkan bahwa PKB adalah partainya orang NU. Akibat dari rasa ketidak adilan ini menimbulkan ketidak puasan dalam tubuh PPP. Kemudian bentuk ketidak puasan dan ketidak adilan ini disalurkan oleh PPP dengan membentuk opini publik oleh kyai-kyai dari

PPP mensosialisasikan statemen-statemen untuk membenci PKB. Pembentukan opini publik dilakukan antara lain oleh KH Afifuddin, KH Sihabuddin dan Hj. Arifah ini langsung diserap oleh simpatisan PPP mentah-mentah tanpa disaring terlebih dahulu. (Wawancara dengan Reserse Polsek Kedung serta Masyarakat Dongos tanggal 26 Juni sampai dengan 4 Juli 2002)

Dari penyebab-penyebab diatas dapat ditarik adanya upaya untuk mempolitisir agama dalam memperebutkan dukungan massa , sehingga konflik tersebut tak terelakkan antara kedua pendukung partai yang sama-sama partai Islam dan masa pendukungnya Islam .(Wawancara dengan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jepara , tanggal 2 Juli 2002)

Setelah NU terbentuk sebagai organisasi , maka kiprahnya di bidang pendidikan melalui pondok pesantren , madrasah dan suara-suara di pedesaan tetap digalakkan . Gerak-gerakan yang dilakukan dalam bidang keagamaan mendapat pengakuan khusus dari masyarakat pedesaan karena dakwah sosial yaitu bersarakan pengabdian yang ihlas terhadap pra santri desa pada umumnya serta strategi kooperasi terbatas pada penjajah dengan harapan dapat menjaga keselamatan organisasi dan jamaah dibawah tekanan kekuasaan penjajah (La Ode Ida , 1996 ; 10) .

Berdasarkan gambaran diatas , maka dapat dikatakan bahwa NU sebagai organisasi agama bukan sebagai organisasi politik . Perjuangan solidaritas NU dengan menumbuhkan semangat nasionalisme selalu dilakukan agar terjadi hubungan yang harmonis dikalangan tokoh-tokoh Islam dalam rangka menjaga

persatuan dan kesatuan bangsa . Akan tetapi keberadaan NU sebagai organisasi agama , tidak dapat bertahan lama ada muktamar ke 19 NU menyatakan diri menjadi partai politik , meskipun telah terjadi ketegangan dan konflik dikalangan tokoh-tokoh internal NU (Suharno, Dokumentasi LKSPESDAM) selanjutnya dikatan dalam menghadapi pemilu 1955 NU menghadapi tantangan yang berat :

1. Massa NU akan terbagi dua , ada yang cenderung memilih NU sebagai organisasi masyarakat dan ada yang membulatkan tekadnya untuk memilih NU sebagai organisasi politik .
2. Strategi kampanye yang dilakukan adalah strategi agama sama dengan Masyumi .

Dalam perjalanan politiknya setelah pada masa Orde Baru dilakukan fusi antara partai , hanya ada tiga partai , maka NU masuk golongan partai Islam dalam hal ini Partai Persatuan Pembangunan Indonesia atau dapat dikatakan NU merupakan kekuatan massa terbesar dalam PPP. Akan tetapi orang-orang NU yang duduk dalam kursi Legislatif sedikit lebih banyak orang Parmusi. Keadaan demikian menyebabkan ada faksi-faksi dalam NU yaitu NU yang politisi dan bukan politisi dan menimbulkan konflik. Kelanjutan dari konflik tersebut menimbulkan pemikiran untuk kembali NU menjadi organisasi keagamaan (Khitthoh 1926) , hal ini berdasarkan : (Marijan , 1992 : 132)

- 1) Kekecewaan tokoh-tokoh NU terhadap percaturan politik yang ada, dimana mereka secara berangsur-angsur hendak disingkirkan .

2) Kekecewaan terhadap kalangan politisi NU, yang cenderung bersifat oportunistik dimana satu sisi NU dijadikan alat manufer politik yang menguntungkan dan disisi lain mereka kurang gigih memperjuangkan aspirasi politik NU di dalam PPP , sehingga terjadi penyusutan dalam perolehan kursi di Parlemen .

Dalam kaitannya dengan Persepsi Efektivitas Penanganan Konflik Politik dalam kasus konflik politik PPP dan PKB adalah penyelesaian pekerjaan pengaturan ketidak sesuaian antara dua atau lebih karena keharusan membagi sumber daya yang terbatas dalam suatu kegiatan, karena adanya perbedaan status tujuan dan nilai secara tepat baik dari waktu penyelesaiannya maupun dalam upaya menetapkan tujuan yang hendak dicapai baik. Adapun pihak yang terlibat dalam penanganan konflik politik agar efektif adalah sebagai berikut :

a. Pemerintah Daerah Jepara

Dalam hal ini, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- Tindakan Preventif yaitu adanya ikrar atau kesepakatan para pimpinan partai politik serta kesepakatan partai politik antara lain : tetap menjagga iklim sejuk di wilayah Jepara , menjaga keharmonisan hubungan kerja, tidak saling menjatuhkan atau membuat statmen yang menyakitkan orang atau partai lain , menjauhkan diri dari sifat arogansi , baik ucapan-tigakah laku , lambang-lambang parpol dan atribut lainnya, mengarahkan seluruh jajarannya sampai ke tingkat bawah , desa dan anggotanya , tidak akan memasang tanda gambar atau atribut lainnya , (sekitar alun-alun dan sepanjang jalan muka Kantor

Pemerintah Daerah dan Masjid Agung , tugu Kartini , tugu PKK , tugu batas Ngabul , dan tugu batas muka RSUD Kartini serta sekitar bundaran air mancur Ngabul).

- Memfasilitasi perundingan kedua partai yang bertikai lewat perundingan agar konflik tersebut tidak terulang lagi dan dapat dicari solusi terbaiknya. Yaitu lewat kampanye-kampanye simpatik dan pawai simpatik yang melibatkan semua parpol di Jepara dan pemasangan tanda gambar bersama-sama di Ngabul. Karena hal ini merupakan aib nasional dan “cukup sekali saja terjadi serta yang terakhir”. (Wawancara dengan Kasi Bina Bangsa , pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jepara tanggal 8 Juli 2002)

b. Aparat Keamanan

Tindakan yang dilakukan sebagai berikut :

- Melakukan tindakan pengamanan dan mengendalikan keamanan saat dan setelah konflik, agar tidak berlarut-larut dan berkelanjutan, sehingga tidak berjatuh korban lebih banyak dan pengrusakan-pengrusakan lebih parah .
- Memproses kasus Dongos berdarah dengan melakukan penyidikan-penyidikan dan meminta keterangan para saksi-saksi untuk selanjutnya diteruskan kepersidangan pengadilan .
- Mengamankan 9 (sembilan) orang provokator di Markas Polisi Resort Jepara (wawancara dengan Reserse Polsek Kedung, Kabupaten Jepara tanggal 26 Juni 2002)

c. Aparat Penegak Hukum

Sikap dan tindakan yang diambil sebagai berikut :

- Menyidangkan tindakan pidana tersebut di Kejaksaan Negeri , meminta kedua partai yang bertikai , berupa jaminan terhadap kelancaran jalannya persidangan.
- Meminta jaminan keselamatan kepada partai-partai yang bertikai atas pengusutan dan persidangan tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota partainya karena adanya ancaman dari anggota-anggota partai yang fanatik untuk mengancam persidangan tersebut kepada pihak yang menuntut atau memutuskan (memvonis) .
- Minta jaminan biaya atas jalannya persidangan , siapa yang sebenarnya paling berjasa menanggung biaya , karena ada anggapan bahwa pelakunya adalah berkelompok .
- Meminta kepada partai yang bertikai untuk mendatangkan oknum-oknum yang kedapatan untuk hadir dalam persidangan , karena banyak yang melarikan diri (Wawancara dengan Jaksa X , Kejaksaan Negeri Jepara tanggal 27 Juni 2002)

d.Elite Partai

Pengurus dan pimpinan partai yang berkonflik adalah pihak yang utama dan yang terutama bertanggung jawab atas terjadinya konflik berdarah tersebut.

Adapun tindakan-tindakan elite-elite partai tersebut adalah :

- Membuat kesepakatan dalam perundingan tidak terjadi “dendam” di antara kedua partai yang berkonflik karena dendam dikhawatirkan akan mengulangi konflik berdarah tersebut .

- Mentaati kesepakatan yang telah dibuat baik dalam ucapan atau sikap bagi kalangan elite politik (pembicara politik atau sejenisnya) ketika melakukan kampanye atau ceramah lainnya .
- Mensosialisasikan kesepakatan tersebut sebagai implementasi sikap sampai massa tingkat bawah (*grass roots*) agar masyarakat menyadari bahwa kesepakatan tersebut dibuat bukan untuk dibacakan saja tetapi untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam berpolitik berbangsa dan bernegara .
- Memberikan bantuan moril dan materiil terhadap para korban yang meninggal atau luka , mobil , sepeda motor, atau rumahnya yang terbakar sesuai kemampuan partainya.(Wawancara dengan pengurus partai PPP dan PKB , orang yang dikorbankan materialnya, dan keluarga korban meninggal akibat konflik tanggal 22 Juni 2002)

B. 4. Analisis Koefisien Korelasi Rank Partial Kendall (τ_{xyz})

Analisis ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya kemungkinan masuknya variabel ketiga , yaitu adanya asosiasi dua variabel. Dalam penelitian ini , analisis Koefisien Korelasi Rank Partial Kendall digunakan utk mengetahui besarnya variabel X2 dalam mendukung variabel X1 dengan Y. Karena test statistiknya belum ada tabel signifikansinya maka dapat dengan cara membandingkan hasil dari Korelasi Rank Kendall . Hasil perhitungan Koefisien Korelasi Rank Partial Kendall untuk hubungan X1 dikontrol X3 terhadap Y dapat dilihat dalam tabel di bawah ini .

Tabel 32

Hasil Perhitungan Analisis Koefisien Korelasi Rank Partial Kendall

Korelasi	Hasil	X1 Y	Keterangan
X1Y X2	0,2922	0,648	Hubungan Semu

Sumber : Data Primer diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel kontrol X2 (Komunikasi) pada variabel X1 (Pendidikan) dan variabel Y (Persepsi Efektivitas Penanganan Konflik Politik) menunjukkan hasilnya t_{xyz} (0,2922) lebih kecil dari t_{X1Y} (0,648) . Hal ini memberikan pengertian bahwa hubungan antara X1 dan X2 serta antara Y dan X2 hanya sedikit mempengaruhi hubungan antara X1 dan Y . Dengan demikian hubungan antara X1 dan Y dikontrol X2 bersifat semu atau tidak murni. Jadi variabel X2 dapat sebagai variabel bebas dimana variabel X2 dapat langsung berhubungan dengan variabel Y tanpa mengontrol variabel X1, begitu juga variabel X1 dapat berdiri sendiri .

Tabel 33.

Hasil Perhitungan Analisis Koefisien Korelasi Rank Partial Kendall

Korelasi	Hasil	X1 Y	Keterangan
X1Y X3	0,1764	0,648	Hubungan Semu

Sumber : Data Primer diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel kontrol X3 (Partisipasi Politik) pada variabel X1 (Pendidikan) dan variabel Y (Persepsi Efektivitas Penanganan Konflik Politik) menunjukkan hasilnya t_{xyz} (0,1764) lebih kecil dari t_{X1Y} (0,648) . Hal ini memberikan pengertian bahwa hubungan antara X1 dan X3 serta antara Y dan X3 hanya sedikit mempengaruhi hubungan antara X1 dan Y . Dengan demikian hubungan antara X1 dan Y dikontrol X3 bersifat semu atau

tidak murni. Jadi variabel X3 dapat sebagai variabel bebas dimana variabel X3 dapat langsung berhubungan dengan variabel Y tanpa mengontrol variabel X1, begitu juga variabel X1 dapat berdiri sendiri .

Tabel 34

Hasil Perhitungan Analisis Koefisien Korelasi Rank Partial Kendall

Korelasi	Hasil	X1 Y	Keterangan
X1Y X2X3	0,0919	0,648	Hubungan Semu

Sumber : Data Primer diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel kontrol X2 (Komunikasi) dan variabel X3 (Partisipasi Politik) pada variabel X1 (Pendidikan) menunjukkan hasilnya t_{xyz} (0,0919) lebih kecil dari t_{X1Y} (0.648). Hal ini memberikan pengertian bahwa hubungan antara X1 dengan X2 dan X3 serta antara Y dan X2 dan X3 hanya sedikit mempengaruhi hubungan antara X1 dan Y . Dengan demikian hubungan antara X1 dan Y dikontrol X2 dan X3 bersifat semu atau tidak murni. Jadi variabel X2 dan X3 dapat sebagai variabel bebas dimana variabel X2 dan X3 dapat langsung berhubungan dengan variabel Y tanpa mengontrol variabel X1, begitu juga variabel X1 dapat berdiri sendiri.

Tabel 35

Hasil Perhitungan Analisis Koefisien Korelasi Rank Partial Kendall

Korelasi	Hasil	X2 Y	Keterangan
X2Y X1	0,6315	0,769	Hubungan Semu

Sumber : Data Primer diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel kontrol X1 (Pendidikan) pada variabel X2 (Komunikasi) dan variabel Y (Persepsi Efektivitas Penanganan Konflik Politik) menunjukkan hasilnya t_{xyz} (0,6315) lebih kecil dari t_{X2Y} (0,769) . Hal ini memberikan pengertian bahwa hubungan antara X2 dan X1 serta antara Y dan X1 hanya sedikit mempengaruhi hubungan antara X2 dan Y . Dengan demikian hubungan antara X2 dan Y dikontrol X1 bersifat semu atau tidak murni. Jadi variabel X1 dapat sebagai variabel bebas dimana variabel X1 dapat langsung berhubungan dengan variabel Y tanpa mengontrol variabel X2, begitu juga variabel X2 dapat berdiri sendiri.

Tabel 36

Hasil Perhitungan Analisis Koefisien Korelasi Rank Partial Kendall

Korelasi	Hasil	X2 Y	Keterangan
X2 Y X3	0,4579	0,769	Hubungan Semu

Sumber : Data Primer diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel kontrol X3 (Partisipasi Politik) pada variabel X2 (Komunikasi) dan variabel Y (Persepsi Efektivitas Penanganan Konflik Politik) menunjukkan hasilnya t_{xyz} (0,4579) lebih kecil dari t_{X2Y} (0,769) . Hal ini memberikan pengertian bahwa hubungan antara X2 dan X3 serta antara Y dan X3 hanya sedikit mempengaruhi hubungan antara X2 dan Y . Dengan demikian hubungan antara X2 dan Y dikontrol X3 bersifat semu atau tidak murni. Jadi variabel X3 dapat sebagai variabel bebas dimana variabel X3 dapat langsung berhubungan dengan variabel Y tanpa mengontrol variabel X2, begitu juga variabel X2 dapat berdiri sendiri .

Tabel 37

Hasil Perhitungan Analisis Koefisien Korelasi Rank Partial Kendall

Korelasi	Hasil	X2 Y	Keterangan
X2Y X1X3	0,4092	0,769	Hubungan Semu

Sumber : Data Primer diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel kontrol X1 (Pendidikan) dan variabel X3 (Partisipasi Politik) pada variabel X2 (Kominikasi) menunjukkan hasilnya t_{xyz} (0,4092) lebih kecil dari t_{X2Y} (0.648) . Hal ini memberikan pengertian bahwa hubungan antara X2 dengan X1 dan X3 serta antara Y dan X1 dan X3 hanya sedikit mempengaruhi hubungan antara X2 dan Y . Dengan demikian hubungan antara X2 dan Y dikontrol X1 dan X3 bersifat semu atau tidak murni. Jadi variabel X1 dan X3 dapat sebagai variabel bebas dimana variabel X1 dan X3 dapat langsung berhubungan dengan variabel Y tanpa mengontrol variabel X2, begitu juga variabel X2 dapat berdiri sendiri .

Tabel 38

Hasil Perhitungan Analisis Koefisien Korelasi Rank Partial Kendall

Korelasi	Hasil	X3 Y	Keterangan
X3Y X1	0,6129	0,733	Hubungan Semu

Sumber : Data Primer diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel kontrol X1 (Pendidikan) pada variabel X3 (Partisipasi Politik) dan variabel Y (Persepsi Efektivitas Penganangan Konflik Politik) menunjukkan hasilnya t_{xyz} (0,6129) lebih kecil dari t_{X3Y} (0,733) . Hal ini memberikan pengertian bahwa hubungan antara X3

dan X1 serta antara Y dan X1 hanya sedikit mempengaruhi hubungan antara X3 dan Y . Dengan demikian hubungan antara X3 dan Y dikontrol X1 bersifat semu atau tidak murni. Jadi variabel X1 dapat sebagai variabel bebas dimana variabel X1 dapat langsung berhubungan dengan variabel Y tanpa mengontrol variabel X3, begitu juga variabel X3 dapat berdiri sendiri .

Tabel 39

Hasil Perhitungan Analisis Koefisien Korelasi Rank Partial Kendall

Korelasi	Hasil	X3 Y	Keterangan
X3Y X2	0,3679	0,733	Hubungan Semu

Sumber : Data Primer diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel kontrol X2 (Komunikasi) pada variabel X3 (Partisipasi Politik) dan variabel Y (Persepsi Efektivitas Penanganan Konflik Politik) menunjukkan hasilnya t_{xyz} (0,3679) lebih kecil dari t_{X3Y} (0,733) . Hal ini memberikan pengertian bahwa hubungan antara X3 dan X2 serta antara Y dan X2 hanya sedikit mempengaruhi hubungan antara X3 dan Y . Dengan demikian hubungan antara X3 dan Y dikontrol X2 bersifat semu atau tidak murni. Jadi variabel X2 dapat sebagai variabel bebas dimana variabel X2 dapat langsung berhubungan dengan variabel Y tanpa mengontrol variabel X3, begitu juga variabel X3 dapat berdiri sendiri .

Tabel 40

Hasil Perhitungan Analisis Koefisien Korelasi Rank Partial Kendall

Korelasi	Hasil	X3 Y	Keterangan
X3Y X1X2	0,3022	0,733	Hubungan Semu

Sumber : Data Primer diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel kontrol X1 (Pendidikan) dan variabel X3 (Komunikasi) pada variabel X3 (Partisipasi Politik) menunjukkan hasilnya t_{xyz} (0,3022) lebih kecil dari t_{X3Y} (0.733) . Hal ini memberikan pengertian bahwa hubungan antara X3 dengan X1 dan X2 serta antara Y dan X1 dan X2 hanya sedikit mempengaruhi hubungan antara X3 dan Y . Dengan demikian hubungan antara X3 dan Y dikontrol X1 dan X2 bersifat semu atau tidak murni. Jadi variabel X1 dan X2 dapat sebagai variabel bebas dimana variabel X1 dan X2 dapat langsung berhubungan dengan variabel Y tanpa mengontrol variabel X3, begitu juga variabel X3 dapat berdiri sendiri.

C. Diskusi

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian mengenai Hubungan Pendidikan, Komunikasi Dan Partisipasi Politik Dengan Persepsi Efektivitas Penanganan Konflik Politik (Kasus Konflik Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Desa Dongos, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara.), maka variabel Pendidikan mempunyai hubungan yang signifikan dengan Persepsi Efektivitas Penanganan Konflik Politik dengan arah hubungan yang positif. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan hasil uji t . Dari hasil perhitungan diperoleh diperoleh t hitung sebesar 7,012 dan t tabel 1,997 . Hasil perhitungan tersebut didukung oleh analisis tabulasi silang dan interpretasi data , yang menunjukkan bahwa semakin baik (tinggi) Pendidikan, semakin baik tinggi (baik) pula Persepsi Efektivitas Penanganan Konflik Politik. Dengan demikian menerima hipotesa kerja (H1) dan menolak

hipotesa nol (H_0) pada variabel itu dengan tingkat kepercayaan 95 %. Dengan demikian menerima hipotesa kerja (H_1) dan menolak hipotesa nol (H_0) pada variabel ini dengan tingkat kepercayaan 95 %. Sedang variabel Komunikasi mempunyai hubungan yang signifikan dengan Persepsi efektivitas Penanganan Konflik Politik dengan arah hubungan positif. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan hasil uji t . Dari hasil perhitungan diperoleh t hitung sebesar 9,923 dan t tabel sebesar 1,997. Hasil perhitungan tersebut didukung oleh analisis tabulasi silang dan interpretasi data, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi (baik) komunikasi maka semakin tinggi (baik) pula Persepsi Efektivitas Penanganan Konflik Politik. Dengan demikian menerima hipotesa kerja (H_1) dan menolak hipotesa nol (H_0) pada variabel itu dengan tingkat kepercayaan 95 %. Variabel Partisipasi Politik mempunyai hubungan yang signifikan dengan Persepsi Efektivitas Penanganan Konflik Politik dengan arah hubungan positif. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan hasil uji t , dari hasil perhitungan tersebut diperoleh t hitung sebesar 8,888 dan didukung oleh tabulasi silang dan interpretasi data, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi (baik) Komunikasi semakin tinggi (baik) pula Persepsi Efektivitas Penanganan Konflik Politik. Dengan demikian menerima hipotesa kerja (H_1) dan menolak hipotesa nol (H_0) pada variabel itu dengan tingkat kepercayaan 95 %. Sedangkan hasil uji hipotesa dengan menggunakan Koefisien Konkordansi Kendall diperoleh hasil χ^2 hitung sebesar 243,708 dan χ^2 tabel sebesar 49,15. Hal ini berarti bahwa antara Pendidikan, Komunikasi Dan Partisipasi Politik secara bersama – sama mempunyai hubungan yang signifikan dengan Persepsi Efektivitas Penanganan

Konflik Politik. Dengan demikian menerima hipotesa kerja (H1) dan menolak hipotesa nol (H0) pada variabel itu dengan tingkat kepercayaan 95 %.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian mengenai Hubungan Pendidikan, Komunikasi Dan Partisipasi Politik Dengan Persepsi Efektivitas Penanganan Konflik Politik (kasus konflik politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Desa Dongos, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara.), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel Pendidikan mempunyai hubungan yang signifikan dengan Persepsi Efektivitas Penanganan Konflik Politik dengan arah hubungan yang positif. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan hasil uji t . Dari hasil perhitungan diperoleh diperoleh t hitung sebesar 7,012 dan t tabel 1,997 . Hasil perhitungan tersebut didukung oleh analisis tabulasi silang dan interpretasi data , yang menunjukkan bahwa semakin baik (tinggi) Pendidikan, semakin baik tinggi (baik) pula Persepsi Efektivitas Penanganan Konflik Politik. Dengan demikian menerima hipotesa kerja (H1) dan menolak hipotesa nol (H0) pada variabel itu dengan tingkat kepercayaan 95 %. Variabel Komunikasi mempunyai hubungan yang signifikan dengan Persepsi efektifitas Penanganan Konflik Politik dengan arah hubungan positif. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan hasil uji t . Dari hasil perhitungan diperoleh t hitung sebesar 9,923 dan t tabel sebesar 1,997 . Hasil perhitungan tersebut

didukung oleh analisa tabulasi silang dan interpretasi data , yang menunjukkan bahwa semakin tinggi (baik) komunikasi maka semakin tinggi (baik) pula Persepsi Effektivitas Penanganan Konflik Politik . Dengan demikian menerima hipotesa kerja (H1) dan menolak hipotesa nol (H0) pada variabel itu dengan tingkat kepercayaan 95 %.

2. Variabel Partisipasi Politik mempunyai hubungan yang signifikan dengan Persepsi Effektivitas Penanganan Konflik Politik dengan arah hubungan positif . Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan hasil uji t , dari hasil perhitungan tersebut diperoleh t hitung sebesar 8,888 dan didukung oleh tabulasi silang dan interpretasi data , yang menunjukkan bahwa semakin tinggi (baik) Komunikasi semakin tinggi (baik) pula Persepsi Effektivitas Penanganan Konflik Politik. Dengan demikian menerima hipotesa kerja (H1) dan menolak hipotesa nol (H0) pada variabel itu dengan tingkat kepercayaan 95 %.
3. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan Koefisien Konkordansi Kendall diperoleh χ^2 hitung sebesar 243, 708 dan χ^2 tabel sebesar 49,15 . Hal ini berarti bahwa antara Pendidikan, Komunikasi Dan Partisipasi Politik secara bersama – sama mempunyai hubungan yang signifikan dengan Persepsi Sffektivitas Penanganan Konflik Politik. Dengan demikian menerima hipotesa kerja (H1) dan menolak hipotesa nol (H0) pada variabel itu dengan tingkat kepercayaan 95 %.

B. Saran.

Berdasarkan pembahasan di atas maka dari penelitian ini dapat disusun suatu saran yang merupakan upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan Persepsi Efektivitas Penanganan Konflik Politik yang baik, untuk waktu selanjutnya yaitu ;

1. Tinggi (baik) Pendidikan yang diperoleh masyarakat baik secara formal , non formal maupun informal merupakan faktor yang mempunyai hubungan yang signifikan dengan Persepsi Efektivitas Penanganan Konflik Politik. Meskipun demikian akan menjadi lebih baik jika Pendidikan Menengah yang mayoritas ditempuh masyarakat ataupun pendidikan pesantren perlu disosialisasikan berkenaan pendidikan politik yang baik (sehat), yang tidak menyalahi peraturan agama dan negara sehingga tidak terjadi Persepsi yang tidak baik oleh masyarakat terhadap Efektivitas Penanganan Konflik Politik kepada aparat yang terkait , karena mereka kan dapat berpikir dan menganalisa dengan baik Efektivitas Penanganan Konflik Politik .
2. Komunikasi yang baik merupakan faktor yang memiliki hubungan yang signifikan dengan Persepsi Effektivitas Penanganan Konflik Politik . Keadaan ini akan lebih baik lagi bila diupayakan langka-langka arus pertukaran informasi yang lebih komukatif terutama bagi masyarakat yang pendidikannya rendah , untuk itu ada ceramah ataupun pengarahan dari tokoh masyarakat atau elit politik (partai) agar ada komunikasi yang baik , tidak hanya porvokasi dan menghasut . Dengan keadaan ini maka akan berbanding lurus dengan Persepsi Efektivitas

Penanganan Konflik Politik , maksudnya semakin tinggi (baik) komunikasi yang dijalankan , maka semakin tinggi (baik) pula Persepsi Efektivitas Penanganan Konflik Politik .

2. Partisipasi Politik masyarakat merupakan variabel yang mempunyai hubungan yang signifikan dengan Persepsi Efektivitas Penanganan Konflik Politik . Oleh karena itu perlu dilakukan usaha untuk merubah partisipasi politik masyarakat yang seakan-akan dimobilisir dan belum ada kesadaran murni serta ada paksaan dengan menjadi partisipan yang berkualitas yaitu aktifis yang baik , partisipan maupun pengamat bukan partisipasi yang menyimpang (pembunuhan dan kejahatan politik) . Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pengarahan , informasi-informasi dan memberikan contoh partisipasi politik yang baik , melalui perkataan , sikap , dan perbuatan sehingga akan dapat diyakinkan partisipasi politiknya baik . Dengan demikian persepsi masyarakat tentang efektivitas penanganan konflik politik akan semakin baik .
3. Untuk mewujudkan persepsi masyarakat yang baik dan positif terhadap aparat terkait dan partai yang bertikai (konflik) , maka perlu ditingkatkan dedikasi dan pengurbanan dari aparat terkait dalam menangani konflik tersebut agar tercapai tujuan yang efektif . Untuk itu perlu dikembangkan penelitian yang sejenis dengan menggunakan variabel-variabel lain .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arifin , Anwar , *Ilmu Komunikasi* , 1998 , Raja Grafindo Persada , Jakarta.
- Arikunto , Suharsini , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* , 1990 , Bina Cipta , Bandung .
- Budiarjo , Mirriam , *Partisipasi Dan Partai Politik* , 1998 , Yayasan Obor Indonesia , Jakarta .
- Budiarjo , Mirriam , *Dasar-dasar Ilmu Politik* , 1978 , Gramedia Utama , Jakarta .
- Cipto , Bambang , *Prospek Dan Tantangan Partai Politik* , 1996 , Pustaka Pelajar , Yogyakarta .
- Combs , dan Manzor Ahmed , *Menerangi Kemiskinan Di Pedesaan Melalui Pendidikan Non Formal* , 1985 , Rajawali , Jakarta .
- Der Schroeff , H.J.Van dan Willem H.Makaliwe , *Manajemen Dan Organisasi Perusahaan* , 1986 , Ghalia Indonesia , Jakarta .
- Duverger , Maurice , *Sosiologi Politik* , 1998 , PT. Raja Grafindo , Jakarta .
- Gibson , et.al , *Organisasi Dan Manajemen* , 1988 , Gelora Aksara Pratama , Jakarta.
- Handoko , T. Hani , *Manajemen* , 1995 , BPFE – UGM , Yogyakarta .
- Huntington , Samuel P , *Tertib Politik* , 1983 , Rajawali , Jakarta .
- Hadi , Sutrisno , *Statistik II* , 1984 , Yayasan Fakultas Psikologi , Yogyakarta .
- Imam Barnabib , Sutari , *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis* , 1993 , Balai Pustaka , Jakarta .
- Isywara , *Pengantar Ilmu Politik* , 1990 , Bina Cipta , Bandung .
- Ibrahim , Herman dan Faisal Siagian , *Kampanye Tanpa Kekerasan Pada Pemilu* , Biro Humas Depdagri , 1999 , CV. Citra Utama , Jakarta .

Ida La Ode, *Anatomi Konflik NU, Elit Islam Dan Negara*, 1996, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Jahi , Amri , ed , *Komunikasi Massa Dan Pembangunan Pedesaan Di Negara Dunia ke III* , 1993 , Gramedia Pustaka Utama , Jakarta .

Kartono , Kartini , *Pengantar Methodologi Research* , 1989 , Bina Aksara Bandung .

Kuncoroningrat , *Methodologi Penelitian Masyarakat* , 1997 , Gramedia , Jakarta .

Kerlinger , *Methodologi Penelitian* , 1987 , Bina Aksara , Bandung .

Kertapati , Ton , *Teori Komunikasi* , 1980 , Bina Aksara , Jakarta.

Korten, DC Dan Syahrir, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, 1988, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Lynd, RS, *Knowledge for What ?* ,1948,Prince Town University Press

Nimmo , Dan , *Komunikasi Politik Khalayak Dan Efek* , 1989 , Remaja Karya , Bandung .

Plano , Jack , *Kamus Analisa Politik* , 1986 , CV Rajawali , Jakarta.

P.Siagian , Sondang , *Patologi Birokrasi Analisis , Identifikasi Dan Terapinya* , 1994 , Ghalia Indonesia , Jakarta .

P.Robins , Stephen , *Perilaku Organisasi* , 1996 , PT.Prenhallindo , Jakarta .

Riwokahu , Josef , *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Indonesia , Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya* , 1998 , Rajawali Press , Jakarta .

Rauf , Maswadi dan Mappa Nasrun , ed , *Indonesia Dan Komunikasi Politik* , 1993 , AIPI dan Gramedia Pustaka Utama , Jakarta .

Sukanto , Soerjono , *Sosiologi Suatu Pengantar* , 1987 , Penerbit UI , Jakarta .

Siagiaan , Harbangun , *Administrasi Pendidikan Suatu Pendekatan Sistematis* , 1989 , Satya Wacana , Semarang .

Surahmad , Winarno , *Dasar-dasar Tehnik Research* , 1975 , Gramedia , Jakarta .

Singarimbun , Masri dan Sofyan Efendi , *Methode Penelitian Survai* , 1989 , Gramedia , Jakarta .

Steers , Richard , *Efektifitas organisasi* , 1988 , Erlangga , Jakarta .

Syamsi , Ibnu , *Pokok-pokok Organisasi* , 1980 , Bina Aksara , Jakarta.

Tjokroamojoyo , Bintoro , *Pengantar Administrasi Pembangunan* , 1979 , Pustaka LP3ES Indonesia , Jakarta .

Tanter , Richard dan Kenneth Young , *Politik Kelas Menengah Indonesia* , 1993 , Pustaka LP3ES Indonesia , Jakarta .

Tanlain , Wens , *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan* , 1989 , Gramedia , Jakarta .

Toha , Miftah , *Kepemimpinan Dalam Manajemen* , 1999 , PT. Raja Grafindo , Jakarta .

Thamrin, Sonata, ed, *Undang- undang Politik Buah Reformasi Setengah Hati*, 1999, Yayasan Pencerahan Rakyat Indonesia Baru, Jakarta.

Uchyana , Onong Efendi , *Ilmu Komunikasi* , 1984 , Rosdakarya , Bandung .

Vradennbergt , J , *Methode Dan Tehnik Penelitian* , 1978 , Gramedia , Jakarta .

Walgito , Bimo , *Psikologi Suatu Pengantar* , 1975 , Penerbit Fakultas Psikologi UGM , Yogyakarta .

B. Literatur Lain

Undang-undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional .

Undang-undang No.2 Tahun 1999 tentang Partai Politik .

Undang-undang No.3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum .

Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah .

Jurnal Analisis CSIS , *Kekerasan Dan Pengendalian Konflik* , 2001 , 3 : 254 – 259 .

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No. 2 Tahun 2002 . tentang Bantuan Keuangan Partai politik .